

Tim Editor :

St. Nurbaya, Supadiyanto, Avin Fadilla Helmi
Maria Bramanwidyantari

Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar se-Kabupaten Sleman selama Pandemi COVID-19

(Mendesain) Strategi Pembelajaran di Masa Transisi menuju Tatanan Normal Baru (New Normal)



Supadiyanto, Theresia Anita Christiani, St. Nurbaya,
Avin Fadilla Helmi, Sudiyo, Nurjamil Dimiyati, Suyono, Buchori,
John Suprihanto, Akhmad Ritaudin, Nursya'bani Purnama

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam melakukan evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman dan menjadi dasar pertimbangan menetapkan kebijakan bidang pendidikan di masa datang. Di tengah suasana krisis pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada berbagai bidang kehidupan, terutama sektor pendidikan di Kabupaten Sleman, menjadi ujian bersama bagi para guru, pelajar, dan stakeholders pendidikan untuk bersatu dan berkomitmen memajukan kualitas SDM. Inilah saatnya untuk bekerjasama dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman menuju kondisi yang lebih maju lagi. Selamat atas terbitnya buku hasil riset ini, semoga berkontribusi besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia secara luas. (Drs. Ery Widaryana, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman)

Tradisi menulis dan meneliti memang belum menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi publik. Penerbitan buku ini sebagai ikhtisar bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025, meski di tengah keterbatasan apalagi dalam suasana tanggap darurat COVID-19 masih tetap produktif dan inovatif dalam mempublikasikan hasil penelitian. Di samping berisi riset, dalam buku ini juga disisipkan juga pengalaman 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 mengenai kontribusi mereka dalam mengawal dan memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Semoga rekomendasi yang ada dalam buku ini bermanfaat khususnya bagi pengambil keputusan di bidang pendidikan Kabupaten Sleman khususnya Bupati Sleman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menetapkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan. (Sudiyo, S.Ag., M.Pd., Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman)

Buku ini berisi hasil kajian/riset yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan menyumbangkan gagasan atau artikel mereka di dalamnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi publik sehingga mampu memotivasi dan menghidupkan tradisi menulis di Indonesia. Darurat COVID-19, harus disikapi dengan bijaksana dan tetap waspada. Tahun 2021, Indonesia harus bebas dari COVID-19. Selamat membaca, semoga menginspirasi! (Supadiyanto, S.Sos.I, M.I.Kom.dkk., Tim Editor Buku).

**Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar
se-Kabupaten Sleman selama Pandemi COVID-19:
(Mendesain) Strategi Pembelajaran di Masa Transisi
menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*)**

Tim Penulis:

Supadiyanto, Theresia Anita Christiani, St. Nurbaya, Avin
Fadilla Helmi, Sudiyo, Nurjamil Dimiyati, Suyono, Buchori, John
Suprihanto, Akhmad Ritaudin, dan Nursya'bani Purnama

Tim Editor:

St. Nurbaya
Supadiyanto (Koordinator)
Theresia Anita Christiani
Avin Fadilla Helmi
Maria Bramanwidyantari



Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar se-Kabupaten Sleman selama Pandemi COVID-19: (Mendesain) Strategi Pembelajaran di Masa Transisi menuju Tata Normal Baru (*New Normal*)

Tim Penulis : Supadiyanto, Theresia Anita Christiani, St. Nurbaya, Avin Fadilla Helmi, Sudiyo, Nurjamil Dimyati, Suyono, Buchori, John Suprihanto, Akhmad Ritaudin, dan Nursya'bani Purnama

Tim Editor : St. Nurbaya, Supadiyanto (Koordinator), Theresia Anita Christiani, Avin Fadilla Helmi, dan Maria Bramanwidyantari

Tata Letak : Ulfa

Desain Cover : Ityan Jauhar

Sumber cover : <https://www.flickr.com/photos/191293550@N06/50674243451/>

15.5 x 23 cm, xiv + 139 hlm.

Cetakan I, Desember 2020

ISBN: 978-623-7707-98-1

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

Bekerja sama dengan:

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 yang berhasil mempublikasikan riset di tengah pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam melakukan evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman dan menjadi dasar pertimbangan menetapkan kebijakan bidang pendidikan di masa datang.

Kedua, di tengah suasana krisis pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada berbagai bidang kehidupan, terutama sektor pendidikan di Kabupaten Sleman, menjadi ujian bersama bagi para guru, pelajar, dan *stakeholders* pendidikan untuk bersatu dan berkomitmen memajukan kualitas SDM. Pandemi COVID-19 jangan dimaknai sebagai musibah nasional dan dunia, namun harus dimaknai sebagai penanda zaman untuk mengoptimalkan berbagai teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika) untuk mendukung program pembelajaran daring. Program Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebelum pandemi COVID-19, sejatinya menjadi jawaban atas hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah konstelasi dunia ke arah digital.

Inilah saatnya untuk bekerjasama dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman menuju kondisi yang lebih maju lagi. Selamat atas terbitnya buku hasil riset ini, semoga berkontribusi besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia secara luas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 November 2020

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, flowing script that appears to be 'Ery Widaryana'.

Drs. Ery Widaryana, M.M.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkanlah kami, seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 menerbitkan buku berjudul: “Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar se-Kabupaten Sleman selama Pandemi COVID-19 dan Mendesain Strategi Pembelajaran di Masa Transisi menuju Tataan Normal Baru (*New Normal*)”. Buku hasil riset tim Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman ini bekerjasama dengan sejumlah pihak (PGRI Kabupten Sleman dan termasuk penerbit buku). Tanpa adanya kerjasama yang baik dan kompak, mustahil bisa terwujud menjadi sebuah buku.

Tradisi menulis dan meneliti memang belum menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi publik. Penerbitan buku ini sebagai ikhtiar bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025, meski di tengah keterbatasan apalagi dalam suasana tanggap darurat COVID-19 masih tetap produktif dan inovatif dalam mempublikasikan hasil penelitian.

Di samping berisi riset, dalam buku ini juga disisipkan juga pengalaman 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 mengenai kontribusi mereka dalam mengawal dan memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

Semoga rekomendasi yang ada dalam buku ini bermanfaat khususnya bagi pengambil keputusan di bidang pendidikan Kabupaten Sleman khususnya Bupati Sleman dan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menetapkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan. Bagi publik, selamat membaca, semoga memberikan pencerahan. Terima kasih kepada segenap penulis dan tim editor serta penerbit buku ini.

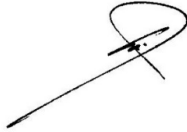
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 November 2020

Hormat kami,

Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a horizontal line crossing it, and a long, sweeping tail stroke extending to the left.

Sudiyo, S.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman).....	iii
KATA PENGANTAR (Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman).....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>).....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Metode Penelitian.....	4
BAB II	
PEMBAHASAN	6
A. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman	6
B. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Sleman	17
C. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan TK di Kabupaten Sleman	32
D. Refleksi Pengalaman Berkiprah menjadi Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Selama Pandemi COVID-19	38
• Eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan Ikhtiar Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sleman Menghadapi Pandemi COVID-19 (<i>Oleh: Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.</i>) ..	39

• Catatan Singkat Kunjungan dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan PPDB Kabupaten Sleman (Oleh: <i>Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.</i>)..	50
• Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dan Hari Pahlawan (Oleh: <i>Drs. Nurjamil Dimayati</i>).....	59
• Refleksi Peran Strategi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kemajuan Pendidikan di Sleman Selama Pandemi COVID-19 (Oleh: <i>Sudiyo, S.Ag., M.Pd.</i>)	62
• Kendala Pembelajaran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Era COVID-19 (Oleh: <i>Dr. St. Nurbaya, M.Si., M.Hum.</i>).....	67
• Pembelajaran di Saat Pandemi COVID-19 (Oleh: <i>Drs. Suyono, M.Pd.</i>).....	72
• Refleksi Pengalaman Pendidikan Jarak Jauh Selama Pandemi COVID-19 (Oleh: <i>Drs. Buchori</i>)	76
• <i>Master Plan</i> Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025 Pasca Pandemi COVID-19 (Oleh: <i>Dr. John Suprihanto, M.I.M.</i>).....	80
• Dewan Pendidikan yang Sukses dan Menyukseskan (Oleh: <i>Akhmad Ritaudin, M.Pd.</i>).....	96
• Strategi Adaptasi menuju Tata Normal Baru bagi Siswa SD Kelas Rendah di Masa Pandemi COVID-19 (Oleh: <i>Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si.</i>).....	101
• Pemetaan Indikator Kualitas Layanan Sekolah sebagai Dasar Perbaikan Kualitas Pendidikan dan Solusi PPDB pada Masa Pandemi (Oleh: <i>Dr. (C.) Nursya'bani Purnama, M.Si.</i>).....	108

BAB III

PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
PROFIL TIM PENELITI/PENULIS DAN EDITOR	126

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Pandemi COVID-19 telah menimpa bangsa ini sejak pertengahan Maret 2020 sampai sekarang telah mengakibatkan dampak besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Saat ini sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan publik untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Riset mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman masih minim. Ada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kendala atau hambatan yang dihadapi para guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19? Kedua, bagaimanakah solusi untuk mengatasi berbagai kendala atau hambatan dalam dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19? Jenis penelitian adalah penelitian empiris/survey. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk membantu mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan. Penelitian melibatkan sebanyak 571 responden/guru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, diskusi grup terpadu (FGD), dan refleksi pengalaman empirik dari 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Waktu penelitian berlangsung selama masa pandemi COVID-19 sejak Maret sampai November 2020.

Hasilnya, kendala utama dalam kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19 adalah masalah tersedianya fasilitas infrastruktur telekomunikasi berupa perangkat *handphone*

dan akses Internet. Disusul masalah pembelajaran atau kurikulum yang harus disampaikan, dan kendala pendampingan orangtua kepada anak-anaknya serta kesulitan para guru berkomunikasi dengan para orangtua atau walimurid. Solusi paling banyak mendapatkan tanggapan yakni mengenai penyesuaian materi atau kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis daring tersebut. Disusul dengan gagasan mengadakan *home visit* serta meningkatkan komunikasi intensif antara guru dan murid. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melakukan sejumlah kebijakan dalam mengatasi masalah pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 antara lain: dengan menerapkan program Belajar dari Rumah, pembinaan guru, memberikan bantuan pendanaan misalnya untuk subsidi kuota internet kepada guru dan murid, pemantauan serta evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19, dan gagasan program *home visit* di tingkat TK dan SD (walaupun kemudian kebijakan ini lantas ditiadakan). Keempat, para guru berharap besar agar pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan belajar mengajar secara daring dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Bahkan sebanyak 149 guru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman berharap besar agar diadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tatap muka, namun tetap mengedepankan prosedur protokol kesehatan secara ketat.

Terkait dengan gagasan program *home visit*, sebagian besar guru (sebanyak 309 responden) menyetujui program tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah responden yang tidak setuju dengan program tersebut sebanyak 224 orang, sedangkan 38 responden tidak menjawab atau tidak menentukan pilihan. Program *home visit* bisa menjadi pilihan program yang baik namun harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan “sebaiknya diperuntukkan bagi para pelajar yang mengalami permasalahan akademik saja”.

Rekomendasinya, pemerintah harus memfasilitasi *handphone* dan akses Internet untuk murid-murid yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu. Terkait program *home visit*; sebaiknya dipertimbangkan kembali mengingat pergerakan jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sleman sampai akhir November 2020 masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman diharapkan menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka pada awal tahun 2021 dengan hati-hati dan bijaksana, mengingat pandemi COVID-19 masih menjadi masalah besar di Kabupaten Sleman; terutama potensi pasca pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dan Pilkadaes 20 Desember 2020—yang membuka peluang terjadinya “lonjakan” jumlah penderita COVID-19 di Sleman jika tidak waspada. Rekomendasi utama yang bisa diberikan adalah peran pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui pemfasilitasian, pembinaan dan pendampingan intensif kepada semua pihak (guru, murid, dan orangtua) mengenai proses pembelajaran daring (maupun jika ke depan diadakan model tatap muka dan *home visit*) pada masa tanggap darurat COVID-19 ini—semuanya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan yang ekstra tinggi. (*)

ABSTRAK

Penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 telah mengakibatkan dampak besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Persoalan pendidikan terutama yang merupakan dampak dari COVID-19 membutuhkan kebijakan-kebijakan strategis dari Dinas Pendidikan. Sementara riset mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman masih belum banyak dapat dilakukan. Terdapat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kendala atau hambatan yang dihadapi para guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19? Kedua, bagaimanakah solusi untuk mengatasi berbagai kendala atau hambatan dalam dalam Kegiatan Belajar Mengajar di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19? Jenis penelitian adalah penelitian empiris (survey). Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk membantu mendeskripsikan dan menganalisis dua masalah pokok di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19 adalah masalah tersedianya fasilitas infrastruktur telekomunikasi pembelajaran atau kurikulum, dan pendampingan orangtua kepada anak-anaknya, serta kesulitan berkomunikasi dengan orangtua/wali murid. Solusi paling banyak mendapatkan tanggapan yakni mengenai penyesuaian materi atau kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis daring tersebut. Disusul dengan gagasan mengadakan *home visit* serta meningkatkan komunikasi intensif antara guru dan murid. Pemerintah sudah melaksanakan pemberian bantuan fasilitas pembelajaran daring. Rekomendasi yang utama diberikan adalah peran pemerintah melalui Dinas Pendidikan melalui pembinaan dan pendampingan mengenai proses pembelajaran pada masa yang tidak normal ini.

Kata-kata kunci: pandemi COVID-19, pendidikan, kendala, home visit, solusi

ABSTRACT

The spread of COVID-19 that has occurred in Indonesia since mid-March 2020 has had a significant impact on various life sectors, including the world of education in the Sleman Regency. Education issues, especially those affected by COVID-19, require policies from the Education Office. Meanwhile, research on the impact of COVID-19 on the world of education in the Sleman Regency is still not much done. There are two problem formulations. First, teachers' obstacles or obstacles in teaching and learning activities at Kindergarten, Elementary, and Junior High School levels in Sleman Regency during the COVID-19 pandemic? Second, what are the solutions to overcome the various obstacles in teaching and learning activities at Kindergarten, Elementary, and Junior High Schools throughout Sleman Regency during the COVID-19 pandemic? This type of research is empirical research (survey). The data used are primary data and secondary data. The data analysis technique used qualitative data analysis techniques. Quantitative data is used to help describe and analyze problems. The results showed that the main obstacles in online teaching and learning activities during the COVID-19 pandemic were the availability of learning telecommunication infrastructure facilities or curricula, and parental assistance to their children, as well as difficulties communicating with parents. The solution that gets the most responses is about adjusting the material or learning activities in online-based learning. It was followed by the idea of holding a home visit and increasing intensive communication between teachers and students. The government has already assisted with online learning facilities. The main recommendation is the government's role through the Education Office through coaching and assistance regarding the learning process at this abnormal time.

Keywords: COVID-19 pandemic, education, obstacles, home visit, solutions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan masa Tanggap Darurat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhitung sejak medio Maret 2020 sampai sekarang. Tidak terasa, sudah hampir 9 bulan terakhir, bangsa ini dihantam oleh virus COVID-19, di mana kasus pertama kali muncul di China pada Desember 2019 lalu menyebar eksplosif ke seluruh penjuru dunia. Sampai akhir November 2020, jumlah korban jiwa akibat pandemi COVID-19 lebih dari 1,4 juta orang telah meninggal dunia dan lebih dari 60,79 juta orang terpapar (positif) COVID-19. Di Indonesia sendiri lebih dari 16 ribu jiwa telah meninggal dunia dan lebih dari 500.000 penduduk telah dinyatakan positif terpapar COVID-19 (WHO, 2020; dan *Worldometer*, 2020).

Adanya pandemi COVID-19 yang juga menimpa bangsa ini, telah membuat semua aspek kehidupan melakukan adaptasi, termasuk di dalamnya aspek pendidikan. Dunia pendidikan “dipaksa” untuk beradaptasi dengan cepat dengan situasi pandemi COVID-19. Adaptasi dilakukan demi mencegah meluasnya penularan COVID-19 pada warga sekolah maupun pada masyarakat umum.

Untuk mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI misalnya menerbitkan Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kemendikbud RI; Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan; Surat Edaran Mendikbud RI No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04/KB/2020; Nomor 737 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020; Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 pada 20 November 2020, serta regulasi lainnya.

Sebagai implementasi dari Surat Edaran Mendikbud RI No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19; Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menginstruksikan pembelajaran secara daring pada semua satuan pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai “mitra” Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, telah berhasil melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19.

Kajian-kajian mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sleman hingga sekarang saat ini masih sangat terbatas. Bahkan berdasarkan penelusuran tim riset, melalui kajian literatur, tim peneliti belum menemukan hal tersebut. Berikut ini disampaikan saripati hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pertama, penelitian milik Wahyu Aji Fatma Dewi (2020) mengungkapkan bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di SD dapat terlaksana dengan cukup baik jika terjadi kerjasama antara guru, siswa, dan orangtua dalam belajar di rumah. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Isa Anshori dan Zahro’ul Illiyyin (2020) menjelaskan pembelajaran *online* dengan menggunakan teknologi menjadi dalam proses belajar mengajar di MTs Al-Asyhar Bungah Gresik menjadi penting demi mempertahankan mutu SDM yang berkualitas meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Ketiga, Arifah Prima Satrianingrum

dan Iis Prasetyo (2020) dalam riset terbarunya menegaskan bahwa pembelajaran daring dari rumah menjadi tantangan bagi para guru karena mereka mengalami banyak kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, koneksi internet, minimnya mereka dalam mengontrol kegiatan siswa di rumah masing-masing, dan lainnya. Keempat, hasil penelitian milik Rodame Monitorir Napitulu (2020), mengkaji mengenai pembelajaran jarak jauh dinilai oleh para mahasiswa IAIN Padangsidimpuan tidak tepat di masa pandemi COVID-19. Mereka tidak puas dengan mode pembelajarannya dan tidak puas dengan kemampuan para dosen dalam menyampaikan materi dalam pendidikan jarak jauh.

Kelima, hasil riset milik Supadiyanto (2020), menekankan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan bergesernya pada model pembelajaran dari tatap muka menjadi daring, adanya penghapusan Ujian Nasional, dan optimalisasi fungsi orangtua dan keluarga sebagai guru dan sekolah bagi para pelajar. Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk merespons adanya pandemi tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, karena memiliki kebaruan dalam hal evaluasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 hanya di Kabupaten Sleman (lokalitas), dan terlibatnya seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai tim riset.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua rumusan masalah pokok dalam kajian ini. Pertama, bagaimanakah kendala atau hambatan yang dihadapi para guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19? Kedua, bagaimanakah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala atau hambatan dalam dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman selama pandemi COVID-19?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris/survey. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk membantu mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan. Penelitian melibatkan sebanyak 571 responden/guru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, diskusi grup terpadu (FGD), dan refleksi pengalaman empirik dari 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025.

Total populasi yang mengisi kuesioner secara *online* sebanyak 1.197 guru. Namun tim peneliti secara purposif hanya memilih dan mengolah hasil jawaban dari kuesioner sebanyak 571 guru. Argumentasinya, untuk mendapatkan potret yang presisi, namun mengejar kecepatan waktu; mengingat kondisi tanggap darurat COVID-19 menuntut adanya kecepatan, ketepatan, dan kepastian untuk menentukan kebijakan mendesak di bidang pendidikan.

Kuesioner sengaja dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka, sehingga memberikan kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) kepada para responden untuk menjawab dengan leluasa sesuai dengan kondisi dan argumentasi yang dimiliki. Di samping itu, responden bebas menjawab dengan sejumlah jawaban, tidak harus dengan satu jawaban. Implikasinya, jumlah jawaban yang terkumpul dari seluruh pertanyaan yang diajukan tiap kategorinya, bisa melebihi jumlah respondennya.

Hal tersebut sangat logis, sebagai implikasi dari model pertanyaan yang dibuat secara terbuka. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan koding pada data responden terpilih, yakni dengan melakukan pengkategorisasian dan persentase hasil. Dalam melakukan koding, tim peneliti Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dibantu pengkoder bernama Maria Bramanwidyawantari. Data hasil peng-koding-an, lantas diinterpretasikan dan dilengkapi dengan

data pengalaman dan gagasan dari para anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman untuk kemudian ditarik kesimpulan. Waktu penelitian ini berlangsung sejak medio Maret sampai November 2020. Target luaran hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk buku (agar mudah bisa diakses publik) dan rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. Hanya ada enam pertanyaan utama dalam kuisener *online* yang diajukan kepada responden, yaitu: hambatan apa yang paling pokok dalam Kegiatan Belajar Mengajar masa pandemi COVID-19? Solusi yang anda lakukan dalam mengatasi hambatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar masa pandemi COVID-19? Intervensi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar masa pandemi COVID-19? Harapan apa yang anda inginkan dari Pemerintah dalam Proses Belajar Mengajar di masa pandemi COVID-19? Bagaimana menurut pendapat anda dengan program *home visit* selama masa pandemik COVID-19? Bila anda setuju dengan *home visit*, *home visit* yang seperti apa yang anda kehendaki agar tidak menjadi klaster baru? Bila anda tidak setuju dengan *home visit*, apa alasannya yang paling utama?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman

Pada bagian ini diberberkan mengenai hasil evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar pada tingkat SMP di Kabupaten Sleman, khususnya analisis mengenai hambatan, solusi, intervensi kebijakan pemerintah, dan program kunjungan guru ke rumah (*home visit*). Sajian disampaikan secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami bersama.

1. Hambatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada tingkat SMP di Kabupaten Sleman

a. Aspek Sarana dan Prasarana

Data aspek hambatan sarana prasarana yang terjaring dalam instrumen ini adalah data tentang kepemilikan sarana berupa kepemilikan komputer, internet dan telepon genggam yang berasal dari guru SMP sebanyak 77 persen dari total 132 responden guru. Data ini menunjukkan bahwa hambatan berupa sarana pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring masih tinggi.

Aspek sarana dan prasarana merupakan aspek penentu untuk kesuksesan pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Kendala kepemilikan sarana atau media pembelajaran yang berada pada angka 77 persen di jenjang pendidikan SMP menjadi pertanda yang jelas akan ketidakberhasilan pembelajaran yang

mengandalkan sarana berupa komputer, telepon genggam, dan jaringan internet. Kendala ini dapat dikategorikan sebagai kendala utama dan pertama pada saat pembelajaran daring berlangsung.

Hal ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dilakukan, mengingat internet, komputer dan telepon genggam menjadi media utama yang digunakan saat pembelajaran daring. Untuk mewujudkan pembelajaran daring berbasis teknologi diperlukan kesiapan orang tua dan peserta didik dalam hal kepemilikan media dan sumber belajar, serta dukungan peranti teknologi berupa kestabilan jaringan internet, agar tujuan pembelajaran berjalan efektif.

Keluhan tentang sarana dan prasarana ini juga ditemukan dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menerima sekitar 213 pengaduan baik dari orang tua maupun peserta didik (Kompas, 14 April 2020), terbatasnya ketersediaan sarana teknologi, mestinya diantisipasi sejak awal oleh pemerintah. Perlu penelusuran lebih lanjut terkait dengan kendala kepemilikan sarana dan prasarana pembelajaran daring terkait dengan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik.

b. Aspek Pembelajaran

Data hambatan yang terkait dengan aspek pembelajaran yang ditemukan adalah keterkaitan dengan kegiatan menyampaikan kegiatan/materi dikemukakan oleh 41 orang guru atau 24 persen, keterbatasan literasi digital dikemukakan oleh 20 orang guru atau 12 persen, penyesuaian waktu dikemukakan oleh 10 orang atau 6 persen, metode penilaian hasil belajar dikemukakan oleh 5 orang atau 3 persen, sulit mengenal karakter peserta didik 3 orang atau 2 persen.

Hambatan utama dikemukakan terkait aspek pembelajaran adalah hambatan yang terkait dengan ketercapaian target

penyelesaian materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini ada ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dengan realita pembelajaran. Kebijakan pemerintah tetap mengharuskan untuk melakukan pembelajaran dengan menyelesaikan semua kompetensi dasar yang ada seperti pada kondisi normal, padahal keadaan tidak memungkinkan hal tersebut. Pemerintah juga tidak/belum menetapkan batasan tentang kompetensi dasar esensial yang menjadi tagihan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 19. Angka 41 persen hambatan kegiatan aspek pembelajaran menunjukkan adanya kegelisahan guru terkait dengan beban penyelesaian bahan ajar, atau materi pembelajaran.

Hal ini didukung oleh 46 persen adanya temuan tentang kurangnya kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi informasi atau keterbatasan kompetensi literasi digital yang dimiliki guru, maka dapat dimaknai bahwa target penyelesaian bahan ajar yang tidak diimbangi oleh ketidakmampuan memanfaatkan teknologi digital akan menyebabkan pembelajaran berbasis daring tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini juga menyebabkan guru harus menyesuaikan penyesuaian waktu pembelajaran dengan siswa. Hambatan lain yang ditemukan adalah guru mengalami kesulitan melakukan penilaian yang dikemukakan oleh 6 persen responden.

Kesulitan ini dapat dipahami, karena guru merasa ragu, apakah tugas-tugas pembelajaran daring dikerjakan sendiri oleh siswa atau dikerjakan oleh orang lain. Hal lain yang mengemuka adalah hambatan pada metode penilaian, hambatan ini diikuti oleh hambatan lainnya berupa kesulitan memahami karakter peserta didik. Pembelajaran daring yang mengandalkan hadirnya wajah lewat layar komputer maupun layar telepon genggam, hanya akan menghadirkan fisik secara virtual, dan untuk memahami karakter siswa sangatlah tidak mungkin, karena untuk memahami karakter siswa dibutuhkan interaksi nyata.

c. Aspek Peserta Didik

Data hambatan peserta didik ditemukan ada tiga jenis yakni : 1) Motivasi peserta didik yang menurun dalam proses pembelajaran diungkapkan oleh 13 guru atau 8 persen. Selain itu, kendala yang terkait aspek peserta didik berhubungan dengan iuran peserta didik tidak mengalami perubahan atau 50 persen dan sama datanya tentang interaksi peserta didik yang menurun juga 50 persen.

Era pandemi COVID-19 berdampak secara fisik maupun psikis terhadap peserta didik. Data penelitian ini memperlihatkan bahwa 18 persen motivasi peserta didik menurun untuk belajar. Hal ini tidak aneh, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama dalam menjalani pembelajaran. Interaksi antar sesama dapat menumbuhkan rasa kompetisi dalam diri peserta didik dalam pembelajaran luring.

d. Aspek Guru

Dari unsur guru nampaknya untuk *home visit* di satuan pendidikan SMP tidak ada yang mengisi, atau 100 persen guru tidak menginginkan adanya *home visit*, dengan berbagai alasan seperti: 1) takut akan dampak kesehatan yang ditimbulkan, 2) sulit untuk melakukan *home visit*/guru kunjung, 3) timbul masalah lain selain alasan kesehatan (1 persen saja).

Pada tingkat satuan pendidikan SMP, unsur guru tidak berkeinginan untuk melakukan *home visit*. Hal ini menunjukkan kesadaran guru.

e. Aspek Orang Tua

Data terkait dengan tanggapan orang tua diperoleh data tentang pendampingan oleh orang tua tidak maksimal hanya 4 persen, sulit melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik juga 4 persen saja. Kesulitan ini disebabkan karena

orangtua menganggap bahwa tanggungjawab pembelajaran adalah tanggungjawab pihak guru dan sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran, hal yang diharapkan adalah adanya bimbingan dari orangtua, tetapi data yang ada hanya 4 persen dari orang tua yang mendampingi anak yang belajar di SMP. Jumlah data tersebut sangatlah minim. Ada banyak faktor yang mungkin jadi alasan orang tua tidak mendampingi anak belajar daring. Pertama, anak usia SMP sudah bisa belajar mandiri, orang tua sibuk dengan pekerjaan sendiri, terlebih lagi pada orang tua yang kerjanya serabutan, sehingga sulit untuk memaksimalkan pembelajaran daring dengan pendampingan orang tua. Selain itu kesulitan berkomunikasi dengan orang tua menjadi faktor penguat lain yang menjadi penghalang memaksimalkan pembelajaran daring.

Data terkait dengan tanggapan orang tua untuk mendampingi anak belajar selama daring juga dipersulit dengan sulitnya orang tua diajak berkomunikasi dalam hal pembelajaran daring walaupun jumlahnya hanya 4 persen. Sulitnya berkomunikasi dengan orang tua terjadi mungkin karena pemahaman orang tua, bahwa saat pandemi COVID-19 sebaiknya tidak perlu melakukan pembelajaran dengan serius.

2. Deskripsi Data Solusi yang Dilakukan Sekolah

Ada tiga jenis data yang terungkap mengenai solusi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah:

a. Solusi Aspek Pembelajaran

Hambatan pada aspek pembelajaran dengan rincian data a) menyesuaikan materi/kegiatan dijawab oleh 72 guru atau 42 persen; b) melakukan *home visit*/guru kunjung ada 9 orang guru yang mengatakannya atau 5 persen; c) penyesuaian waktu diungkapkan oleh 17 orang guru atau 10 persen; d) ingin ada tatap muka dengan protokol kesehatan dikatakan oleh 5 guru

atau 5 persen; e) peningkatan literasi digital juga diungkapkan oleh 9 guru atau 5 persen.

Hambatan-hambatan pembelajaran yang ditemukan, diatasi oleh guru sendiri oleh guru masing-masing mata pelajaran. Sebanyak 42 persen guru mengambil kebijakan sendiri untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menyesuaikan materi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Tidak tersedianya panduan yang baku terkait dengan panduan pembelajaran menyebabkan guru mengambil inisiatif kebijakan sendiri.

Guru juga cenderung menyelesaikan materi pembelajaran sesuai target kurikulum, walau harus memberikan beban tugas kepada peserta didik. Belum adanya kompetensi dasar esensial yang harus diajarkan pada peserta didik menyebabkan banyak guru yang mengejar target untuk menyelesaikan materi bahan ajar.

Solusi penyelesaian masalah pada aspek pelaksanaan pembelajaran yang diinginkan guru adalah melakukan *home visit*. Keinginan *home visit* dapat menjadi indikator bahwa guru ingin melakukan pembelajaran tatap muka; meski dalam kelompok kecil siswa. Tetapi solusi lain yang untuk mengatasi aspek pembelajaran adalah adanya harapan akan penyesuaian waktu pembelajaran diungkapkan oleh 17 orang guru atau 10 persen. Sedangkan guru yang mengharapkan penyelesaian masalah aspek pembelajaran dengan tatap muka diungkapkan oleh 5 persen guru; tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Solusi lain yang diinginkan untuk mengatasi aspek pembelajaran adalah adanya upaya peningkatan literasi digital untuk guru juga diungkapkan oleh 5 persen. Solusi penyelesaian peningkatan literasi digital ini diharapkan oleh guru yang masih kurang penguasaan aplikasi teknologi pembelajaran.

b. Solusi Bantuan Internet untuk Peserta Didik

Solusi yang ditawarkan oleh sekolah agar pembelajaran tetap berlangsung adalah memberikan bantuan pulsa/kuota internet pada peserta didik yang dapat digunakan oleh peserta didik. Bantuan ini diberikan sebelum peserta didik mendapatkan bantuan kuota internet oleh pemerintah. Ada 20 persen sekolah yang memberikan bantuan kuota data internet kepada peserta didik yang digunakan untuk pembelajaran.

Tawaran solusi ini menunjukkan kepedulian sekolah terhadap proses pelaksanaan pembelajaran daring sebelum adanya bantuan pemerintah, akan tetapi ini juga bukanlah hal yang dapat dilakukan terus-menerus, mengingat bantuan pulsa/kuota Internet ini terbatas sekali, selain itu sekolah juga tidak memiliki cadangan dana untuk senantiasa melakukan subsidi pulsa/kuota Internet kepada peserta didik, karena peserta didik tidak membayar iuran sekolah, dana BOS yang diharapkan juga cairnya hanya tiap tiga bulan sekali.

c. Solusi Aspek Orang Tua dan Peserta Didik

Data terkait solusi permasalahan pembelajaran yang terkait dengan orangtua dan peserta didik ditemukan sekolah yang melakukan komunikasi personal dengan orangtua/peserta didik sebanyak 20 persen, sementara sekolah yang memberikan motivasi pada orangtua/peserta didik hanya 5 persen. Solusi menjalin komunikasi dengan orangtua menunjukkan kepedulian pihak sekolah, atau kepedulian guru akan pentingnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bentuk kepedulian lain adalah adanya upaya untuk memberikan motivasi kepada orang tua maupun kepada peserta didik, yang secara fisik maupun psikis mengalami penurunan motivasi belajar.

3. Intervensi yang Dilakukan Pemerintah

Dalam upaya tetap melaksanakan pembelajaran daring pemerintah melakukan intervensi terhadap sekolah dengan beberapa kegiatan yang berwujud kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan belajar jarak jauh diungkapkan oleh 43 persen guru, 2) Bantuan dana diungkapkan oleh 21 guru atau sebanyak 12 persen 3) Pemantauan dan evaluasi ditemukan 9 persen; 4) Pembinaan terhadap guru sebanyak 20 persen; 5) *home visit* diminta oleh 0 persen guru.

Data tentang intervensi pemerintah menunjukkan perhatian pemerintah tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring diungkapkan 43 persen guru. Hal ini menunjukkan bahwa guru paham bahwa pembelajaran daring berlaku umum untuk seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Intervensi lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian pulsa untuk guru dan peserta didik.

4. Harapan Responden di Era Pandemi COVID-19

Harapan para guru dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini adalah sebagai berikut: 1) adanya izin untuk tatap muka dengan protokol kesehatan dikemukakan oleh 25 persen responden, 2) adanya kebijakan dan sosialisasi belajar dari rumah diminta oleh 19 responden 3) adanya penyesuaian materi atau kegiatan pembelajaran diharapkan oleh 4 persen guru. Sedangkan harapan terhadap bantuan sarana dan prasarana diungkapkan oleh 47 responden, dan pembinaan guru 2 persen saja.

Harapan para guru dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini adalah sebagai berikut: 1) adanya izin untuk tatap muka dengan protokol kesehatan dikemukakan oleh 25 persen responden. Harapan atas izin tatap muka ini diungkapkan oleh guru maupun orang tua 2) adanya kebijakan dan sosialisasi belajar dari rumah diminta oleh 19 responden, harapan ini dari segi persentase

sangatlah kecil, sehingga tidak perlu mendapat tanggapan dari pemerintah. 3) Guru juga mengharapkan ada penyesuaian materi, hal ini karena guru merasa “dipaksa” untuk menyelesaikan semua kompetensi dasar sementara kenyataan situasi tidak memungkinkan. Ada 47 persen guru mengharapkan adanya bantuan sarana dan prasarana dalam menjalankan pembelajaran secara daring. Harapan-harapan ini dapat dimaknai sebagai bentuk kejenuhan guru dan peserta didik dalam menjalani pembelajaran daring selama pandemi COVID-19.

5. Tanggapan dan Alasan Persetujuan *Home Visit*

Tanggapan tentang *home visit* diberikan oleh guru dan peserta didik. Dari data yang ada guru SMP yang menyetujui program *home visit* hanya 4 persen, tetapi peserta didik yang ingin *home visit* 53 persen. Harapan terhadap *home visit* dibarengi dengan sejumlah alasan. Guru yang mengharapkan adanya *home visit* dilakukan dengan protokol kesehatan ada 26 persen; sedangkan yang berharap jika *home visit* dilakukan sebaiknya pada daerah zona hijau. Selain itu *home visit* yang diharapkan oleh peserta didik dilakukan dengan model les privat diminta oleh 12 persen, *home visit* dengan kelompok kecil 6 persen serta *home visit* untuk peserta didik tertentu saja diminta oleh 13 persen peserta didik.

Persetujuan adanya *home visit* oleh guru dan peserta didik menunjukkan adanya kejenuhan guru dan peserta didik dalam mengikut pembelajaran daring. Walaupun angka persentasenya dari persetujuan guru hanya 4 persen. Persetujuan akan adanya *home visit* oleh peserta didik ada 53 persen. Jumlah tersebut menunjukkan tingkat kejenuhan peserta didik yang sangat tinggi terhadap pembelajaran daring. Meski demikian guru yang menyetujui *home visit* dengan persyaratan dilakukan di daerah zona hijau, sementara siswa tidak mengungkapkan alasannya, yang mengherankan adalah untuk penguasaan materi pembelajaran yang ditarget mereka tetap mengharapkan adanya *home visit*. Hal lain yang diungkapkan oleh

peserta didik jika tidak memungkinkan adanya *home visit*, mereka menginginkan adanya les privat yang diberikan oleh guru sebanyak 12 persen. *Home visit* dengan kelompok kecil 6 persen serta *home visit* untuk peserta didik tertentu saja diminta oleh 13 persen peserta didik.

6. Tanggapan dan Alasan tidak Setuju *Home Visit*

Selain tanggapan terhadap adanya *home visit*, ada juga tanggapan tentang tidak setuju adanya *home visit*. Berikut data ketidaksetujuan akan *home visit* dengan alasan efektivitas waktu dan biaya diungkapkan oleh 5 persen, guru, ketidaksetujuan karena risiko kesehatan diungkapkan oleh 33 persen guru, sementara yang mengatakan dengan alasan kurangnya Sumber Daya Manusia sebanyak 5 persen, dan yang terakhir karena sudah ada daring hanya 1 persen.

Ketidaksetujuan akan adanya *home visit* ini diungkapkan hanya oleh guru. Beberapa alasan terhadap ketidaksetujuan akan *home visit* adalah dengan alasan efektivitas waktu dan biaya diungkapkan oleh 5 persen guru. Ketidaksetujuan karena risiko kesehatan diungkapkan oleh 33 persen guru, alasan ini sangat wajar dikemukakan oleh guru yang peduli akan pencegahan penyebaran COVID-19. Alasan lain yang dikemukakan oleh guru terhadap ketidaksetujuannya terhadap *home visit* adalah kurangnya Sumber Daya Manusia sebanyak 5 persen, dan yang terakhir karena sudah ada daring hanya 1 persen.

Ada dua hal utama yang mengemuka dalam penelitian tentang pembelajaran daring di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu: 1) Kendala pembelajaran daring. 2) Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran daring.

Dari dua hal utama tersebut; hal yang paling penting yang menjadi simpulan penelitian khususnya pada pembelajaran di SMP ini adalah:

- a. Kendala pembelajaran terutama pada sarana dan prasarana daring berupa kepemilikan telpon genggam, komputer, jaringan internet, ketidakmampuan guru mengaplikasikan *platform* pembelajaran jarak jauh. Hal ini berimplikasi pada munculnya usulan pembinaan terhadap guru.
- b. Kendala lain adalah komunikasi dan dukungan orang tua terhadap pembelajaran daring yang kurang. Ketuntasan materi pembelajaran menjadi kendala tersendiri terhadap pembelajaran daring. Kendala utama adalah keharusan menuntaskan semua kompetensi dasar.
- c. Pembelajaran daring tetap dilakukan dengan baik.
- d. Peserta didik menginginkan adanya pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Guru menyetujui pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan dan di daerah hijau.
- e. Guru menghindari pembelajaran dengan tatap muka, tetapi di lain pihak ada yang setuju *home visit*.
- f. Peserta didik yang menginginkan *home visit* lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak setuju. Tetapi jika tidak boleh *home visit* peserta didik mengharapkan adanya les privat.
- g. Harapan guru ada kebijakan tentang adanya kompetensi dasar esensial yang diterapkan ketika pembelajaran dalam era pandemi COVID-19.
- h. Perlu adanya pemantauan dalam proses pembelajaran daring, dan utama adalah adanya panduan evaluasi yang secara khusus digunakan ketika pembelajaran berlangsung.

B. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Sleman

Pada bagian ini dibebaskan mengenai hasil evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar pada tingkat SD di Kabupaten Sleman, khususnya analisis mengenai hambatan, solusi, intervensi kebijakan pemerintah, dan program kunjungan guru ke rumah (*home visit*). Sajian disampaikan secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami bersama.

1. Hambatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada tingkat SD di Kabupaten Sleman

Survei dalam penelitian ini dilakukan pada 200 responden yang terdiri dari para guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman. Guru yang menjadi responden terdiri dari guru Sekolah Dasar Negeri maupun Guru Sekolah Dasar Swasta. Makna hambatan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar hambat yang mempunyai arti: *h*alangan; rintangan; *h* kayu penghalang (pengempang jalan dan sebagainya)¹. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan hambatan adalah rintangan yang dialami oleh para guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berubah disebabkan situasi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman. Proses pembelajaran biasanya dilakukan dengan tatap muka antara guru dan siswa di tempat dan jam yang sudah ditentukan. Pemerintah memberikan kebijakan untuk menetapkan proses pembelajaran melalui daring selama masa yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Situasi pandemik tentunya memaksa para guru dan siswa didik untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran di rumah tanpa mengurangi kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Tentunya situasi tersebut menimbulkan situasi yang

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hambatan>

tidak diperkirakan sebelumnya. Menjadi wajar terdapat beberapa hambatan atau dapat dimaknai rintangan dalam menjalankan proses pembelajaran tidak melalui tatap muka tersebut. Pengungkapan hambatan ini didasarkan pada data yang ada, ditujukan supaya dapat menjadi data yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi dan usulan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan.

Data menunjukkan bahwa dari 200 guru tersebut memberikan jawaban yang beragam. Jawaban-jawaban tersebut kemudian dikelompokkan menjadi jawaban dengan tujuan supaya dapat membantu dalam penganalisisan data. Keberagaman jawaban tersebut dapat dipahami disebabkan bahwa pertanyaan yang diberikan memang memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban di luar pilihan jawaban yang disediakan.

Data Kuantitatif

Berdasarkan hal tersebut pertanyaan mengenai hambatan dalam proses pembelajaran Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok hambatan yaitu:

- a. Aspek sarana prasarana.
- b. Aspek pembelajaran, dapat dibagi lagi menjadi beberapa aspek, yaitu: menyampaikan kegiatan, keterbatasan literasi digital, penyesuaian waktu, penilaian hasil belajar dan sulit menganalisis karakter siswa.
- c. Aspek siswa, dapat dibagi lagi motivasi siswa menurun, iuran siswa berkurang dan interaksi siswa menurun.
- d. Aspek guru dapat didetailkan dengan terdapatnya kesulitan dalam melakukan *home visit*.

Dari kategori yang dibuat tersebut dalam jawaban-jawaban yang diberikan mengenai hambatan dalam proses pembelajaran dalam masa pandemik yang dialami oleh guru Sekolah Dasar di Kabupaten

Sleman dapat dihasilkan data kuantitatif yang dapat didiskripsikan seperti di bawah ini:

- a. Hambatan proses pembelajaran dari aspek sarana prasarana dijawab oleh 111 guru dari 200 responden, atau sekitar 56 persen responden menjawab hambatan dari aspek sarana prasarana sebagai hambatan proses pembelajaran. Lebih dari separuh responden menjawab demikian. Hambatan tersebut menjadi situasi yang wajar disebabkan proses belajar tidak melalui tatap muka membutuhkan media komputer atau *handphone* dengan kuota yang cukup sebagai kunci proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Hambatan proses pembelajaran dari aspek pembelajaran, dijawab sebagai hambatan oleh 124 responden dari 200 responden atau sekitar 62 persen. Hambatan dari aspek pembelajaran tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa aspek hambatan, yaitu hambatan dalam menyampaikan kegiatan dijawab oleh 85 dari 200 responden atau 43 persen, keterbatasan literasi digital dijawab oleh 14 dari 200 responden atau 7 persen, penyesuaian waktu dijawab oleh 12 dari 200 responden atau 6 persen, penilaian hasil belajar dijawab oleh 5 dari 200 responden atau 3 persen dan sulit mengenal karakter siswa dijawab oleh 8 dari 200 responden atau 4 persen.
- c. Hambatan proses pembelajaran dari aspek siswa dijawab oleh 2 dari 200 responden atau 1 persen. Jawaban dari aspek siswa dapat di dapat dibagi lagi motivasi siswa menurun dijawab oleh 1 dari 200 responden atau 1 persen, iuran siswa berkurang tidak ada yang menjawab dan interaksi siswa menurun dijawab oleh 1 dari 124 responden atau 1 persen.
- d. Hambatan proses pembelajaran dari aspek guru dijawab oleh 1 dari 200 responden atau 1 persen dapat didetailkan dengan terdapatnya kesulitan dalam melakukan *homevisit*.

- e. Dari data yang didapatkan dan diuraikan diatas maka dapat dianalisis bahwa hambatan terbesar dari hambatan yang dialami oleh para guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah aspek sarana prasarana dijawab oleh 111 guru dari 200 responden, atau sekitar 56 persen responden dan hambatan proses pembelajaran dari aspek pembelajaran, dijawab sebagai hambatan oleh 124 responden dari 200 responden atau sekitar 62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan yang dihadapi para guru adalah:
- f. Hambatan proses pembelajaran dari aspek pembelajaran, yang secara detailnya hambatan tersebut dapat didetailkan menjadi hambatan dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran, keterbatasan literasi digital, penyesuaian waktu, penilaian hasil belajar, sulit mengenal karakter.
- g. Hambatan sarana prasarana yang secara konkrit hambatan tersebut menunjukkan tersedianya *handphone* dan komputer beserta kuota yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran secara daring.

Terdapat identifikasi hambatan proses pembelajaran dalam masa pandemi di tingkat Sekolah Dasar yaitu hambatan dalam proses pembelajaran dan hambatan dalam sarana prasarana. Hambatan ini menjadi dasar dari Dinas Pendidikan untuk program yang berisi aktivitas dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Deskripsi Data Solusi yang dilakukan Sekolah

Solusi merupakan kata yang dapat diberikan pengertian: penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya); jalan keluar:-- *persoalan pembangunan desa akan segera diseminarkan*². Dari pengertian di atas dapat dikaji bahwa solusi jalan keluar atau

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Solusi>, diakses tanggal 14 November 2020

penyelesaian, pemecahan terhadap suatu masalah tertentu. Bila dikaitkan dengan tulisan ini solusi adalah penyelesaian atas suatu hambatan yang sudah disajikan terlebih dahulu datanya. Lebih lanjut solusi sebagai pemecahan suatu masalah didasarkan pada data data yang dikumpulkan tentang hambatan hambatan yang dialami oleh para guru dalam menjalani proses pembelajaran. Artinya data solusi yang didapatkan dari para guru disajikan dalam rangka menjawab hambatan hambatan yang sudah disajikan sebelumnya.

Data Kuantitatif

Dalam mengidentifikasi solusi maka terdapat beberapa kategori yang digunakan. Pembagian beberapa kategori ini ditujukan agar lebih mempermudah dalam menyajikan data dan menganalisis data yang ada. Kategori-kategori yang digunakan dalam penyajian data tentang solusi adalah:

- a. Solusi dalam mengatasi hambatan proses pembelajaran. Poin ini dibagi dalam 5 aspek yaitu: Menyesuaikan materi kegiatan, melakukan *home visit*/guru kunjung, penyesuaian waktu, tatap muka dengan protokol, peningkatan literasi digital.
- b. Solusi dalam hambatan internet dan BOS.
- c. Solusi dalam hal hambatan yang datang dari orang tua dan siswa, solusinya dikelompokkan dalam upaya melakukan komunikasi personal dengan orang tua/siswa dan memberikan motivasi ada orang tua/siswa.

Penggunaan kategori tersebut diselaraskan dengan hambatan hambatan yang sudah disajikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan solusi yang terbaik dalam upaya memberikan usulan upaya penyelesaian mengatasi hambatan hambatan yang dialami oleh khususnya para guru dan siswa tentunya dalam proses pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan kategori tersebut, maka solusi-solusi yang didapatkan dari pendapat para guru sebanyak 200 guru Sekolah Dasar Kabupaten Sleman sebagai responden menghasilkan data sebagai berikut:

- a. Hambatan dari aspek pembelajaran yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di masa pandemik ini diberikan usulan solusi oleh 186 dari 200 responden atau sekitar 93 persen. Solusi sebagai upaya penyelesaian hambatan dari aspek pembelajaran dibagi dalam 5 aspek yaitu: menyesuaikan materi kegiatan dijawab oleh 125 dari 200 responden atau sekitar 63 persen. Solusi melakukan *home visit*/guru kunjung dijawab 21 dari 200 responden atau sekitar 11 persen, penyesuaian waktu dijawab 31 dari 200 responden atau sekitar 16 persen, tatap muka dengan protokol 8 dari 200 responden atau sekitar 4 persen, peningkatan literasi digital dijawab 1 dari 200 responden atau sekitar 1 persen.
- b. Hambatan dari aspek sarana prasarana yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di masa pandemik ini diberikan usulan solusi diberikannya bantuan internet dari dana BOS. Usulan ini diberikan dengan oleh 10 dari 200 responden atau sekitar 5 persen.
- c. Hambatan yang datang dari orang tua dan siswa, solusinya dikelompokkan dalam upaya melakukan komunikasi personal dengan orang tua/siswa dan memberikan motivasi ada orang tua/siswa. Solusi untuk kategori hambatan yang datang dari siswa diberikan usulan oleh 36 dari 200 responden, atau sekitar 18 persen. Secara detail solusi hambatan aspek orang tua dan siswa diberikan solusi meningkatkan komunikasi personal guru dengan siswa dan orang tuanya sebanyak 28 responden dari 200 rsponden (14 persen) dan usulan memberikan motivasi pada ortu dan siswa dijawab oleh oleh 8 responden dari 200 responden atau sekitar 4 persen.

Menjadi catatan dalam poin ini maka terdapat 8 guru Sekolah Dasar yang menjadi responden tidak memberikan jawaban.

Analisis Kualitatif

Dari data tentang solusi yang diharapkan dapat menangani persoalan hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran dalam masa pandemi dapat dikaji bahwa masing-masing solusi mempunyai makna tersendiri dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang paling ideal di dalam situasi yang tidak normal. Artinya bahwa solusi yang ditawarkan secara kuantitatif dan kualitatif sangat bermakna dalam proses pembelajaran yang diharapkan dari perspektif guru. Data persentasi responden yang menjawab menunjukkan kemampuan mereka dalam mengungkapkan solusi yang mungkin dapat diusulkan dalam upaya pemecahan hambatan tersebut, tetapi dari aspek substansi usulan maka persentase itu tidak selalu menjadi tolak ukur kepentingan usulan solusi tersebut. Tingkat persentase dipakai dalam upaya melihat prioritas yang paling banyak dibutuhkan para guru dalam melakukan proses pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka usulan solusi yang diberikan oleh responden dengan dibantu pengkategorisasian jawaban sudah sinkron dengan hambatan yang ada.

- a. Hambatan dari aspek pembelajaran diberikan usulan solusi menyesuaikan materi, *home visit*/guru kunjung penyesuaian waktu, peningkatan literasi digital.
- b. Hambatan dari aspek sarana prasarana yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini diberikan usulan solusi diberikannya bantuan internet dari dana BOS.
- c. Hambatan yang datang dari orang tua dan siswa, solusinya dikelompokkan dalam upaya melakukan komunikasi personal dengan orang tua/siswa dan memberikan motivasi ada orang tua/siswa.

Dalam skala prioritas kebijakan dapat dikaji bahwa hambatan terbesar adalah hambatan dari aspek pembelajaran yang diberikan usulan untuk melakukan penyesuaian materi ajar agar dapat disesuaikan dengan media yang ada. Tugas guru antara lain bahwa perubahan media pembelajaran tidak boleh mengurangi kualitas pembelajaran.

Usulan solusi dari hambatan aspek pembelajaran ini diberikan oleh 93 persen responden dan usulan responden adalah menyesuaikan diri baik secara materi maupun non materi dengan situasi yang tidak normal ini. Peran Dinas Pendidikan untuk solusi yang ditawarkan ini adalah dengan memberikan fasilitas baik pelatihan dan sebagainya yang berkaitan dengan pembinaan dan penjaminan Sumber Daya Manusia baik untuk guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.

Usulan solusi untuk hambatan sarana prasarana yaitu dengan bantuan internet, pada saat tulisan ini dibuat, bantuan internet dari pemerintah sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh tenaga pendidik.

Usulan solusi terhadap permasalahan hambatan orang tua dan murid dapat dilakukan dengan mempermudah komunikasi antara orang tua dan guru. Peran Dinas Pendidikan adalah melakukan imbauan dan pemantauan terhadap berjalannya komunikasi antara siswa dan guru walaupun secara daring.

3. Intervensi yang Dilakukan Pemerintah

Intervensi merupakan kata yang dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna³ *campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya)*. Dalam bahasa Inggris dikenal kata *intervention* yang mempunyai makna: *intervensi; campur tangan; campur tangannya*⁴.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi>, diakses tanggal 15 November 2020 .

⁴ <https://rrr.sederet.com/translate.php>, diakses tanggal 15 November 2020

Hal tersebut mengandung dan mempunyai arti bahwa intervensi adalah sama dengan *intervention* yang ada dalam bahasa Inggris. Makna dari intervensi atau *intervention* tersebut adalah campur tangan. Dalam bagian ini kata intervensi dimaknai bagaimana campur tangan negara melalui Dinas Pendidikan dalam mengatasi berbagai persoalan dan hambatan dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman yang dialami oleh para guru selama masa pandemi.

Data intervensi atau campur tangan pemerintah melalui Dinas Pendidikan disajikan beserta bentuk intervensi atau campur tangan tersebut. Data menunjukkan bahwa:

- a. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sudah melakukan intervensi yang dijawab 158 responden dari 200 responden guru Sekolah Dasar (79 persen). Bentuk campur tangan Dinas Pendidikan yaitu Program BDR dijawab oleh 91 responden (46 persen), bantuan dana dijawab oleh 22 responden (11 persen), pemantauan dan evaluasi dijawab oleh 16 responden (8 persen), pembinaan guru dijawab oleh 26 responden (13 persen), program *home visit* dijawab oleh 3 responden (3 persen).
- b. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan belum melakukan intervensi, yang dijawab oleh 17 Responden (9 persen)
- c. Terdapat 37 responden (19 persen) yang tidak mengisi, bagian pertanyaan ini.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden guru Sekolah Dasar 79 persen, menjawab bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan melalui dinas pendidikan dengan berbagai bentuk kebijakan yang berkaitan dengan Program BDR, pembinaan guru, bantuan dana, pemantauan dan evaluasi, dan *home visit*. Bila dilihat dari bentuk kebijakan pemerintah maka program belajar di rumah merupakan program yang sebenarnya *inheren* dalam situasi pandemi ini. Bentuk kebijakan pemerintah yang lain yang sudah

dilaksanakan adalah program pembinaan guru dan dana. Data menunjukkan bahwa pemerintah sudah menunjukkan tugasnya dalam melakukan intervensi dalam bidang pembinaan guru (13 persen) dan penyediaan bantuan dana 11 persen. Intervensi pemerintah dalam bentuk dana pastinya akan lebih dirasakan pada saat tulisan ini dibuat. Yang harus diperhatikan adalah intervensi pemerintah dalam bentuk pembinaan guru masih di angka 13 persen, angka yang cukup kecil, karena pembinaan SDM merupakan kewajiban dari negara untuk memfasilitasinya. Dapat diintegrasikan bahwa peningkatan SDM dari aspek kualitas apalagi dalam masa pandemi ini berjalan didasarkan pada inisiatif pribadi dan inisiatif sekolah masing-masing.

Data juga menunjukkan angka yang cukup menarik untuk dicermati yaitu terdapat 17 responden dari 200 responden (9 persen) yang menjawab belum adanya intervensi dari Dinas Pendidikan dan 37 responden dari 200 tidak mengisi (19 persen). Jawaban belum ada dan tidak mengisi jika diartikan sebagai jawaban bahwa mereka memang belum merasakan kehadiran Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar dalam masa pandemi ini membuktikan tidak meratanya kebijakan pemerintah yang setidaknya sudah dilakukan dapat dirasakan oleh para guru. Jika digabungkan maka terdapat 28 persen guru belum merasakan kehadiran negara melalui Dinas Pendidikan.

Dari situasi tersebut usulan yang dapat diberikan analisis dan usulan sebagai berikut:

Pemerintah telah melakukan intervensi dan campur tangan terhadap proses pembelajaran di Sekolah Dasar Kabupaten Sleman dari perspektif guru, tetapi belum dapat secara merata dirasakan. Sekali lagi bahwa Sekolah Dasar dalam hal ini adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta.

- a. Pembinaan SDM yaitu guru terus dilakukan dan dimonitor kemerataannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan hanya 26 guru (13 persen) yang menjawab sudah mendapatkan intervensi pemerintah dalam pembinaan. Pemberian pembinaan dan peningkatan kualitas guru baik yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri maupun Sekolah Dasar Swasta merupakan langkah yang harus dilakukan.
- b. Dinas Pendidikan terus melakukan monitoring dan mengawal kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan terutama dalam upaya mengatasi situasi pandemi ini. Monitoring sebaiknya dilakukan langsung ke pihak-pihak sekolahnya melalui daring dalam berbagai media.

4. Harapan Responden di Era Pandemi COVID-19

Harapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti⁵: sesuatu yang (dapat) diharapkan: *ia mempunyai ~ besar dapat memenangi pertandingan itu*, *n* keinginan supaya menjadi kenyataan: *~ku agar ia kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa*, *n* orang yang diharapkan atau dipercaya: *pemuda ~ bangsa*. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan harapan adalah suatu keinginan kepada pemerintah yang diwakili Dinas Pendidikan dari para guru Sekolah Dasar Kabupaten Sleman. Data yang berkaitan dengan harapan ini dikategorikan menjadi beberapa kategori jawaban yaitu:

- a. Harapan adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bentuk perizinan melaksanakan KBM dengan protokol, kebijakan sosialisasi program Belajar dari Rumah, bantuan sarana prasarana, pembinaan guru dan izin melakukan guru kunjung.
- b. Harapan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sarana prasarana.
- c. Harapan adanya kebijakan pemerintah dalam pembinaan guru.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harapan>, diakses 15 November 2020

Harapan adanya kebijakan pemerintah dalam proses pembelajaran dalam masa pandemi dijawab oleh 114 responden dari 200 responden (57 persen). Kebijakan pemerintah dalam bentuk perizinan dalam melaksanakan KBM dengan protokol diharapkan oleh 51 responden dari 200 responden (26 persen), kebijakan sosialisasi program Belajar dari rumah diharapkan oleh 21 responden dari 200 responden (11 persen), penyesuaian materi kegiatan diharapkan oleh 38 responden dari 200 responden (19 persen) izin melakukan guru kunjung diharapkan oleh 4 responden dari 200 responden (2 persen).

Harapan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sarana prasarana diharapkan oleh 66 responden (33 persen). Harapan adanya kebijakan pemerintah dalam pembinaan guru dijawab oleh 6 orang atau (3 persen).

Analisis yang dapat dilakukan bahwa seberapa besar responden mengharapkan kebijakan pemerintah dalam hal dalam masa pandemi. Pertama, di bidang sarana prasarana, walaupun data menunjukkan 33 persen tetapi bahwa bantuan sarana prasarana tersebut merupakan bagian dari kebijakan, artinya kebijakan pemerintah bisa terdiri dari izin sampai pembinaan guru. Kedua, setelah itu para guru mengharapkan kebijakan pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Ketiga, kemudian penyesuaian materi karena penyampaian yang berbeda perlu terdapat kebijakan dan pembinaan guru. Pembinaan guru dapat disinkronkan atau berisi bagaimana cara penyampaian materi pada proses *online* ini. Sampai tulisan dibuat maka harapan pertama para guru kepada pemerintah untuk kebijakan bantuan sarana prasarana sudah sebagian besar terpenuhi dengan adanya bantuan kuota/pulsa bagi para guru. Optimalisasi dan keberlangsungan kebijakan bantuan sarana prasarana sangat diharapkan karena sarana prasarana merupakan elemen yang vital dalam pembelajaran *online* ini. Harapan kedua dan ketiga para guru pada kebijakan pemerintah

merupakan representasi kehendak dari para guru untuk dapat memberikan substansi yang sama walaupun dengan media *online*.

5. Kebijakan *Home Visit* di Tingkat SD

Home visit (istilah dalam bahasa Inggris) diterjemahkan sebagai kunjungan rumah. *Home visit* dapat diartikan macam-macam sesuai konteks dalam pemakaiannya. Dalam Ilmu kedokteran, maka *home visit* menunjuk pada kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien karena keadaan yang mendesak. Dalam pendidikan secara umum, maka *home visit* diartikan sebagai suatu kegiatan proses pembelajaran di mana guru datang ke rumah siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar substansi pembeajaran dapat diberikan dengan lebih mendalam, atau kedatangan guru tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang tidak tampak ketika bertatap muka dengan para murid. Tujuannya agar proses pembelajaran mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Data secara kuantitatif menunjukkan dari 200 responden guru Sekolah Dasar; maka 96 responden (48 persen) menjawab menyetujui adanya kebijakan *home visit* sedangkan yang tidak setuju ada 86 responden (43 persen). Terdapat 18 responden (9 persen) yang menjawab tidak tahu.

Responden yang setuju *home visit* (48 persen), mensyaratkan bahwa *home visit* dapat dilakukan asal:

- a. *Home visit* dilakukan sesuai protokol kesehatan dan dilakukan khusus untuk daerah zona hijau (25 persen).
- b. *Home visit* dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan siswa (72 persen). Siswa akan mendapatkan substansi lebih baik, dengan syarat dilakukan secara privat, untuk siswa tertentu dan dilakukan dalam kelompok kecil.
- c. *Home visit* dilakukan dengan syarat bahwa dilakukan guru tertentu dan adanya penyesuaian materi (2 persen)

- d. Terdapat responden yang tidak memberikan alasan walaupun menyetujui adanya *home visit* sebanyak 1 persen.

Data dari responden yang menyetujui adanya *home visit* tidak lebih dari 50 persen. Persetujuan tersebutpun disertai syarat-syarat yang terkait dengan persyaratan, tidak semua siswa diberikan hak untuk dikunjungi, persyaratan lain adalah terjaganya protokol kesehatan, dengan persyaratan hanya untuk daerah zona hijau, dan persyaratan *home visit* ini hanya berlaku bagi materi dan guru tertentu.

Responden yang tidak setuju *home visit* 86 responden (43 persen) dan jawaban tidak tahu sebanyak 18 responden (9 persen). Terdapat 86 responden dari (43 persen) responden menyatakan tidak setuju akan adanya *home visit*. Pendapat tidak setuju akan adanya *home visit* tersebut didasari oleh alasan:

- a. Alasan risiko kesehatan dijawab oleh 75 responden atau 38 persen
- b. Alasan efektifitas waktu dan biaya dijawab oleh 15 responden atau 8 persen
- c. Tidak memberikan alasan dijawab oleh 2 responden atau 1 persen.

Dari data kuantitatif di atas jika responden yang menjawab tidak setuju (43 persen) dan pendapat yang menjawab tidak tahu (9 persen), dijadikan satu maka terdapat 52 persen yang tidak sepakat berkaitan dengan adanya *home visit*. Alasan terbanyak dari sikap tidak setuju tersebut adalah adanya risiko kesehatan. Alasan kesehatan menjadi sangat dipahami pada pembelajaran model *home visit*. Hal ini disebabkan bahwa virus COVID-19 merupakan virus baru yang belum begitu banyak pendapat yang dapat dijadikan acuan. Sehingga pandangan bahwa virus ini berbahaya menjadi pandangan yang harus setidaknya menjadi pedoman demi keselamatan siswa dan guru juga masyarakat.

Usulan dari hasil kajian data primer dalam bentuk data statistik, maka dengan analisis kualitatif dapat dikaji bahwa terdapat 3 jenis jawaban responden, setuju, tidak setuju dan tidak tahu. 2 pendapat yang menyetujui dan tidak menyetujui yang secara kuantitatif/persentase hampir sama. Di samping itu terdapat responden yang tidak tahu. Responden yang tidak tahu ini bila diartikan responden tersebut lebih condong ke penyerahan keputusan kepada pengambil kebijakan dapat diartikan 9 persen responden tidak dapat dianggap setuju. Maka sekali lagi ada 52 persen yang tidak sepakat atau lebih dari 50 persen tidak sepakat karena alasan kesehatan. Jikapun mau dilihat dari perspektif mereka yang setuju maka persyaratan protokol kesehatan yang ketat dan persyaratan jumlah anak dan kapasitas guru menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan matang.

C. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada Satuan Pendidikan TK di Kabupaten Sleman

Pada bagian ini dibeberkan mengenai hasil evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar pada tingkat TK di Kabupaten Sleman, khususnya analisis mengenai hambatan, solusi, intervensi kebijakan pemerintah, dan program kunjungan guru ke rumah (*home visit*). Sajian disampaikan secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami bersama.

1. Hambatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 pada tingkat TK di Kabupaten Sleman

Ditinjau dari aspek jenis hambatan paling pokok dalam Kegiatan Belajar Mengajar di masa pandemi COVID-19 ada lima aspek yaitu: hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana berupa sinyal Internet dan adanya orangtua yang tidak memiliki *handphone*, sehingga informasi yang disampaikan guru TK kepada para peserta didiknya ketika melaksanakan program Belajar dari Rumah menjadi terganggu. Kendala ini paling dominan karena persentasenya mencapai 132 pendapat (66 persen). Disusul kendala yang berhubungan yang dialami oleh guru dalam aspek pembelajaran dialami oleh 83 pendapat (42 persen). Di mana mereka mengalami kesulitan dalam menyampaikan kegiatan atau materi ajar/belajar (sebanyak 65 pendapat atau 33 persen), lainnya kendala dalam hal keterbatasan dalam melakukan literasi digital, adaptasi dalam menyesuaikan waktu, termasuk kendala dalam metode penilaian hasil belajar serta sulit mengenal karakter siswa.

Dari fakta tersebut bisa ditarik simpulan sementara bahwa kendala utama yang dialami dalam kegiatan Belajar dari Rumah (BDR) di lingkungan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Sleman adalah masalah akses Internet baik yang dialami oleh orangtua dari anak-anak TK maupun guru dan keterbatasan kepemilikan

handphone di lingkungan orangtua atau walimurid. Keterbatasan akses sinyal Internet menunjukkan pemerataan akses Internet pada berbagai pedesaan di Kabupaten Sleman tidak merata. Karena hanya sebagian kecil saja dari para orangtua yang berlangganan akses Internet di rumah masing-masing.

Keterbatasan kuota Internet juga menjadi perhatian, mengingat kondisi perekonomian nasional yang tengah terpuruk membuat para orangtua murid tidak mampu dalam membeli kuota Internet secara rutin. Masih banyaknya orangtua yang tidak memiliki *handphone*, menunjukkan bahwa kemampuan perekonomian para orangtua murid dalam kondisi terbatas atau kekurangan finansial.

Ternyata di tengah pandemi COVID-19, para orangtua juga mengalami kendala dalam upaya pendampingan kepada anak-anak mereka tidak optimal (sebanyak 42 pendapat atau 21 persen), dan sebanyak 13 pendapat (7 persen) mengungkapkan fakta bahwa mereka mengalami kesulitan komunikasi dengan orangtua dan atau siswa. Kendala lainnya seperti turunnya motivasi belajar siswa dan iuran siswa menjadi berkurang; dan guru sulit melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*).

2. Solusi dalam Mengatasi Masalah Hambatan/Kendala dalam Kegiatan Belajar Mengajar di TK

Adapun solusi yang dilakukan oleh para guru dalam mengatasi berbagai kendala dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 yaitu dengan cara menyesuaikan model pembelajaran dengan kondisi tanggap darurat COVID-19. Penyesuaian strategi pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara: menyesuaikan materi/kegiatan pembelajaran (92 pendapat atau 46 persen), melakukan kunjungan ke rumah murid (*home visit*) sebanyak 55 pendapat atau 46 persen; penyesuaian waktu belajar (16 pendapat atau 8 persen), serta mengusulkan agar ada pembelajaran di sekolah langsung dengan tatap muka menerapkan protokol kesehatan sebanyak 9

pendapat (5 persen); serta melakukan peningkatan literasi digital sebanyak 1 pendapat (1 persen).

Solusi lainnya, sekolah menerapkan kebijakan adanya bantuan Internet kepada guru dan orangtua murid melalui skema pendanaan BOS sebanyak 15 pendapat (8 persen). Sedangkan solusi yang ditempuh lainnya untuk mengatasi berbagai kendala yang ada yakni dengan melakukan komunikasi personal dengan orangtua/siswa sebanyak 14 pendapat (7 persen), serta memberikan motivasi kepada para orangtua atau murid agar mereka tetap optimistis meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Ada 13 pendapat yang mengungkapkan hal tersebut (7 persen). Hanya ada 6 responden yang tidak menjawab pertanyaan terkait solusi atas berbagai kendala pembelajaran selama pandemi COVID-19.

3. Intervensi Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Belajar Mengajar di TK Selama Pandemi COVID-19

Adapun kebijakan pemerintah yang sudah ditempuh dan dirasakan dampaknya oleh para responden terkait proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 yaitu: perberlakuan Program Belajar Dari Rumah (BDR) di Kabupaten Sleman (68 pendapat atau 34 persen), adanya subsidi bantuan pendanaan untuk meringankan dampak COVID-19 (10 pendapat atau 5 persen), monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran (18 pendapat atau 9 persen); melakukan pembinaan terhadap guru melalui seminar, workshop, dan kegiatan sejenis sebanyak 52 pendapat (26 persen), dan program guru kunjung (*home visit*) sebanyak 3 pendapat (2 persen). Adanya gagasan untuk melakukan program guru kunjung ke rumah ini sesungguhnya mendapatkan respons negatif dari publik karena kekhawatiran akan menimbulkan kluster baru COVID-19. Sementara jumlah responden yang menilai bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi atau kebijakan dalam mengatasi berbagai kendala dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19 bernilai cukup tinggi yakni sebanyak 27 pendapat atau 14 persen. Bahkan ada

sebanyak 33 responden (17 persen) yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai poin tersebut. Fakta tersebut menguatkan adanya pesimisme dari para respondens terkait kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini harus menjadi introspeksi dan refleksi dari berbagai pihak.

4. Harapan Respondens dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19 Tingkat TK

Dari hasil analisis terhadap poin harapan para respondens mengusulkan sebagai berikut: Pertama, respondens mengharapkan agar pemerintah memberikan izin untuk segera melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka bersyarat ketat dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Ada 55 pendapat yang sepakat dengan hal ini atau 28 persen. Harapan lainnya, agar pemerintah menerapkan kebijakan dan sosialisasi Belajar dari Rumah (BDR) sebanyak 29 pendapat (15 persen), penyesuaian materi/kegiatan termasuk kurikulum sebanyak 16 pendapat (8 persen); dan memberikan izin untuk menerapkan kebijakan melakukan guru kunjung (*home visit*) sebanyak 6 pendapat (3 persen). Berbagai harapan ini merupakan suara atau aspirasi yang relevan untuk diakomodir dan diperhatikan oleh para pengambil kebijakan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

5. Tanggapan mengenai Program *Home Visit*

Adanya kebijakan Program *home visit* ternyata mendapatkan respons beragam sikap dari para respondens. Dari 200 responden guru TK, menyatakan setuju adanya program *home visit* sebanyak 130 responden (65 persen); dan yang tidak setuju sebanyak 64 respondens (32 persen), sisanya tidak menjawab atau memberikan respons sebanyak 6 orang (3 persen). Betapa animo dan keinginan kuat dari para guru TK untuk mengadakan guru kunjung ke rumah peserta didik cukup tinggi, mengingat anak-anak TK

menjadi kelompok peserta didik yang paling sulit untuk dilakukan pembelajaran secara *online*; jika dibandingkan dengan kelompok usia peserta didik di atas.

Jika dibedah, para respondens yang setuju untuk diadakan program *home visit* dengan syarat mutlak melaksanakan protokol kesehatan dan diadakan pada daerah yang aman dari COVID-19 atau zona hijau (55 responden atau 28 persen). Alasan lainnya, program tersebut dilakukan secara privat dan harus dilakukan dalam kelompok kecil saja (94 responden atau 47 persen), serta mengusulkan agar dilakukan untuk siswa yang bermasalah saja.

Responden lainnya sepakat dengan dalih agar program tersebut diadakan agar pembelajaran berjalan efektif dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan adaptasi materi maupun kegiatan pembelajaran (7 responden atau 4 persen). Hanya ada 3 responden (2 persen) saja yang tidak memberikan alasannya secara tegas, namun tetap menyatakan setuju dengan program tersebut. Responden yang menolak adanya program *home visit* beralasan bahwa program tersebut sangat berisiko dalam menyebarkan virus COVID-19 (54 responden atau 27 persen) dan untuk kepentingan efektivitas waktu-pembiayaan (14 responden atau 7 persen), sementara hanya 2 responden (1 persen) yang tidak memberikan alasannya.

Karakter kurikulum dan model pembelajaran di bangku Taman Kanak-Kanak berbeda dengan tingkat SD dan SMP, mengingat pembelajarannya lebih banyak bermuatan dengan dunia permainan dan hiburan. Secara teknis dalam pembelajaran daring, kegiatan belajar dan mengajar di tingkat TK memiliki kompleksitas permasalahan. Karena anak-anak TK jelas tidak atau belum bisa mengoperasionalkan berbagai perangkat gawai, sehingga kesuksesan pembelajaran di tingkat TK secara daring tergantung penuh dari pendampingan yang dilakukan oleh orangtua masing-masing. Maka dari itu, model pembelajaran TK di Kabupaten

Sleman selama masa tanggap darurat COVID-19 harus dilakukan dengan perlakuan khusus dan beda.

Dari 200 guru TK yang menjadi responden riset ini, sebanyak 130 guru menyetujui agar diadakan program *home visit*, sedangkan yang menolaknya hanya sebanyak 64 guru saja, serta 6 guru memilih tidak tahu dengan dua pilihan yang sulit di atas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa para guru TK di Sleman berkeinginan kuat agar pembelajaran dengan model *home visit* bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

D. Refleksi Pengalaman Berkiprah menjadi Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Selama Pandemi COVID-19

Pada bagian ini dibebaskan esai yang bisa melengkapi hasil penelitian di atas, di mana berbasis pada pengalaman 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 dalam mengawal dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Karya esai tersebut bersifat reflektif, diskriptif, dan empirik sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing para anggota Dewan Pendidikan Sleman; sehingga diharapkan semakin memperkaya khasanah hasil penelitian di atas.

Adapun esai dari 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2022 disajikan secara runtut dengan urutan sebagai berikut: Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom., Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., Drs. Nurjamil Dimyati, Sudiyo, S.Ag., M. Pd., Dr. St. Nurbaya, M.Si., M.Hum., Drs. Suyono, M.Pd., Drs. Buchori, Dr. John Suprihanto, M.I.M., Akhmad Ritaudin, M.Pd., Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si., serta Dr. (C) Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si. Selamat membaca!

Eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan Ikhtiar Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sleman Menghadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdampak besar pada dunia pendidikan di DIY. Proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/K, sampai Perguruan Tinggi (PT) mendadak menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan/*online*). Terhitung sejak pertengahan Maret 2020, para siswa dan mahasiswa diharuskan belajar dari rumah/kos untuk menghindari paparan COVID-19. Seluruh PT dan lembaga pendidikan di DIY kontan menerapkan kebijakan pembelajaran daring. Bahkan sejumlah PT menerapkan *lockdown* (isolasi) dan melarang sivitas akademika melakukan aktivitas di PT. Kampus UNY dan UIN Sunan Kalijaga misalnya sudah menerapkan kebijakan *lockdown* atau penutupan kampus dan atau pembatasan kegiatan di kampus sampai sekarang. Tujuannya tegas, yakni memutus persebaran COVID-19 dan mencegah dampak buruknya.

COVID-19 berdampak sistemik pada kebijakan pembatalan Ujian Nasional untuk SMA/K, SMP, dan SD secara nasional. Meskipun mayoritas pelajar SMK kelas XII di berbagai daerah, termasuk di DIY telah terlanjur melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 16-19 Maret 2020. Berdasarkan data dari *Worldometer* (24 November 2020), COVID-19 telah mengakibatkan 1.402.028 orang meninggal dunia, 59.514.808 orang terpapar virus COVID-19; dan baru 41.155.562 orang yang dinyatakan sembuh. Amerika Serikat sampai sekrang masih

menduduki peringkat pertama, negara dengan jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 263.687 orang. Berturut-turut disusul oleh India dengan 134.254 orang meninggal dunia,

Brazil dengan 169.541 orang meninggal dunia, Meksiko sebanyak 101.926 orang meninggal dunia, dan Inggris 55.230 orang meninggal dunia. Sedangkan pada skala nasional, merujuk data COVID-19.go.id (24 November 2020), COVID-19 telah mengakibatkan 16.002 WNI meninggal dunia; 502.110 orang terpapar COVID-19, dan 422.386 orang sudah sembuh. Sedangkan di Kabupaten Sleman, merujuk data Corona.Jogjapro (24 November 2020), COVID-19 telah menyebabkan 37 warga Sleman meninggal dunia, 383 orang terpapar COVID-19, dan 1.811 orang dinyatakan sembuh.

Sampai sekarang ada 7 kecamatan di Sleman yang masih memiliki kasus COVID-19 dalam jumlah cukup tinggi yakni: Depok, Ngaglik, Mlati, Sleman, Godean, dan Gamping serta Kalasan. Tentu saja, angka statistik di atas masih sangat cair, bisa naik dan turun dalam waktu yang tidak bisa diprediksikan dengan mudah. Mengingat di Sleman ada 2 agenda politik besar yakni Pilkada Sleman pada 9 Desember 2020 dan Pilkadaes 20 Desember 2020; maka potensi terjadinya lonjakan jumlah penderita COVID-19 menjadi sangat besar di Sleman.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan luar biasa. Adanya perubahan sistem pembelajaran daring telah mengakibatkan masalah baru. Pertama, belum tersedianya jaringan internet secara merata sampai pelosok kampung. Di Sleman Barat, sinyal internet tidak merata di sejumlah desa. Di Kabupaten Sleman saja, akses Internet tidak merata. Apalagi akses Internet di daerah Gunungkidul dekat pantai, atau Kulonprogo di atas perbukitan, tentu ada masalah akses Internet. Tentu lebih parah lagi, akses Internet di luar Jawa. Akibatnya, para pelajar dan guru yang minim sinyal/akses Internet mengalami kendala ketika melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring telah mengakibatkan perubahan model

pembelajaran reguler menjadi daring dengan bantuan gawai yang menghubungkan antara para pelajar dan guru, serta mahasiswa dan dosen. Tidak semua murid dan orangtua memiliki gawai yang terkoneksi Internet. Masalah tersebut diatasi dengan penyediaan fasilitas internet ke setiap rumah penduduk.

Kedua, kini banyak pelajar tidak mendapatkan pendampingan dari orangtua mereka ketika melakukan pembelajaran daring. Faktanya ditemukan banyak kasus di mana anak-anak memanfaatkan kebijakan belajar dari rumah, malah keluyuran atau bermain di luar rumah. Banyak pelajar pada jam sekolah justru bermain *playstation* atau berada di warung internet, dan tempat bermain lain. Pengawasan dan pendampingan yang lemah dari orangtua menjadikan pembelajaran daring menjadi tidak efektif. Para pelajar yang dibiarkan keluyuran, berkumpul dan bermain-main dengan teman-temannya di luar rumah justru membuat risiko terjadinya penyebaran COVID-19 menjadi tinggi. Solusi atas masalah ini: justru menjadikan gawai sebagai sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang menyenangkan.

Ketiga, dari sisi guru sendiri, mayoritas belum siap dengan pembelajaran berbasis daring. Sebab bahan-bahan pembelajaran selama ini dikonsep secara luring (luar jaringan/*offline*). Jelas membutuhkan waktu panjang bagi para guru untuk beradaptasi menggunakan model pembelajaran daring. Bimbingan teknis secara intensif harus dilakukan oleh para pemangku pendidikan kepada para guru, terutama terhadap para guru yang usianya sudah sepuh atau tua. Solusi atas masalah ketiga dengan melakukan reformasi pembelajaran bagi para guru di DIY.

Keempat, berdasarkan refleksi pembelajaran daring di masa tanggap darurat COVID-19 di DIY selama delapan bulan terakhir, tidak semua orang tua paham model kurikulum pendidikan saat ini. Orangtua berpendidikan rendah sulit memahami konten semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, sehingga sulit mendampingi

anak-anaknya dalam belajar. Solusinya dengan menerapkan pembelajaran daring di mana guru benar-benar bisa berinteraksi secara virtual dengan seluruh pelajar. Guru tak hanya memberikan tugas saja, melainkan harus memantaunya meskipun virtual.

Butuh komitmen dan kerja keras dari semua kalangan (pemimpin, kepala sekolah, guru, pelajar, orang tua, tokoh, pengusaha, dosen, mahasiswa, dll.) dalam mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Mari kita lawan dan cegah sebaran COVID-19. Pendidikan daring yang tersistem baik, menjadi solusi cerdas pembelajaran di tengah krisis COVID-19.

Eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman harus Diperkuat

Bupati Sleman telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 2.4/Kep.KDH/A/2020 tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 pada 6 Januari 2020. Adapun 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 yang ditetapkan itu adalah: Nursya'bani Purnama, S.E., M.Si.; Dr. John Suprihanto, M.I.M.; Dr Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.; Dr. St. Nurbaya, M.Si., M.Hum.; Akhmad Ritaudin, S.Pd., M.Pd.; Drs. Suyono; Drs. Nurjamil Dimyati; Drs. Buchori; Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si.; dan Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. Bupati Sleman telah mengukuhkan keberadaan 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 pada Rabu, 26 Februari 2020 di R.R. Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pukul 13.00 WIB s/d selesai.

Keberadaan Dewan Pendidikan dijamin melalui perundang-undangan. Antara lain: Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1-4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 192 ayat 1-5 dan 13; dan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Namun dalam birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Sleman, keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman tidak masuk dalam nomenklatur birokrasi pemerintah Kabupaten Sleman. Buktinya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan tak memasukkan unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam regulasi tersebut.

Artinya, secara hukum birokrasi, keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman masih sangat lemah. Secara nasional, sampai sekarang Dewan Pendidikan pada tingkat pusat atau nasional tidak ada atau belum dibentuk, sehingga hal ini menjadi masalah bersama.

Logislah, maka dalam “operasional program kerjanya”, anggaran operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman “dititipkan” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Misalnya jika dianalisis, dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Sleman Tahun 2018 (bisa diakses melalui situs resmi, meski tidak disebutkan secara langsung nama Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, hanya dicatut satu kali: yakni pada halaman 49: poin 2 dari sub: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: soal “Pembinaan Dewan Pendidikan” diplot dengan anggaran Rp 149.999.900 (realisasi keuangan 93,47 persen; realisasi fisik 97,06 persen) yang dinyatakan dalam keterangannya: Tidak Efisien. Padahal faktanya, anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 2018 sebesar Rp 210.968.335.471,80 (lebih dari 210 miliar, untuk 4 jenis sasaran: pengelolaan keuangan daerah; mutu sarana dan prasarana; SDM pendidikan formal, SDM Pendidikan non formal), dengan realisasi keuangan 91,19 persen; dan realisasi fisik 101,17 persen; dengan keterangan Efisien. Artinya,

plot anggaran yang diperoleh Dewan Pendidikan Sleman hanya: 0,07110067 persen dari RAB Dinas Pendidikan Sleman 2018 saja. Artinya keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sangat kecil karena keterbatasan anggaran yang bisa diakses dari APBD Kabupaten Sleman.

Padahal tanggungjawab yang melekat dalam amanah tersebut sangat berat. Untuk itu sangat perlu segera diupayakan upaya penguatan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman secara kelembagaan yakni melalui regulasi ditingkat daerah maupun penguatan politik anggarannya. Caranya yakni dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah khusus mengenai Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, dan merealisasikan agar Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki sekretariat sendiri; di mana selama ini masih nempel di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Idealnya, anggaran untuk kepentingan pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Sleman tidak sesuai atau masih jauh dari amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Faktanya, plot anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebanyak Rp 210.968.335.471,80. Padahal jumlah APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah Rp 2,682 triliun; dan setelah perubahan anggaran APBD Kabupaten Sleman 2019, jumlahnya menjadi sekitar Rp 2,742 triliun. Artinya, anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman hanya mendapatkan alokasi sebanyak: 7,9 persen dari APBD. Seharusnya, anggaran pendidikan di Sleman sebanyak minimal Rp 536.437.176.936; sangat jauh dari ideal, karena kurang dari 12,1 persen. Di mana keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten

Sleman juga harusnya semakin diperkuat dengan regulasi di tingkat daerah dan penguatan anggaran serta kesekretariatan.

Pengalaman menjadi Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025

Berikut ini pengalaman yang saya miliki sejak bergabung menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman periode 2020-2025. Pertama, terlibat langsung dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Sleman untuk tingkat TK, SD, dan SMP Tahun 2020. Merujuk pada Surat Tugas Nomor: 422/1855 tentang Monitoring Pelaksanaan PPDB Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman per 9 Juni 2020; Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mendapatkan penugasan untuk melakukan monitoring pelaksanaan PPDB Tahun 2020 pada sebanyak 44 lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMP se-Sleman. Saya pribadi mendapatkan penugasan untuk pemantauan pada 4 sekolah yakni: SD Negeri Berbah 2 Kec. Berbah, SD Negeri Kledokan Kec. Kalasan, SMP Negeri 2 Berbah Kec. Berbah, dan SD Negeri Kalasan 1 Kec. Kalasan. Kunjungan langsung ini sangat berkesan. Karena bisa memahami langsung problematika riil yang dihadapi berbagai sekolah di pinggiran ketika proses PPDB secara *Online*.

Ternyata, dari pantauan tersebut bisa diketahui bahwa akses Internet di Kabupaten Sleman tidak merata. Akibatnya proses PPDB menjadi terkendala. Bahkan pendaftar dari jalur afirmasi baik di tingkat SD maupun SMP masih sangat minim. Minimnya sosialisasi jalur tersebut kepada para calon siswa SD dan SMP, menyebabkan minimnya pendaftar yang mengakses jalur tersebut. Padahal, jumlah anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu (miskin) masih banyak jumlahnya di Kabupaten Sleman. PPDB *Online* dengan sistem zonasi relatif aman, namun masih perlu dilakukan perbaikan pada sejumlah evaluasi. Kedua, terkait pembelajaran daring di masa pandemik COVID-19 ini memang harus

dilakukan perbaikan terutama dalam hal pemberdayaan orangtua yang benar-benar posisinya harus mendampingi dan mengajar sebagai guru di rumah masing-masing. Kurikulum yang dipakai juga harus diselaraskan kembali terutama dengan mengakomodir potensi lokal dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebaiknya membuat paket-paket konten program pembelajaran dalam bentuk audio visual yang bisa ditebar melalui jaringan media sosial, radio, televisi, dan media *online*.

Ketiga, pengalaman menerima kunjungan dinas dari Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon pada 28 September 2020 di Gedung PGRI Sleman, tentu menjadi pelajaran berharga. Karena sekaligus bisa menimba ilmu dari para anggota Dewan Pendidikan kabupaten Cirebon yang ternyata secara pencapaian eksistensi organisasi/kelembagaan, Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon lebih maju daripada Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Karena mereka sudah masuk dalam struktur nomenklatur birokrasi melalui Peraturan Daerah, dan sekretariat yang mandiri.

Keempat, dalam sejumlah kesempatan saya bisa ikut dalam workshop maupun diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Provinsi DIY dan Sekda DIY di Dinas Pendidikan DIY serta Kantor Gubernur DIY. Kesempatan belajar dan mendengarkan berbagai gagasan dari banyak tokoh pendidikan di DIY, membuat saya sangat antusias dan bersemangat dalam mengembangkan dunia pendidikan di masa mendatang.

Kelima, pengalaman berorganisasi dan berkomunikasi dengan 10 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025 yang rata-rata usianya sudah lebih dari 50 tahun; tentu saja menjadi pengalaman menarik bagi saya untuk beradaptasi. Di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, saya berusaha keras untuk tampil maksimal. Termasuk dalam merampungkan hasil riset dan penulisan buku ini. Untuk itu diperlukan perjuangan yang lebih keras lagi, agar eksistensi dan

kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman lebih optimal dan maju lagi pada masa kini dan yang akan datang.

Keenam, penyusunan buku riset yang tengah dibaca pembaca ini adalah kerja keras seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Kontribusi saya dalam penyusunan buku ini yakni menjadi editor buku dan koordinator tim periset; sekaligus mengurus segala keperluan untuk kepentingan pracetak, penulisan, penyuntingan, hingga penerbitan buku ini dengan aman. Adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan pendanaan yang tersedia, justru harus membuat saya untuk bekerja lebih optimal dan kreatif. Selama masa pandemi, rapat koordinasi antar anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan aplikasi *online* seperti *Zoom Pro* milik Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan *WhatsApp Group*.

Tantangan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman ke Depan

Secara kuantitatif, jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman berjumlah 1.839 buah terdiri atas 1.056 PAUD (KB, TK, TPA, SPS, RA), 523 SD, 116 SMP, 46 SMA, 57 SMK, dan 41 Perguruan Tinggi. Ada 156.525 pelajar yang tengah menuntut ilmu di berbagai sekolah di Kabupaten Sleman. Mereka terdiri atas 89.954 pelajar SD; 43.239 anak SMP; 13.930 anak SMA; dan 9.402 anak SMK, serta 103.718 mahasiswa. Sedangkan jumlah guru atau pendidik serta tenaga pendidik seluruhnya mencapai 15.012 orang dan 2.914 dosen.

Keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 sangat strategis dan urgensi dalam mengawal Kabupaten Sleman sebagai pusat pencetak kualitas SDM yang profesional dan tangguh. Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman bertanggungjawab besar pada berbagai upaya untuk memberikan berbagai solusi atas aneka masalah bidang pendidikan yang dihadapi masyarakat Sleman sehingga berdampak positif bagi kemajuan daerah. Untuk itulah

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman membutuhkan tokoh-tokoh bidang pendidikan yang memahami benar watak dan karakter masyarakat Sleman serta memiliki visi dan misi yang visioner dan progresif untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM memang harus selalu di kedepankan oleh pemerintah (siapa pun yang berkuasa). Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memenangkan kompetisi antar bangsa di era Revolusi Industri 4.0. Tantangan berat dalam dunia pendidikan menghadapi Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan komitmen dan perjuangan dari segenap lapisan masyarakat.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan dominannya penggunaan teknologi kekinian dalam berbagai bidang kehidupan. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data besar (*big data analytics*), sistem keamanan siber (*cyber security system*), Internet untuk segalanya (*Internet of Things*), pemrograman dan pengkodean (*programming and coding*), pembelajaran berbasis pada mesin (*machine learning*), serta kebijakan digital dan penghitungan rumit dengan komputer (*digital policy and cloud computing*) menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dunia pendidikan harus bisa menjawab tantangan zaman tersebut terlebih dengan menghadirkan sistem pendidikan yang disertai dengan kurikulum yang relevan dengan tantangan dan tuntutan kebutuhan zaman tersebut. Itulah yang harus direformulasikan oleh para pengelola lembaga pendidikan termasuk oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tantangan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman di era pandemi COVID-19 dan era digital, sangat berat. Mereka harus benar-benar bisa menangkap kebutuhan zaman dan tantangan dunia pendidikan di masa kini dan mampu bersinergi dengan berbagai kalangan termasuk dengan pihak eksekutif, yudikatif, legislatif,

dan *stakeholders* lainnya. Mereka juga harus dekat dengan para pengelola lembaga pendidikan.

**) Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom., Sekretaris Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 dan Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu “STIKOM” Komunikasi Yogyakarta*

Catatan Singkat Kunjungan dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan PPDB Kabupaten Sleman

Oleh: Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Dasar Hukum Hak Warga Negara Mendapatkan Pendidikan

Jika negara di dunia ini dibagi dalam negara berkembang dan negara maju, maka kategori untuk membedakannya adalah kepemilikan faktor produksi. Terdapat 4 faktor produksi yang dikenal, yaitu, pertama: faktor produksi alam, kedua: faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi: modal dan faktor produksi keahlian (*skill*). Faktor produksi yang pertama dan kedua disebut dengan *comparative advantage*. Faktor produksi yang ketiga dan keempat disebut *competitive advantage*. Negara berkembang pada umumnya mempunyai *comparative advantage* yang berwujud alam dan tenaga kerja. Negara maju pada umumnya mempunyai *comparative advantage* yang berupa modal dan keahlian.

Fakta empiris menunjukkan bahwa kepemilikan *competitive advantage* berupa modal dan *skill* mempunyai nilai materiil yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang memiliki *comparative advantage*. Perbedaan itulah yang dipakai dalam mengkategorikan antara negara maju dan negara berkembang. Berdasarkan pembagian dan dasar pembagian suatu negara di atas; maka dapat dikaji bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Negara Indonesia lebih banyak mempunyai faktor produksi alam dan tenaga kerja dibandingkan faktor produksi *skill* dan modal. Supaya Negara Indonesia dapat menjadi negara yang setara dengan Negara Maju; maka upaya yang harus dilakukan salah satunya adalah mempertinggi kemungkinan untuk dapat memiliki faktor produksi *skill* dan modal

dari negara kita sendiri, tidak harus mengharapkan datangnya aliran modal dan *skill* dari luar negeri dengan konsekuensi mengalirnya devisa ke negara asal dana dan *skill* tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempertinggi kesempatan dan kualitas pendidikan di Negara Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas; maka akan menjadi modal dasar bagi proses kekuatan potensial menjadi kekuatan riil. Kekuatan riil inilah yang akan membawa negara kita menjadi sejajar dengan negara maju.

Pentingnya pendidikan dibuktikan dengan diaturnya hal pendidikan menjadi hak warga negara yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 31 Bab XIII. Pasal 31 terdiri dari 5 ayat. Secara lengkap Pasal 31 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*****)
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*****)
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*****)
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*****)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*****)

Pasal tersebut terdapat dalam UUD 1945 merupakan konstitusi, peraturan tertinggi di Indonesia yang menjadi sumber hukum yang paling tinggi seperti dikatakan oleh Hans Kelsen dalam *Stufebau Theory*, menyebutkan dengan jelas bahwa: *Pendidikan merupakan*

hak setiap warga negara. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memenuhinya. Pengertian dari hak adalah kepentingan yang dapat dituntut pemenuhannya. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pendidikan menjadi hak dari setiap warga negara. Sedangkan kewajiban mengikuti pendidikan bagi warga negara adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, dan memberikan kewajiban juga bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Dasar hukum bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang paling tinggi menjadi dasar hukum yang kuat akan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Implementasi Hak Setiap Warga Negara dalam Mendapatkan Pendidikan

Dengan dasar ketentuan Pasal 31 UUD 1945, menjadi salah satu alasan yang kuat, mengapa penulis tertarik menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Relevan dengan hal tersebut, tugas Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman adalah untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Sleman. Pendidikan Dasar adalah pendidikan 9 tahun wajib belajar. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar tersebut. Tugas keluar pertama yang diberikan kepada anggota Dewan Pendidikan adalah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam rangka memantau persiapan dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020. Bagian ini memaparkan pengalaman pribadi penulis dalam melaksanakan tugas dari Dewan Pendidikan. Tugas kunjungan yang diberikan adalah ke tiga Sekolah Dasar dan tiga Sekolah Menengah Pertama. Tiga sekolah Dasar tersebut adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri Depok I Sleman Yogyakarta.
2. Sekolah Dasar Negeri Adisucipto I Sleman Yogyakarta.

3. Sekolah Dasar Negeri Depok I Sleman Yogyakarta.
4. Sekolah Menengan Pertama Negeri III Depok Sleman Yogyakarta
5. Sekolah Menengan Pertama Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta
6. Sekolah Menegah Pertama Muhamadiyah I Sleman Yogyakarta

Berikut ini disajikan rekapitulasi kegiatan kunjungan lapangan dalam bentuk tabel, yang telah dilakukan.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan PPDB

Nama Sekolah	Quota	Zonasi	Afirmasi	Anak Berkebutuhan Khusus	PT	LNG	Persoalan Muncul
SD Negeri Depok I	56	50	0	0	0		Persoalan PPDB: <ul style="list-style-type: none"> • Internet kadang labil. Tidak sinkron antara alamat yang tertera di KK dan Disdukcapil tidak sama. • Tidak sinkron antara data di Dapodik dan Disdukcapil. • Tidak ada koordinasi antara operator TK dengan operator SD, operator TK salah menginput. • Batas waktu antara sosialisasi Juklis dan pelaksanaan terlalu mepet. Persoalan di luar PPDB: ruangan yang belum memadai, kursi yang belum layak/sarana prasarana.

Nama Sekolah	Quota	Zonasi	Afirmasi	Anak Berkebutuhan Khusus	PT	LNG	Persoalan Muncul
SD Negeri Adisucipto I	56	6	0	0	0	38	<p>Persoalan PPDB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur zonasi di sekolah perbatasan menimbulkan persoalan berkurangnya siswa, karena zonasi Sleman hanya menerima dari Sleman, mereka berpikir bahwa tergantung domisili sekolah padahal tergantung pada KK. <i>Online</i> mereka tidak mantab, kemudian cari sekolah yang menerima berkas/<i>offline</i>, mengakibatkan jumlah pendaftar berkurang. Jalur zonasi menimbulkan konsekuensi bahwa hanya yang masuk jarak yang ditentukan adalah yang diterima, sementara jarak yang ditentukan KK-nya dari Bantul. Sebenarnya hal ini dapat di atasi dengan jalur luring, tetapi orang tua biasanya merasa khawatir anaknya tidak mendapatkan sekolah lalu mencarikan sekolah di jalur zonasi di sekolah yang sesuai dengan ketentuan. Konsekuensinya ke sekolah perbatasan akan menjadi berkurang jumlah siswanya. Juknis hanya cocok di SD tidak perbatasan, sudah selalu diutarakan di rapat dinas, jalur luring yang dikatakan solusi, bagi orangtua akan dilematis.

Nama Sekolah	Quota	Zonasi	Afirmasi	Anak Berkebutuhan Khusus	PT	LNG	Persoalan Muncul
SD Negeri Condong Catur	56	25				8	Persoalan PPDB: Hari terakhir PPDB sudah diverifikasi sekolah, tapi kemudian otomatis anak tersebut pindah ke sekolah yang lain, apakah orang tua bisa melakukan ini atau dari pihak Dinas. Hal tersebut menimbulkan persoalan.
SMP Negeri III Depok	128	77	45	0	6		<ul style="list-style-type: none"> Kinerja masih dilihat dari UN, banyak kinerja lain yang dapat dilihat. Syarat KK 1 tahun tersebut dilihat dari aturan pemerintah atau dari aturan dinas. Literasi tentang PPDB lebih ditingkatkan, baik dari aspek waktu antara peraturan ada dan sosialisasi yang dilakukan maupun kepada siapa informasi tersebut akan diberikan.
SMP Diponegoro	160				165		Masih banyak yang berminat tapi quotanya sudah habis.
SMP Muhammadiyah I Depok	128				122		Persoalan di luar PPDB: SDM diberikan pembekalan bagaimana mengajar yang baik dan memanaJemen kelas, sekolah yang baik secara periodik oleh Dinas.

Berikut ini ditampilkan pada Tabel 2 berkaitan dengan sarana prasarana pendukung Pelaksanaan PPDB 2020 pada sekolah yang dituju.

Tabel 2. Form Monitoring

No.	Aspek	Nama Sekolah				
		SD Depok 1	SD Adisucipto I	SD CCI	SMP Depok 3	SMP Muhammadiyah I Depok
1	Jumlah petugas	5	18	6	13	9
2	Jumlah ruang	<i>Out door</i>	<i>Out door</i>	2 ruang dibuka	pendopo	
3	Jumlah laptop	3	4	2	6	4
4	Jumlah printer	1		2	2	2
5	Jaringan internet	Ada/lelet	ada	ada	ada	
6	Jumlah petugas verifikasi berkas	2	4		3	2
7	Ruangan verifikasi berkas	<i>Ada/outdoor</i>	<i>Ada/outdoor</i>		Pendopo	Lantai 1 dan selasar
8	Adakah fasilitas verifikasi berkas	Jawaban ada di no 3				

Usulan

Usulan diberikan berdasarkan data dari sekolah yang dikunjungi. Dari data tersebut di atas usulan diberikan setelah melakukan analisis kualitatif yang sederhana untuk menganalisa persoalan persoalan yang muncul. Usulan didasarkan pada persoalan yang terkait dengan PPDB dan persoalan yang tidak terkait dengan PPDB.

Dari data di atas persoalan yang muncul yang paling signifikan untuk diungkapkan antara lain:

1. Persoalan persoalan PPDB yang ada seperti tidak sinkron antara alamat yang tertera di KK dan Disdukcapil tidak sama, tidak sinkron antara data di Dapodik dan Disdukcapil, tidak ada koordinasi antara operator TK dengan operator SD, operator TK salah menginput, batas waktu antara sosialisasi Juklis dan pelaksanaan terlalu mepet, pemahaman tentang jalur zonasi yang berdasarkan KK bukan berdasarkan wilayah. Usulan solusi dalam mengatasi persoalan tersebut adalah koordinasi antara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan pihak masing-masing sekolah di Kabupaten Sleman yang dilakukan jauh hari sebelum PPDB dan monitoring pelaksanaan PPDB tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
2. Persoalan yang tidak terkait dengan PPDB:
 - a. Bagi sekolah negeri baik SD maupun SMP masih terdapat guru honorer. Kebutuhan adanya guru dalam memenuhi rasio murid dan guru menjadi persoalan yang harus diatasi. Usulannya: Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatasi persoalan ini sangat diharapkan.
 - b. Bagi sekolah swasta (SMP). Usulannya: peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan SDM di sekolah swasta.

Inti dari gagasan ini adalah bahwa pada hakikatnya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan hak pendidikan (ditetapkan bahwa negara mempunyai kewajiban membiayai pendidikan dasar) setiap Warga Negara Indonesia. Kewajiban negara tersebut *officially* di daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hakikat ini haruslah menjadi roh yang menjiwai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan pihak yang terkait untuk melaksanakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan lembaga di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat melaksanakan dan mengimplementasikan kewajiban negara tersebut. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi upaya pelayanan kita bersama.

**) Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dan Hari Pahlawan

Oleh: Drs. Nurjamil Dimiyati

Pendahuluan

Perjalanan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa berlangsungnya pandemi COVID-19 pada saat ini membuat perubahan tatanan regulasi belajar mengajar yang jauh dari kegiatan belajar yang sudah berlangsung seperti biasanya. Kecuali itu terjadi gejolak di masyarakat luas terlebih siswa didik dan orang tuanya berkaitan adanya sistem belajar yang berubah dari biasanya dari tatap muka lalu berubah menjadi jarak jauh *online* dan sebagainya.

Gejolak dan perubahan itu juga mengakibatkan perubahan-perubahan tatanan sosial dari semua lini kehidupan yang tidak bisa dihindari yang harus disikapi dengan secara hati-hati dan penuh kearifan. Hal ini membuat para *stakeholders* pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan para praktisi pendidikan harus memeras potensi kemampuannya untuk supaya tetap bisa berlangsungnya kegiatan belajar mengajar tetap bisa berhasil seperti yang telah cita-citakan.

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang paling besar untuk segala tingkat pendidikan adalah pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Hal ini diambil sudah barang tentu sudah dengan penuh pertimbangan dari beberapa hal dan mengambil risiko yang sekecil-kecilnya. Namun di lapangan ternyata masih banyak sekali kelemahan dan akibat buruk dari pelaksanaan pendidikan secara jarak jauh tersebut. Karena itu, di sinilah saatnya para pemangku dan praktisi pendidikan harus berkreasi bagaimana cara pelaksanaan pendidikan dengan cara jarak jauh tersebut bisa dilaksanakan dan

berhasil tercapai tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya namun bisa menghindari dampak buruk dari pandemi COVID-19 sekecil-kecilnya.

Keberhasilan dari para pemangku kepentingan dan praktisi pendidikan yang bisa berkreasi melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bisa meminimalisir dampak buruk dari pembelajaran jarak jauh inilah, orang layak menyandang gelar pahlawan dalam pendidikan di masa pandemik. Hal ini karena sebetulnya gelar pahlawan itu mestinya tidak hanya diberikan kepada orang yang gugur dalam mengupayakan ataupun merebut kemerdekaan saja. Akan tetapi layak juga diberikan kepada orang yang sudah memeras keringat, membanting tulang dan berjasa kepada negara dan bangsa untuk kemakmuran, kejayaan bangsa bagi generasi penerusnya.

Beberapa kelemahan dan dampak buruk yang timbul dari pembelajaran jarak jauh dari beberapa komunitas, antara lain:

1. Dari komunitas peserta didik

Peserta didik tidak dapat bertatap muka dengan para gurunya sehingga mereka tidak dapat bersosialisasi langsung sehingga pelaksanaan pembelajarannya kehilangan unsur hiburan dan rekreasinya, sehingga anak peserta didik mudah jenuh dan mengakibatkan hilangnya efektivitas pembelajaran dan lain lain. Sementara pelaksanaan pembelajaran dengan cara jarak jauh juga harus memerlukan sarana prasarana yang beraneka macam dan memerlukan keterlibatan beberapa pihak lain seperti orang tua dan warga masyarakatpun harus terpenggil dan peduli terhadap adanya pembelajaran jaran jarak jauh tersebut.

2. Dari komunitas pendidik

Para guru dan pihak penyelenggara pendidikan menemukan banyak kendala yang harus dihadapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh sejak dari penyampaian materi, pengukuran keberhasilan penyampainan materi, melihat keseriusan para

peserta didik dalam menerima materi, pengawasan terhadap kegiatan juga sangat sulit dilakukan.

3. Dari komunitas orang tua

Para orang tua banyak mengalami kendala dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini, sejak dari pengawasan, pendampingan, penyediaan fasilitas. Masing-masing orang tua sangat beragam kemampuannya dan tingkat kepeduliannya, sehingga dalam masalah ini sangat memerlukan solusi.

4. Dari komunitas penanggung jawab pendidikan (pemerintah)

Pihak pemerintah juga tidak kalah banyaknya kendala yang harus dihadapinya sejak dari membantu penyediaan fasilitas pembelajaran seperti: halnya bantuan kuota internet, membuat regulasi pelaksanaan pembelajaran pengawasan peserta didik yang sangat bebas dalam kehidupan kesehariannya dan lain-lain.

Perlunya solusi pemecahan kendala pembelajaran jarak jauh di masa pandemik yang tidak mudah; maka sangat diperlukan orang yang dapat menemukan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut. Ke depan, perlunya pemberian penghargaan bagi orang yang dapat menemukan solusi atas kendala pendidikan jarak jauh. Jenis penghargaan kepada orang yang mampu mengatasi masalah tersebut seperti pahlawan yang telah mengupayakan maupun merebut kemerdekaan.

Hal ini dikandung maksud agar adanya semangat bagi para pemerhati peduli pendidikan kepada kader masa depan yang akan melanjutkan perjuangan masa depan bangsa.

**) Drs. Nurjamil Dimyati, Anggota Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman*

Refleksi Peran Strategi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kemajuan Pendidikan di Sleman Selama Pandemi COVID-19

Oleh: Sudiyo, S.Ag., M.Pd.

Era Kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo Jilid 2 memang spektakuler, karena hadirnya sosok-sosok fenomenal yang anti *mainstream*. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, tujuh milenial Staf Khusus Kepresidenan serta sosok lainnya yang merupakan lanskap keseriusan Presiden Jokowi untuk melakukan pergeseran paradigma dari kondisi birokratis-struktural menjadi paradigma pragmatis-kompetitif.

Pemikiran tentang perubahan peran pendidikan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan SDM unggul dan dapat memberikan kebaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia yang diperkuat oleh adanya gerakan literasi baru, menjadi fokus perhatian beliau. Roh tersebut kemudian dihembuskan pada sosok yang sesuai dengan zamannya, sosok yang tidak berkutat dalam dimensi akademik, sosok yang tidak terbelit oleh kultur birokrasi, sosok yang tidak dikerangkeng oleh iklim politik dan sosok yang mengedepankan ‘*soft skills*’ dan ‘*transversal skills*’ sebagai bentuk keterampilan hidup dan keterampilan yang secara kasat mata tidak terkait dengan bidang pekerjaan dan akademis tertentu.

Kehadiran Mendikbud Nadiem Makarim sebagai representasi Presiden Jokowi dalam melakukan revitalisasi tata kelola pendidikan, diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dan menciptakan ruang-ruang kreativitas yang nantinya akan menjadi daya dorong

berkembangnya pendidikan berbasis vokasional, dengan ragam keterampilan yang tidak sekadar mengedepankan konsep *link and match* antara lulusan sekolah dengan dunia industri atau dunia kerja, tetapi juga menekankan kapasitas lulusan yang lincah, adaptif, dan sensitif terhadap perubahan lingkungan industri, ekonomi, teknologi-aplikatif dan *entrepreneurship*.

Itulah yang kemudian menjadi pijakan Mendikbud RI baru untuk mengundang semua organisasi profesi guru agar dapat memberikan berbagai masukan terhadap perubahan pendidikan dan sebagai wahana untuk menggali berbagai potensi organisasi profesi yang dianggap mampu mengimbangi irama dari konser/simfoni pendidikan kekinian selama 5 tahun ke depan.

Sebagaimana kita ketahui bersama tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan adalah sebagai *advisory, supporting, controlling* dan *mediator*. Dewan Pendidikan yang *notabene* sebagai salah satu *stake holder* dunia pendidikan, hendaknya peka dan cerdas membaca momentum tersebut dengan menampilkan beragam instrumen dan harmoni yang bisa dimainkan dalam konser tersebut sehingga simpul kemitraan Dewan Pendidikan-Pemerintah yang selama ini terikat kuat menjadi lebih sinergi dalam memperkokoh eksistensi Dewan Pendidikan, bukan menjadi lembaga “*fals*” yang akhirnya terdisrupsi.

Kehadiran Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukanlah semudah membalikkan telapak tangan dalam menjalankan fungsinya. Dewan Pendidikan harus menjadi wadah aktual dengan sejumlah program nyata sebagai lembaga yang independen. Dewan Pendidikan harus menjadi wadah sebagai pusat kajian bagi pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai perubahan. Dewan Pendidikan harus menjadi Pusat Kajian dalam Tata Kelola Pendidikan, Pusat Kajian Revitalisasi kurikulum, Pusat Kajian Pemetaan dan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Pusat Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru,

Pusat Kajian Perlindungan Guru, dan program aktual lainnya yang selaras dengan program Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada umumnya, dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sleman pada khususnya.

Dewan Pendidikan harus bisa mempengaruhi/mengikis berbagai sisi seremonial yang tendensi mengedepankan figur-struktur-kultur yang rigid dan *status quo*. Dewan Pendidikan juga harus menghargai, mengapresiasi dan mendukung berbagai prestasi Pemerintah/Dinas Pendidikan. Tanpa program nyata tersebut, Dewan Pendidikan akan mengalami kesulitan untuk adaptasi dengan upaya perubahan yang akan digeber oleh Mendikbud RI yang relatif baru.

Namun di awal pemerintahannya, pemerintah dihadapkan persoalan yang sangat berat di sektor pendidikan. Betapa berat masalahnya karena datangnya wabah Virus *Corona Virus Diseases* (COVID-19) yang melanda dunia dan di Indonesia khususnya. Apa yang menjadi program Pendidikan Nasional yang sudah berjalan satu semester harus terhenti, harus ditinjau kembali karena pandemi COVID-19.

Kegiatan proses belajar mengajar tidak bisa berjalan sebagaimana biasa/tatap muka; namun harus melalui jarak jauh atau *online*, yang sarana dan prasarana pembelajaran *online* tidak dimiliki/belum dimiliki oleh semua siswa. Belajar Dari Rumah (BDR) adalah strategi pembelajaran yang paling logis bisa dilakukan. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah untuk mencegah mata rantai penularan virus COVID-19. Di sekolah dikeluarkan kebijakan pelaksanaan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran pada tanggal 24 Maret 2020, tentang kebijakan “Belajar dari Rumah/BDR)”. Hal ini mengandung arti bahwa orang tua sementara waktu menggantikan peran guru dalam mendampingi anak belajar di rumah.

Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa peran orang tua selama masa BDR ini lebih pada membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah kepada siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan BDR yang diberikan guru lebih pada pemberian tugas.

Peran orang tua sekaligus guru dalam membantu anak mengerjakan tugas-tugas nya dari sekolah...*anak saya kan udah sekolah SD dan SMP, yang menyelenggarakan belajar online dan banyak tugas-tugas yang memerlukan bimbingan orang tua...* (kutipan wawancara dengan ortu siswa di Sleman) sungguh berat harus mengambil alih peran guru dari dua anak tersebut.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji, apa sebenarnya makna belajar dari rumah itu? Apakah memiliki makna yang sama dengan mengerjakan tugas atau PR di rumah? Dengan pemberian tugas seperti itu apakah artinya peran pendampingan belajar anak dapat dikatakan berhasil? Orientasi pendampingan yang terfokus pada pengerjaan tugas sekolah menunjukkan bahwasannya orientasi pendidikan di Indonesia masih menekankan pada aspek perkembangan kognitif atau pencapaian akademik sehingga perkembangan afeksi dan psikomotorik dapat dikatakan tidak menjadi prioritas sehingga kurang terstimulasi.

Dalam proses pembelajaran di rumah (BDR) diharapkan guru serta orang tua dapat mewujudkan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik atau kognitifnya saja, tetapi dapat mewujudkan pendidikan yang bermakna, dibutuhkan saling pengertian dari pemerintah, sekolah, serta masyarakat dan ketiga elemen tersebut harus saling bersinergi. Demikian pula jika kita tinjau dari tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yakni: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Melibatkan seluruh komponen pendidikan untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dengan suasana yang berbeda yaitu di rumah saja, merancang kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19, memberikan dorongan motivasi dan apresiasi kepada guru, siswa dan orangtua, melakukan pelatihan daring mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mengirimkan laporan tugas harian anak-anak kepada Dinas Pendidikan melalui daring, melakukan komunikasi tidak hanya satu arah; tetapi multiarah untuk mensterilisasi satuan pendidikan adalah hal yang mutlak dilakukan pada kondisi pandemik ini. Posisi orang tua menjadi *partner* yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya; sehingga perlu dibekali dengan panduan-panduan yang sesuai dengan kebutuhan anak saat ini.

Sebagai Anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten Sleman sangat diharapkan pemikiran, pertimbangan berdasar kajian ilmiah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di masa COVID-19 dan mengatasi/mencari solusi pendidikan di Kabupaten Sleman ke depan pasca pandemi COVID-19 atau masa transisi menuju pembelajaran normal kembali. Semoga tulisan ini/ refleksi ini menjadi inspirasi/pendorong semangat rekan-rekan dalam menyusun hasil kajian, untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

**) Sudiyo, S.Ag.M.Pd., Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan Ketua PGRI Kabupaten Sleman*

Kendala Pembelajaran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Era COVID-19

Oleh: Dr. St. Nurbaya, M.Si., M.Hum.

Pendahuluan

Era COVID-19 yang datang tanpa permisi telah meluluhlantahkan keegoisan manusia. Manusia dipaksa untuk melakukan revolusi tatanan interaksi dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Segala aktivitas pembelajaran harus beradaptasi dengan protokol kesehatan COVID-19, termasuk dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada pembelajaran di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Tulisan ini memaparkan beberapa karakteristik permasalahan pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Ketika penulis menjadi anggota Dewan Pendidikan masa bakti tahun 2020-2025. Pilihan pengungkapan karakteristik pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini lebih kompleks permasalahannya. Hal ini berkenaan dengan regulasi, kesiapan orang tua, ketersediaan sarana prasarana, dan alat permainan edukatif.

Regulasi Tentang Pembelajaran Anak Usia Dini di Era COVID-19

Sampai dengan saat ini, belum ada regulasi yang mengatur pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di era COVID-19, baik ditingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Regulasi yang dimaksud adalah regulasi tentang apa, bagaimana, dan kapan serta siapa yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pembelajaran selama era COVID-19. Ketidaktersediaan regulasi yang mengatur pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini menyebabkan Kepala Sekolah dan Guru mengambil kebijakan yang tidak sama.

Persoalan utama yang mengemuka pada pengelolaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini adalah pada beralihnya tanggung jawab proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada orang tua. Proses pembelajaran yang semula perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya dan evaluasinya dilakukan oleh guru beralih kepada orang tua. Pengalihan tanggung jawab pembelajaran menjadi hal yang tidak mudah; karena orang tua tidak memahami bahwa proses pembelajaran yang dilakukan harus memenuhi persyaratan pembelajaran pendidikan anak usia dini yang bukan hanya sekedar belajar; tetapi diiringi oleh kegiatan bermain yang menyenangkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pengalihan tanggung jawab proses pembelajaran anak usia dini adalah oleh orang tua selama era COVID-19 terbagi dalam dua kategori yakni: *Pertama*, kendala proses pembelajaran berupa: 1) pembelajaran oleh guru 2) implementasi perencanaan pembelajaran oleh orang tua, 3) proses pembelajaran yang dilakukan di rumah oleh orang tua, 3) dan kendala proses evaluasi. *Kedua* kendala lingkungan berupa: 1) Sarana bermain, 2) Alat permainan edukasi.

Proses Pembelajaran oleh Guru

Pada era COVID-19 hampir semua guru mengalami kendala proses pembelajaran secara luring. Tetapi yang paling merasakan dampak pembelajaran ini adalah guru dan peserta didik dari satuan pendidikan anak usia dini. Permasalahannya bukan hanya pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru; melainkan pada karakteristik anak usia dini yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan dan pendampingan yang langsung oleh guru maupun oleh orang tua. Untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran luring; guru membuat perencanaan dan evaluasi pembelajaran sederhana yang diberikan kepada orang tua dengan harapan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing orang tua di rumah.

Perencanaan yang dibuat walaupun sederhana masih mengedepankan prinsip pembelajaran untuk anak usia dini yang merupakan anak pada usia keemasan. Demikian juga dengan evaluasi yang diberikan, masih berbasis pada progres perkembangan peserta didik. Pada kenyataannya, walaupun guru sudah menyiapkan perencanaan dan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua di rumah, tetapi pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan oleh orang tua di rumah dengan berbagai alasan. Kendala yang dihadapi oleh orang tua terkait dengan penjelasan berikut.

Pembelajaran oleh Orang Tua

Proses pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini sama dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan lainnya yang diawali oleh adanya perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kendala perencanaan diatasi oleh guru dengan mendesain rencana pembelajaran yang sederhana dan diberikan kepada orang tua, untuk diimplementasikan di rumah, dengan memperhatikan prinsip belajar pada anak usia dini sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2012), bahwa pembelajaran pada anak usia dini adalah belajar sambil bermain untuk pengembangan aspek sosial, bermain dengan benda dan bermain peran. Implementasi rencana pembelajaran sederhana ini tidak dapat dilakukan oleh orang tua di rumah, karena orang tua memiliki beberapa kendala.

Hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan perencanaan pembelajaran yang didesain oleh dan harus dilakukan oleh orang tua di rumah, dengan tetap menganut prinsip belajar sambil bermain tidak dilaksanakan oleh orang tua. Hal ini yang disebabkan oleh beberapa kendala. Dari hasil survei yang dilakukan ditemukan bahwa 98 persen orang tua mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran berdasarkan rencana sederhana yang diberikan oleh guru. Orang tua memberikan alasan tidak terlaksananya rencana sederhana yang diberikan oleh guru tersebut; karena

ketidaktahuannya tentang prinsip bermain sambil belajar. Orang tua cenderung mengabaikan rencana pembelajaran yang diberikan oleh guru, karena mereka merasa tidak memahami bahwa dalam bermain terdapat beberapa pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung kepada anak-anaknya. Dikemukakan oleh orang tua bahwa mereka tidak menyadari bahwa belajar sambil bermain bersifat *voluntir* yang memberikan manfaat secara berkesinambungan dalam perkembangan aspek kognitif, psikomotorik dan afeksi anak.

Alasan kedua yang menjadi kendala adalah alasan waktu, orang tua yang terbiasa menitipkan anaknya pada satuan pendidikan anak usia dini beberapa di antaranya adalah orang tua memanfaatkan waktunya untuk “bekerja”. Tiadanya pembelajaran luring di sekolah menjadikan beban baru bagi orang tua. Di satu sisi mereka mengalami ketakutan terhadap penularan COVID-19 terhadap anak-anaknya sehingga para ibu yang biasa “*nyambi*” bekerja pada saat anak-anaknya mengikuti pembelajaran luring pra COVID-19, tidak atau berhenti bekerja saat COVID-19. Hal ini berdampak pada aspek ekonomi keluarga.

Alasan ketiga adalah ketidakpahaman para orang tua untuk melakukan evaluasi, guru tidak memahami cara melaporkan perkembangan anak dalam bentuk narasi seperti yang rencanakan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran sederhana yang dibagikan oleh guru. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keragaman pendidikan orang tua, yang memang secara substansial tidak memahami penilaian pembelajaran.

Lingkungan dan APE

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran di rumah pada satuan pendidikan anak usia dini adalah kendala lingkungan berupa tidak tersedianya sarana dan alat permainan edukatif. Ketidaktersediaan lingkungan bermain dan alat permainan edukatif, mempengaruhi pemberian stimulasi perkembangan anak,

baik dalam perkembangan fisik maupun psikis. Penggunaan alat permainan edukatif dapat berpengaruh pada aspek psikis berupa perkembangan aspek kognitif, sosial emosional, agama dan moral, serta bahasa. Sementara pengaruh perkembangan fisik berupa perkembangan motorik, fisik motorik, yang semula dilakukan dan dipantau oleh guru, kini tidak dapat dilakukan mengingat pembelajaran dilakukan di rumah. Ketika pembelajaran di rumah 90 persen orang tua mengeluhkan tidak tersedianya lingkungan pembelajaran di rumah maupun alat permainan edukatif, sehingga pembelajaran yang sudah direncanakan guru yang menyertakan adanya alat permainan edukatif tidak dapat dilaksanakan.

Demikian beberapa kendala pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini di era COVID-19. Beberapa kendala tersebut patut direfleksikan sebagai bahan perumusan regulasi yang mengatur pembelajaran pada era darurat yang mungkin saja akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

**) Dr. St. Nurbaya, M.Si., M.Hum., Anggota Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman 2020-2025*

Pembelajaran di Saat Pandemi COVID-19

Oleh: Drs. Suyono, M.Pd.

Musibah COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Dunia pendidikan yang juga ikut merasakan dampaknya. Satu sisi bagaimana agar semua warga bisa selamat dari musibah ini dan selalu tetap sehat; tetapi di sisi lain bagaimana agar proses pendidikan di sekolah tetap bisa berjalan. Untuk itu, pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidik dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovatif dengan memanfaatkan media daring (*online*). Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat *personal computer* (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan Internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti *WhatsApp* (WA, aplikasi *zoom* ataupun media lainnya) sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Pendidik pun dapat memberi tugas terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan kepada peserta didik.

Keadaan COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, di bidang pendidikan. Di mana seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK sampai jenjang Pendidikan Tinggi

dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring (*online*). Pendidik yang semula beranggapan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan Internet tidak bisa dilaksanakan; tetapi dengan keadaan yang memaksa maka para pendidik harus belajar dan melaksanakannya. Ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum terpenuhinya delapan standar pendidikan di semua sekolah.

Berbagai aplikasi media pembelajaran pun sudah tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9/2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar. Pihak swasta pun menyuguhkan bimbingan belajar *online* seperti ruang guru, dan lainnya. Akses-akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan. dalam peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan juga tenaga kependidikan.

Masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, dalam pemanfaatan teknologi seiring dengan Revolusi Industri 4.0, maupun Tri Pusat Pendidikan benar-benar berfungsi termasuk orangtua sebagai mentor. Harapannya, pasca-pandemi COVID-19, kita menjadi terbiasa dengan sistem ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan.

Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik termasuk orang tua. Terutama bagi pendidik, dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis (mental).

Terlebih bagi orangtua yang *work from home* (WFH), harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih

usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi pemanfaatan media belajar, seperti laptop, gadget, dan lainnya.

Terutama anak usia dini hingga sekolah menengah belum merata ketersediaan fasilitas teknologi sebagai media belajar mengajar di sekolah. Meskipun sebagian besar sudah mengenal digital, sisi operasionalnya belum diterapkan optimal dalam media pembelajaran.

Bagi guru sekolah PAUD/TK, dituntut sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitasnya. Fasilitas video, *voice note*, dan *YouTube* dapat dijadikan media pembelajaran. Namun perlu pendampingan penuh dari orangtua. Anak Sekolah Dasar (SD) juga menggunakan media-media tersebut yang ditambah dengan penggunaan aplikasi *Zoom*. Bukanlah hal yang mudah, karena anak belum bisa mengoperasikannya secara mandiri. Ini semua membutuhkan inovasi dari pendidik agar peserta didik tidak jenuh, tanpa menghilangkan poin capaian pembelajaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI menginisiasi program Belajar dari Rumah yang ditayangkan di TVRI. Program Belajar dari Rumah mulai tayang di TVRI sejak 13 April 2020, dimulai pukul 08.00 WIB. Pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan dari langkah Kemdikbud RI menyediakan sarana yang bisa dipakai oleh para siswa/i untuk melaksanakan “Belajar dari Rumah” selama pandemi COVID-19. Program ini ditujukan kepada para peserta didik jenjang TK/PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Program Belajar dari Rumah di TVRI itu sebagai bentuk upaya Kemdikbud RI membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan di masa darurat COVID-19. Khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, secara ekonomi maupun letak geografis.

Kondisi nyata yang ada di masyarakat program-program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI tidak diikuti oleh sebagian besar masyarakat maupun para pendidik. Salah satu penyebabnya karena waktu jam tayang TVRI yang tidak pas, karena saatnya orangtua peserta didik sedang bekerja.

Proses pembelajaran dengan sistem daring ini banyak dikeluhkan oleh orang tua peserta didik antara lain: besarnya biaya untuk kuota internet, daerah-daerah tertentu susah akses jaringan internet (sinyal), termasuk perlunya pengawasan orang tua yang lebih bagi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Saran yang dapat kami sampaikan antara lain:

1. Salah satu program yang bisa diterapkan di jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yaitu dengan memadukan sistem daring dan luring yaitu dengan membuat modul hibrida di mana para peserta didik bisa belajar sendiri dengan dibantu orang tua di rumah
2. Sedang untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/TK dengan memanfaatkan video karya pendidik dengan pendampingan orang tua.
3. Peningkatan kompetensi pendidik terkait dengan pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran
4. Peningkatan sarana prasarana pendukung pembelajaran di saat pandemi COVID-19
5. Pemberian bantuan pulsa/quota Internet untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu.

**) Drs. Suyono, M.Pd., Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman*

Refleksi Pengalaman Pendidikan Jarak Jauh Selama Pandemi COVID-19

Oleh: Drs. Buchori

Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Gubernur DIY memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana COVID-19 hingga 30 November 2020. Selama 8 bulan lebih sejak Maret 2020 diberlakukan kondisi tanggap darurat COVID-19, anak – anak terpaksa belajar di rumah dengan sistem *online*, sebuah sistem yang terpaksa dilakukan karena pandemik. Semua itu terpaksa dilakukan untuk melindungi siswa dari penularan COVID-19.

Adanya perpanjangan masa tanggap darurat COVID-19, secara otomatis pasti berimbas pada penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Sejumlah pemangku kepentingan pendidikan khususnya sekolah, segera merespon perpanjangan masa tanggap darurat dengan tetap melaksanakan pembelajaran *online*. Memang harus diakui bahwa pandemi COVID-19 membuat para pemangku kepentingan menyadari pentingnya proses digitalisasi/pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran di sekolah. Namun, karena sistem pembelajaran *online* terkesan dipaksakan (kurang persiapan), banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pendidikan. Mereka menilai bahwa pembelajaran *online* yang dilaksanakan saat ini sangat tidak efektif.

Penulis menyerap masukan, usulan, saran dan laporan dari para pemangku kepentingan antara lain: dari yayasan pengelola pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua siswa, guru dan siswa. Kebetulan selama 3 hari penulis berkesempatan hadir dalam acara pembinaan dan diskusi yang diikuti oleh kepala sekolah, pamong

taman kanak–kanak (TK), kelompok bermain (KB) di lingkungan ‘Aisiyah Cabang Kalasan berjumlah 90 orang.

Masukan, laporan, usulan, saran, serta evaluasi dari beberapa pihak dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mereka menilai bahwa pembelajaran *online*/daring/jarak jauh tidak efektif
2. Selama 8 bulan, sekolah melaksanakan pembelajaran *online* telah menimbulkan kebosanan/kejujenuhan yang dialami para siswa, serta beban berat bagi orang tua dalam mendampingi putra putrinya sangat dirasakan.
3. Ada keterbatasan sarana maupun akses internet di wilayah tertentu.
4. Pembelajaran dengan sistem *online* mengesampingkan pendidikan karakter yang merupakan program unggulan di Kabupaten Sleman.
5. Pembelajaran *online* dinilai tidak siap sehingga terkesan dipaksakan jika terus dilaksanakan dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas pendidikan.
6. Hasil belajar siswa tidak murni dari siswa yang bersangkutan
7. Kepala sekolah, guru, pamong taman kanak–kanak (TK), kelompok belajar (KB), sekolah dasar (SD), mendapat banyak keluhan dari orang tua tentang sulitnya mendampingi anak saat pembelajaran *online*.
8. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran dimasa pandemik.
9. Anak–anak usia SD, SMP memiliki mobilitasnya sangat tinggi selama masa pandemic justru banyak keluar rumah sehingga sulit dikontrol khususnya terkait dengan protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah melakukan 3 M (Menggunakan masker, Menghindari kerumunan, dan Mencuci tangan).

10. Banyak pihak mengusulkan agar pembelajaran tatap muka/luring, secara bertahap segera diberlakukan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pembelajaran di Masa Transisi

Berdasarkan hasil evaluasi, masukan, usulan, laporan serta saran berbagai pihak, maka perlu dipertimbangkan secara mendalam dengan alasan yang mendasar terkait pemberlakuan program pembelajaran baru di masa transisi dengan sistem tatap muka. Semua pihak harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini kemungkinan akan berlangsung lama di mana sampai dengan saat ini penyebaran COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum juga mereda. Akan sangat berisiko apabila pembelajaran tatap muka atau klasikal diberlakukan, kecuali dengan pembatasan yang amat ketat.

Pandemi COVID-19 tidak ada yang tahu kapan akan berakhir, sementara jika sistem pembelajaran *online* tetap dipaksakan; maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah bagi generasi masa datang. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah krusial sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah dengan “Program pembelajaran baru di masa transisi menggunakan sistem tatap muka dengan batasan – batasan dan persyaratan yang ketat”:

1. Bahwa program pembelajaran baru masa transisi adalah “gerakan serentak” yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
2. Perlu dilakukan pemetaan masalah di masing – masing sekolah untuk mengetahui apa sesungguhnya permasalahan yang dihadapi.
3. Diterbitkan Peraturan Bupati yang merupakan payung hukum yang berisi petunjuk pelaksanaan.
4. Diterbitkan surat edaran oleh Dinas Pendidikan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

5. Dilakukan ujicoba mulai dari tingkat Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Keterlibatan orang tua secara aktif khususnya dalam pengawasan putra-putrinya.
7. Pemberlakuan *social distancing* serta protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada kesan seolah-olah kegiatan belajar mengajar (KBM) normal.
8. Perlu dibentuk satuan petugas yang melibatkan instansi terkait, fungsinya untuk mengontrol pelaksanaan program secara ketat.
9. Perlu adanya sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan yang ada.
10. Demikian tulisan ini dibuat sekedar urun rembug dan bahan renungan dalam mengatasi problematika dalam pembelajaran di masa pandemi COVID- 19 di Kabupaten Sleman.

**) Drs. Buchori, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman*

***Master Plan* Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025 Pasca Pandemi COVID-19**

Oleh: Dr. John Suprihanto, M.I.M.

Pendahuluan

Tidak dipungkiri bahwa semua *stakeholder* di Kabupaten Sleman bersedia memaknai arti penting *master plan* pendidikan bagi seluruh warga Kabupaten Sleman. Beragam alasan untuk menempatkan *master plan* pendidikan memiliki arti penting dalam upaya menumbuhkembangkan pendidikan dalam artian luas di Kabupaten Sleman. Namun alasan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan bagian dari misi Kabupaten Sleman (yang sekaligus merupakan bagian Misi NKRI). Misi merupakan jawaban dari pertanyaan ‘*What do we stand for?*’ atau ‘*Why do we exist?*’

Dalam Pembukaan UUD 1945 diamanatkan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya UUD 1945 Pasal 31 (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara lebih khusus Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 (2) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dalam menyongsong pembangunan Indonesia 2020-2025, selain mendasarkan pada Misi NKRI, juga mutlak dibutuhkan Visi sebagai komitmen yang akan diwujudkan bersama. Visi merupakan

jawaban atas pertanyaan ‘*What the institution want to be in the future (the 5 years from now)*’. Akan menjadi organisasi (NKRI) seperti apa di masa depan, misalnya lima tahun ke depan?

Seusai terpilih kembali, Jokowi menyampaikan pidato bertajuk “Visi Indonesia” yang digelar di *Sentul International Convention Center*, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam. Pada pidato tersebut, Jokowi menekankan bahwa dalam kehidupan global seperti saat ini, berjalan dengan sangat dinamis. Fenomena global, menurut Jokowi penuh dengan perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan, yang sering jauh dari kalkulasi, yang sering jauh dari hitungan-hitungan. Dengan demikian, harus dicari sebuah model, nilai, dan cara baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang dihadapi, dengan inovasi-inovasi. Jokowi mengungkapkan, cara-cara lama harus ditinggalkan, baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Jokowi melalui visinya telah menyiapkan tahapan-tahapan besar, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan:

Menurut Jokowi, infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata.

2. Pembangunan sumber daya manusia;

Menurut Jokowi, awal mulainya dengan menjamin kesehatan ibu hamil-sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi *stunting*, ibu yang meninggal, serta angka kematian bayi harus diturunkan.

Bisa dipastikan pentingnya *vocational training*, pentingnya *vocational school*. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Melalui lembaga tersebut, nantinya pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

Diaspora yang memiliki talenta tinggi, akan diberikan dukungan oleh pemerintah agar dapat berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang akan mengurus manajemen talenta ini. Jokowi mengungkapkan, pemerintah nantinya akan mengelola talenta-talenta yang hebat dan diharapkan bisa membawa negara Indonesia bersaing secara global.

3. Investasi harus diundang seluas-luasnya

Jokowi mengatakan, bahwa tujuan mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Ia mengungkapkan, jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan dapat terbuka secara luas. Oleh karena itu, siapapun yang menghambat investasi harus dipangkas. Jokowi juga memastikan akan mengejar dan menindak bila perizinan berjalan dengan lambat, berbelit-belit, dan terjadi praktik pungutan liar.

4. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi, menurut Jokowi sangatlah penting. Salah satunya adalah reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah. Kunci dari reformasi birokrasi adalah kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin.

Bila pola pikir birokrasi tidak ada perubahan, Jokowi akan memangkas hal tersebut. Jokowi juga akan mencopot pejabat dari lembaga yang bila terlihat tidak efisien atau tidak efektif. Selain itu, Jokowi juga akan membubarkan apabila terdapat lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah.

5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

Menurut Jokowi, setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi. Selain itu juga memberikan manfaat untuk rakyat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan Misi NKRI urutan ke-3 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan Visi urutan ke-2, pembangunan sumber daya manusia; maka sudah saatnya merevitalisasi rencana induk (*masterplan*) pendidikan di Kabupaten Sleman untuk periode 2020-2025 selain untuk memfasilitasi bonus demografi juga untuk menyongsong serta mempersiapkan Indonesia Jaya 2045, khususnya di Kabupaten Sleman, DIY.

Pendidikan Abad XXI dan Era 4.0 dalam Pandemi COVID-19

Selanjutnya bahwa seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, pendidikan juga harus berkembang dan direvitalisasi. Kita telah memasuki Abad XXI, pendidikan Abad XXI dan pendidikan era 4.0 memiliki tuntutan tersendiri, termasuk di dalamnya era globalisasi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Informasi mengalir dengan deras, teknologi berkembang drastis, media semakin beragam, mengglobal

dan kompleks. Untuk itu sangatlah tepat dengan pernyataan bahwa Pendidikan Nasional Abad XXI bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya (BSNP, 2010).

Dalam menghadapi tantangan, peluang dan ancaman terhadap pendidikan Abad XXI dan pendidikan era 4.0; maka para *stakeholders* (terutama guru) perlu mengimplementasikan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, adaptif dan tanggap (KIAT). Model pembelajaran yang diterapkan harus mampu menumbuhkembangkan kompetensi siswa untuk memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, adaptif dan tanggap disertai kemampuan siswa berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengimplementasikan bagian praktek pembelajaran. Melalui model-model pembelajaran tersebut harus dikembangkan kemampuan literasi siswa baik yang berkaitan dengan literasi baca, tulis, numerasi, digital, finansial, sains, sosial, seni dan budaya. Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan juga harus mampu menumbuhkembangkan karakter siswa yang akhirnya turut serta membentuk insan yang berakhlak mulia. Semuanya itu, terutama bagi para *stakeholder* pendidikan sangat perlu disiapkan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menghadapi ancaman degradasi moral yang juga merupakan tantangan tersendiri khususnya bagi guru untuk membentuk siswa yang kompeten dan berakhlak mulia.

Di tengah perjuangan yang penuh dinamika mengembangkan model-model pembelajaran yang *smart* untuk menggapai tujuan tersebut, pandemi COVID-19 muncul dan merebak baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Dampak yang paling parah adalah bahwa semua kegiatan masyarakat tanpa terkecuali

tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Dampaknya sangat beragam, dari dikurangi sedikit, sedang sampai distop sama sekali. Termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan; yang sama sekali baik guru/dosen maupun siswa/mahasiswa tidak boleh masuk ke sekolah atau kampus sama sekali alias tidak ada pembelajaran yang luring atau tatap muka di seluruh Nusantara. Hal itu dimulai sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menerapkan belajar dari rumah pada akhir Maret 2020 dan sampai sekarang.

Kondisi-kondisi tersebut, selama delapan bulan terakhir sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menerapkan belajar dari rumah pada akhir Maret 2020 yang lalu, beragam fenomena yang menunjukkan ketimpangan pendidikan di negara kepulauan Indonesia. Ketimpangan pendidikan tersebut terjadi di berbagai daerah selain di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur maupun luar Jawa. Hal itu tampak jelas pada saat model pembelajaran harus dilakukan dengan luring. Kondisi siswa yang sangat beragam. Misalnya, ada keluarga-keluarga yang tak punya ponsel sama sekali; ada juga yang bergantian memakai satu ponsel milik orangtuanya. Selain itu, sekalipun mudah mendapatkan akses internet dan punya ponsel, banyak keluarga yang kerepotan membeli kuota, di saat ekonomi keluarga tergulung pagebluk atau pandemi COVID-19.

Kasus SD Negeri Sariharjo dan SD Negeri Gentan, Ngaglik Sleman.

Berdasarkan penuturan dari Kepala SD Negeri Sariharjo, berbagai kendala dan hambatan yang ditemui sekolah selama Pembelajaran dari Rumah (BDR) adalah sebagai berikut:

Pertama, penjelasan dari sisi siswa dan orang tua siswa. Tidak semua peserta didik memiliki HP Android, misalnya untuk di SD Negeri Sariharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta dari siswa sejumlah 92, terdata hanya 10 ~~pesen~~ ^{person} memiliki dan dari 10 person tersebut; 90

persen dibawa oleh orangtua bekerja. Peserta didik kurang bisa fokus belajar secara daring karena kesibukan orangtua masing-masing. Selain itu, kemampuan siswa dalam menggunakan android untuk pembelajaran daring sangat rendah. Hal itu disebabkan kurangnya pendampingan orangtua karena mereka sibuk bekerja di luar rumah. Selanjutnya, siswa cenderung bersikap pasif jika ada masalah yang dihadapi dalam pembelajaran lewat *group WA*. Dalam kondisi di rumah dengan segala keterbatasannya; maka berakibat pada meningkatnya tingkat kebosanan anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Demikian juga, keterbatasan alat komunikasi melalui WA dan video juga berakibat anak-anak kurang mampu memahami materi yang dijelaskan guru dengan baik.

Di sisi lain, dalam pembelajaran praktik di rumah memiliki keterbatasan peralatan yang digunakan dan ketidaktahuan penggunaannya. Sedangkan dari pihak orang tua yang pendidikannya relatif rendah dan belum terbiasa untuk diikutsertakan dalam proses pembelajaran di sekolah sangat wajar apabila mereka kurang memiliki respon terhadap pembelajaran lewat WA dalam BDR. Kurang responsif tersebut termasuk masih ada beberapa orangtua yang tidak mengambil tugas ke sekolah sesuai jadwal yang telah disepakati dan juga keterbatasan paket data orangtua berdampak menghambat informasi yang harus diterima.

Penjelasan ke dua dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa kemampuan guru dalam pembelajaran semi daring masih rendah. Selama ini proses pembelajaran dilakukan secara konvensional tatap muka di kelas dengan alat peraga standar. Tiba-tiba datang pandemi COVID-19 memaksa proses pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan daring. SD Negeri Sariharjo dengan segala keterbatasannya selama ini sangat minim memiliki perangkat pembelajaran daring seperti RPP, bahan ajar via video PJJ, dan evaluasi PJJ yang belum optimal. Selain itu memiliki keterbatasan waktu dan sarana prasarana untuk

membuat video pembelajaran sendiri. Untuk itu, guru masih memanfaatkan video pembelajaran dari *YouTube* disertai dengan tugas-tugas seperti LKS dengan sistem barter. Orang tua diminta mengambil tugas sambil menukarkan atau mengembalikan tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa. Namun, seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa ada beberapa orang tua siswa yang lupa atau lalai tidak atau terlambat mengambil tugas siswa; yang berarti tidak menyerahkan atau terlambat mengembalikan tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa. Kelemahan tersebut masih ditambah dengan adanya tenaga guru yang masih kurang dalam pengoperasian teknologi informasi.

Penjelasan ketiga terkait dengan sumber daya yang dimiliki sekolah. Dalam sistem pembelajaran dengan daring, kebutuhan utama adalah jaringan akses internet, namun kenyataannya bahwa di SD Negeri Sariharjo jaringan akses internet masih lambat. Selain itu masih adanya keterbatasan kuota pribadi guru yang terbatas dan kekuatan sinyal rendah di domisili tenaga kependidikan. Dengan menyadari kondisi yang serba terbatas, terutama pada masa pandemi COVID-19; kepala sekolah bersama dengan guru dan tenaga kependidikan berprinsip bahwa tidak boleh ada siswa yang terkorbankan sehingga tidak mampu melanjutkan belajar. Kombinasi teknologi komunikasi yang ada dimaksimalkan dengan mengandalkan sistem barter walaupun masih disertai adanya orangtua yang lupa atau terlambat mengambil dan mengembalikan tugas-tugas siswa.

Sedangkan berdasarkan penuturan dari Kepala SD Negeri Gentan, berbagai kendala dan hambatan yang ditemui sekolah selama Pembelajaran dari Rumah (BDR) adalah sebagai berikut: Secara keseluruhan, proses pembelajaran dengan kombinasi daring dan luring berjalan lancar. Siswa yang tidak memiliki HP hanya 2 anak. Solusi pertama, untuk 2 siswa tersebut bisa bergabung dengan HP tetangga sehingga memudahkan memperoleh informasi dari

sekolah. Solusi ke dua, mengambil tugas dalam bentuk *hardcopy* ke sekolah untuk dikerjakan di rumah dan setelah selesai dikembalikan ke sekolah. Solusi ke tiga, kombinasi pembelajaran daring (60 persen) dan luring (40 persen). Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran luring yaitu orangtua mengambil tugas ke sekolah untuk dikerjakan oleh siswa di rumah dan setelah selesai kembali diantarkan ke sekolah oleh orang tua. Secara global, pada masa pandemik COVID-19 ini kondisi SD Negeri Gentan memang masih memiliki keterbatasan, namun jumlah siswa dan kondisinya relatif lebih baik dibandingkan dengan SD Negeri Sariharjo.

Masterplan Pendidikan Komprehensif, Terpadu dan Sinergi Pasca COVID-19

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari dampak pandemik COVID-19 dan tuntutan pendidikan Abad XXI dan era 4.0; maka *Masterplan Pendidikan Kabupaten Sleman* perlu direvitalisasi, dikembangkan dan dijabarkan serta dikongkritkan untuk memandu para *stakeholders* pendidikan di Kabupaten Sleman untuk melakukan pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2025.

Salah satu kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan di era otonomi yang luas adalah dengan merevitalisasi dan menyusun *masterplan* pendidikan yang terintegrasi dan sinergi dengan sektor lain pasca COVID-19, sehingga akan terwujud pembangunan yang multisektor. Agar peningkatan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terkoordinasi; maka perlu dirumuskan *masterplan Pendidikan di Kabupaten Sleman* yang sudah diadaptasikan dengan adanya pandemi COVID-19. Pada gilirannya, *masterplan* pendidikan ini dapat dijadikan sebagai panduan yang adaptif untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan pendidikan secara lebih cepat dan tepat serta dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik kepada para

pelaku pembangunan pendidikan, baik pemerintah daerah, swasta, komunitas maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujud proses pembangunan pendidikan yang terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lainnya.

Hasil yang diharapkan penyusunan *Masterplan* Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025 adalah: 1. Menyusun dokumen Rencana Induk (*Masterplan*) Pembangunan Pendidikan tahun 2020-2025 sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dokumen tersebut berfungsi untuk memberikan arah kebijakan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. 2. Memberikan pedoman dan arah serta koordinasi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sleman yang sedemikian rupa sudah disesuaikan dengan tuntutan protokol kesehatan dan kombinasi teknologi informasi tepat guna dalam proses pembelajaran.

Alur rencana kerja penyusunan *Master Plan* Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025 idealnya adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji tentang tuntutan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sleman 2020-2025. 2. Kondisi ideal pendidikan di Kabupaten Sleman 2020-2025. Hal ini mengacu pada tuntutan masa depan, Visi dan Misi serta tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Sleman. 3. Mengkaji kondisi *existing* pendidikan Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2019/2020. 4. Strategi pencapaian kondisi yang ideal, 5. Kebijakan dan rencana implementasi. 6. Rencana Monitoring dan Evaluasi. Yang semuanya harus diadaptasikan secara bertahap dengan kondisi pandemik COVID-19 menuju kepada *new normal*.

Sesuai dengan Visi kedua bagian pertama yaitu menjamin kesehatan ibu hamil-sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia

yang unggul ke depan. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi *stunting*, ibu yang meninggal, serta angka kematian bayi harus diturunkan. Untuk itu, dalam *Masterplan* Pendidikan dalam tahap awal dan dini ini harus diberi catatan dan perhatian khusus. Adapun hasil yang akan dan diharapkan diperoleh berkaitan dengan layanan baik kepada ibu hamil maupun anaknya dalam periode-periode berikut: Pre-natal: SPM plus *service excellence*; Partus – 0 bulan; Tahun 1: Bulan 01 – 12; Tahun 2: Bulan 13 – 24; Tahun 3: Bulan 25 – 36; Tahun 4: Bulan 37 – 48; dan Tahun 5: Bulan 49 – 60.

Masih dalam Visi kedua bagian pertama; bahwa perlu diidentifikasi sejauh mana layanan Pendidikan PAUD dan TK yang berkualitas (ada berapa persen); Secara kuantitas, PAUD dan TK di Kabupaten Sleman mencukupi kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak-anak usia dini (APK PAUD & TK: ada berapa persen); (Guru PAUD & TK bersertifikasi: ada berapa persen). Secara kualitas, mengungkapkan permasalahan PAUD & TK di Kabupaten Sleman. Misalnya ditengarai adanya peran serta orang tua/wali anak dalam pengembangan PAUD & TK dan pendidikan sejenis masih relatif rendah. Dengan adanya pandemi COVID-19, orang tua siswa ‘dipaksa rela’ untuk jauh lebih berperan aktif mendampingi proses pembelajaran siswa. Namun tetap perlu dikaji faktor-faktor apa saja dan mengapa peran orangtua/wali murid masih relatif rendah. Hal-hal semacam itu perlu dicari jawabannya untuk dicari dan diformulasi pemecahan atau solusinya.

Selanjutnya identifikasi juga dilakukan terhadap baik kuantitas maupun kualitas layanan Pendidikan Dasar SD/SDLB/MI dan Program Kesetaraan Paket A yang 1-3 tahun terakhir dilaksanakan. Hal itu penting untuk mengetahui baik kemajuan maupun keterbatasan pendidikan dasar (SD/MI dan Paket A) di Kabupaten Sleman, terutama terkait dengan APK dan APM. Selain itu juga perlu mengukur kualitas pendidikan dasar melalui angka disparitas SD/SDLB/MI Program Kesetaraan paket A. Akan lebih lengkap apabila

dalam *Masterplan* Pendidikan dapat mengindikasikan pemerataan distribusi guru terutama guru SD/SDLB/MI yang berbeda di setiap Kecamatan, termasuk kualitas guru yang berdedikasi tinggi. Perlu dicermati data yang menggambarkan rasio ideal guru-siswa di Kabupaten Sleman. Sedangkan SD/SDLB/MI pedesaan, terutama pada aspek sarana dan prasarana yang umumnya cenderung minimal, masih kurang ideal. Demikian juga berbagai data dan informasi selain dari seluruh PAUD/TK/SD/SDLB/MI juga seluruh SMP di Kabupaten Sleman diharapkan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pengembangan pendidikan menuju SDM Unggul.

Beberapa Usulan Program untuk SDM Unggul Pasca Pandemi COVID-19

Berikut ini beberapa usulan baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tuntutan pendidikan Abad XXI dan era 4.0 serta pasca pandemik COVID-19 yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun *Masterplan* Pendidikan Kabupaten Sleman 2020-2025:

1. Kerjasama dengan PTN/S Mengatasi *Stunting*

Dalam penyusunan *Masterplan* Pendidikan 2020-2025 dilakukan oleh *leading sector* bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman bekerjasama dengan seluruh PTN/S di wilayah Sleman dan sekitarnya untuk saling melengkapi dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini terutama ditujukan ke kelompok pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, khususnya kelompok ibu hamil sampai dengan persalinan, usia emas anak di bawah satu tahun, anak dibawah dua tahun, anak di bawah tiga tahun, dan anak di bawah lima tahun (SPM dan Gizi Berimbang di usia emas dalam upaya mengatasi masalah *stunting*).

Pendidikan Karakter melalui Ekstrakurikuler Ekonomi Kreatif

Kita masih sepakat bahwa pendidikan karakter di sekolah belum optimal. Seiring dengan meningkatnya APK dan APM pendidikan di Kabupaten Sleman, serta peningkatan intelektual, belum diikuti dengan peningkatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki fungsi sentral mendampingi peningkatan kualitas intelektual pendidikan di Kabupaten Sleman. Untuk mendukung pendidikan karakter perlu banyak *stakeholder* yang terlibat; Pemerintah Daerah, orang tua wali, masyarakat lingkungan sekolah dll. Tata kelola pendidikan yang transparan, *fairness* dan akuntabel perlu ditingkatkan. Selain itu, dibutuhkan keteladanan dari seluruh *stakeholders* disertai berbagai nilai-nilai dasar karakter yang dimasukkan dalam kurikulum maupun di ekstrakurikuler ekonomi kreatif. Antara lain dapat dilaksanakan melalui tema umum: Pola Manajemen menumbuhkembangkan *entrepreneur* pemula yang berkarakter melalui pendidikan, berbasis ekstrakurikuler ekonomi kreatif. Secara lebih khusus, Strategi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Aquaphonik berbasis *me-recycle* air wudhu; Pembuatan *Ecobrick*; Pengelolaan Bank Sampah SD, SMP, (SMA/K); Pengomposan dengan Biopori; Pengomposan dengan Cacing Tanah; Pengomposan dengan Komposter; beternak maggot, dll. untuk menambah asupan ikan lele secara alami (organik) dan ramah lingkungan.

Menumbuhkembangkan perilaku suka menulis dan *subsurveillance* kesehatan di sekolah.

Kita juga harus menyadari bahwa seorang anak mempunyai tingkat kecerdasan dan bakat, serta minat yang berbeda-beda. Salah satu penilaian yang memegang peranan penting adalah apakah anak mempunyai minat yang tinggi terhadap perilaku suka menulis? Berbagai pendapat menyatakan bahwa menulis dan membaca adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan; dan dengan menulis, kreativitas anak akan semakin berkembang. Menurut Gary

Provost sebagaimana dikutip Tony Tedjo: Yang dibutuhkan dari seorang penulis adalah 10 persen bakat, sisanya 90 persen adalah kemauan dan latihan.”

Menulis jurnal dapat dimulai sejak SD kelas I dan dilanjutkan sampai dengan kelas VI (enam). Masing-masing siswa diberi buku tulis berlabel nama masing-masing dan disimpan di sekolah. Setiap pagi sebelum mata pelajaran dimulai, guru kelas akan membagi buku tersebut sesuai dengan nama masing-masing (presensi/absensi). Dengan setiap hari (sekitar 10 menit) menulis jurnal kegiatan harian yang dilakukan oleh siswa; maka tidak menutup kemungkinan upaya menumbuhkembangkan perilaku suka menulis di kalangan siswa dapat meningkat secara signifikan. Budaya menulis menjadi warna tersendiri di lingkungan sekolah. Prospek yang diharapkan dengan melalui kegiatan menulis jurnal siswa nantinya dapat mengembangkan tulisan menjadi sebuah cerita yang menarik, opini mengenai hal-hal yang banyak dibicarakan, puisi dan lain sebagainya sesuai dengan imajinasi dan kreativitas siswa. Hasil karya siswa dapat dibingkai dalam bentuk majalah dinding kelas/sekolah, buletin maupun buku. Dengan pola yang lebih kurang sama, hal tersebut dilanjutkan ke tingkat SMP (SMA maupun SMK). Puncak kegiatan menulis jurnal adalah diadakannya perlombaan majalah dinding antar Sekolah di *level* Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan kegiatan menulis jurnal masing-masing kelas, sekolah baik SD, SMP, (dan SMA/K) dapat mendata khususnya mengenai presensi/absensi siswa yang tidak masuk pada hari itu. Setiap siswa yang tidak masuk sekolah secara bertahap mengisi formulir tentang alasan tidak masuk sekolah. Dalam formulir tersedia dua kelompok isian alasan tidak masuk sekolah. Pertama, isian alasan acara keluarga (cukup dicontreng) dan kedua, isian alasan sakit (beberapa pilihan: cukup dicontreng). Dari masing-masing kelas dikirim ke UKS dan direkap sehingga secara keseluruhan dari siswa yang absen dapat diketahui alasan yang terbanyak, misalnya jenis

sakit yang terbanyak. Selanjutnya dalam waktu bersamaan (setiap pagi) seluruh sekolah SD, SMP (SMA/K), diupayakan PAUD dan TK oleh orangtua siswa di Kabupaten Sleman akan mengirim data tersebut ke Dinas Kesehatan (Cc. ke Puskesmas masing-masing). Untuk implementasi program ini selain mitra yang sudah disebutkan terdahulu; akan sangat banyak melibatkan peran LPPM PTN/S, khususnya mahasiswa KKN yang bertemakan khusus pendidikan *level* PAUD, TK, SD, SMP, (dan SMSA/K).

Pengembangan *Integrated Mix Farming* dan Tanaman Sayuran Keluarga

Dalam pembudidayaan ikan lele menggunakan air yang berasal dari sisa air wudhu yang digunakan di mushala sekolah. Sisa air wudhu yang telah digunakan untuk budi daya ikan lele dan tanaman kangkung masih menyisakan air yang berlimpah. Selanjutnya, sisa air tersebut dapat digunakan untuk menyirami budidaya tanaman lainnya selain aquaponik dengan kangkung. Sisa air tersebut bisa dimanfaatkan juga untuk menyiram tanaman hias di dalam pot di sekitar kolam lele atau *mix farming* (kolam ikan, tanaman sayuran dan sisa sayuran diberikan ke ternak kelinci).

Taman Surga atau tanaman sayuran keluarga merupakan pola menanam sayuran dalam bentuk pemanfaatan lahan (khususnya untuk daerah miring) di sekitar lahan SD, SMP, (disarankan SMA/K) maupun lahan di sekitar mushola dan masjid yang relatif kosong. Taman Surga akan sangat baik dikembangkan di sekitar kolam aquaponik sehingga memudahkan penyiraman dengan menggunakan air limpahan dari kolam. Tanaman yang di tanam di Taman Surga ini merupakan jenis tanaman yang hanya sekali tanam tanpa harus mengolah tanahnya namun secara periodik bisa memanen daun atau bunganya. Hal ini penting karena khusus tanah yang miring (misalnya di perbukitan) seharusnya tidak diolah (*didangir*: Jawa) Contoh tanaman yang dipilih: kelor, ketela (karet), katu, keningkir,

kluwih, kates (daun, buah, bunga, dll.), turi, bayam (gajah), tangkil (daun, biji, kulit, kembang), blimbing wuluh, nangka, sukun, mangga, dan lain-lain.

Penerapan *mix farming* bisa dilakukan dengan empat cara yaitu 1) secara alami berdasarkan kebiasaan petani setempat, 2) hanya tanaman tanpa hewan yang terlibat, 3) sistem pertanian campur antar tanaman dan hewan 4) sistem yang pada dasarnya berasal dari sumber daya alam dan tenaga manusia. Konsep *mix farming* dengan keterlibatan ternak dan tanaman merupakan alternatif potensial untuk mendukung pengembangan ternak di Indonesia (Aggara, 2017).

Penutup

Dengan tersusunnya *masterplan* pendidikan yang komprehensif, terpadu dan sinergi yang adaptif maka dapat dijadikan sebagai panduan untuk mendorong implementasi, memonitor dan mengevaluasi proses menumbuhkembangkan pendidikan secara lebih cepat dan tepat menuju SDM Unggul. Selain itu dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik kepada para pelaku pembangunan pendidikan, baik pemerintah daerah, swasta, komunitas maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujud proses pembangunan pendidikan yang komprehensif, terpadu, bersinergi dan saling mendukung satu sama lainnya. Berbagai bentuk kegiatan, program yang terkait dengan ekstrakurikuler tersebut memiliki muatan evolusi mental dalam menumbuhkembangkan karate siswa.

*) *Dr. John Suprihanto, M.I.M., Anggota Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman*

Dewan Pendidikan yang Sukses dan Menyukkseskan

Oleh: Akhmad Ritaudin, M.Pd.

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Apapun program pendidikan yang ditempuh merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Menurut Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya program penjaminan mutu pendidikan untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan tersebut.

Mutu pendidikan sangat tergantung dari program-program pendidikan yang direncanakan dan proses pelaksanaan dari program tersebut. Mutu dan pelayanan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang baik, kreatif, inovatif, kolaboratif, komunikatif, dan siap menghadapi kehidupan Abad XXI yang penuh tantangan. Pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa. Bila bangsa kita memiliki mutu pendidikan yang baik, perekonomian dan segala aspek pemerintahan bisa dijalankan dengan baik pula. Pendidikan bermutu dapat terwujud dengan adanya kerjasama dan peran dari berbagai pihak. Salah satunya adalah peran Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan organisasi di bidang Pendidikan yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas dan

mutu pendidikan. Komitmen dan tujuan Dewan Pendidikan di antaranya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk penentuan sebuah kebijakan dan program pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, untuk menciptakan transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk penentuan sebuah kebijakan dan program pendidikan. Aspirasi dan pendapat dari masyarakat dijadikan dasar Dewan Pendidikan untuk mengajukan rekomendasi berupa kebijakan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Dewan Pendidikan dituntut bekerja secara profesional sesuai harapan dari masyarakat. Dengan ketelitian dan kebijaksanaan rekomendasi yang diusulkan ini dapat menjadikan harapan dan aspirasi dari masyarakat tentang pendidikan dapat terwujud dan direalisasikan di masyarakat. Seperti yang kita alami saat ini di masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar mengalami sebuah adaptasi baru yaitu pembelajaran jarak jauh. Sebuah proses pembelajaran dengan model dan strategi yang baru bagi siswa, guru, orang tua, maupun para pemangku kepentingan. Pada situasi ini Dewan Pendidikan dituntut untuk melaksanakan tugas menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk penentuan sebuah kebijakan dan program Pendidikan yaitu pembelajaran jarak jauh.

Dewan Pendidikan harus dapat menampung keluhan dan harapan dari masyarakat berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dapat menyalurkan aspirasi sebagai bentuk pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat tentunya juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan juga gugus tugas. Kesulitan yang dihadapi orang tua saat PJJ contohnya pendampingan belajar pada putra/ putrinya tentang materi-materi yang tidak dikuasai,

selain itu alat komunikasi berbasis IT yang belum semua orang tua punya. Keadaan seperti ini yang harus dipecahkan bersama antara pihak sekolah, komite, pemangku kepentingan, Dewan Pendidikan dan juga pihak yang lainnya.

Dengan memberikan solusi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, secara tidak langsung Dewan Pendidikan ikut melaksanakan tanggung jawab dan peran serta aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan selalu ikut aktif dan melihat berbagai sudut pandang kebutuhan dan kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan dan harapan dari masyarakat ditampung dan diapresiasi untuk dijadikan bahan rekomendasi demi terpecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selama ini masyarakat belum mengenal lebih dekat dengan kehadiran Dewan Pendidikan. Untuk itu, mari sebagai Dewan Pendidikan lebih dekat lagi dengan masyarakat untuk hadir secara langsung melihat harapan dan kesulitan yang dialami sekolah-sekolah dalam menjalankan pendidikan. Selain itu, sebagai anggota Dewan Pendidikan harus siap mengawal dan memantau kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Dewan Pendidikan juga ikut berperan dalam menciptakan transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. transparan dalam hal ini adalah penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Adapun akuntabel berarti bahwa Dewan Pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya sesuai aturan. Sedangkan demokratis mempunyai makna bahwa dalam proses melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Pendidikan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan untuk kepentingan bersama.

Peran Dewan Pendidikan bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun peran Dewan Pendidikan adalah pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendukung

baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Selain itu, sebagai mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan peran tersebut, anggota Dewan Pendidikan memiliki fungsi yaitu ikut mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi berikutnya anggota Dewan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, fungsi dari Dewan Pendidikan adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan evaluasi, pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Saat kondisi pandemi COVID-19 ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, walaupun masih banyak hambatan, kekurangan, dan perlu adanya evaluasi untuk ke depan. Selama pandemi COVID-19, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman selalu melakukan koordinasi baik secara luring maupun daring, dan ikut memonitoring pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah. Koordinasi yang selama ini dilakukan melalui *zoom* untuk menjalankan peran dan

fungsi. Koordinasi tersebut salah satunya membahas masukan dari masyarakat melalui *google form* yang diedarkan melalui daring. Hasil dari masukan para guru, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan dianalisis bersama untuk disusun sebuah rekomendasi pendidikan yang tujuan akhirnya untuk kepentingan pelayanan peningkatan mutu pendidikan. Koordinasi yang dilakukan Dewan Pendidikan tentunya selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan juga pemangku kepentingan yang lain.

Tak ada gading yang tak retak. Dari peran dan fungsi yang sudah Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman jalankan, tentunya masih banyak kekurangan. Kami selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman selalu berproses dan evaluasi diri untuk dapat menjangkau tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kami. Saran dan masukan yang membangun, sangat kami tunggu sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Harapan ke depan mutu pendidikan semakin meningkat dan lebih baik lagi. Kami selalu semangat untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan yang “sukses dan menyukseskan”.

*) *Akhmad Ritaudin, M.Pd, Anggota Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman*

Strategi Adaptasi menuju Tata Normal Baru bagi Siswa SD Kelas Rendah di Masa Pandemi COVID-19

Oleh: Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si.

Kelompok anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan penularan COVID-19, namun kurang mendapatkan perhatian yang meluas. Ketika pemerintah mulai akan membuka sekolah di pertengahan Juli, mulailah para orang tua dan pemerhati anak-anak mulai menyampaikan kekhawatiran tersebut. Hal ini bisa dipahami karena daya tular virus COVID-19 tinggi. Akhirnya kebijakan *stay at home* hampir di seluruh dunia berlangsung. Tujuannya agar membatasi pergerakan sosial dan kerumunan sehingga memutus mata rantai virus tersebut. Pandemi COVID-19 ini, paling tidak dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu tahap tanggap darurat (disrupsi), tahap adaptasi (pembiasaan), dan tahap tata normal baru.

Tahap Pertama: Tanggap Darurat

Dalam tahap tanggap darurat pandemi COVID-19, banyak perilaku yang biasa dilakukan terdisrupsi. Strategi di rumah saja untuk bekerja, belajar, dan beribadah pada dasarnya untuk dapat menjaga jarak aman dan jaga jarak fisik. Salah satu dampaknya adalah sekolah ditutup dan para siswa belajar dari rumah, dari proses pembelajaran di kelas berpindah ke pembelajaran secara *online*.

Pembelajaran secara *online*, sebenarnya belum didukung oleh kurikulum *online* sejauh pengetahuan penulis. Jika pembelajaran di tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi, masalahnya tidak sekompleks siswa SD, khususnya kelas rendah yaitu kelas 1

sampai 3. Bisa dibayangkan, dalam kehidupan keseharian, siswa SD kelas rendah, sudah biasa menggunakan ponsel cerdas untuk keperluan pertemanan atau menjawab soal ujian di sekolah. Tetapi untuk belajar secara akademik, pastilah menjadi sebuah tantangan baru.

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran secara *online* di rumah untuk siswa kelas rendah, penulis melakukan wawancara beberapa guru dari SD dan orang tua di daerah Yogyakarta.

Ponsel Cerdas milik Orangtua

Tantangan pertama, tidak setiap anak memiliki ponsel cerdas sendiri. Sebagian besar milik orang tua yang digunakan sebagai sarana belajar *online*. Problemanya jika orang tua bekerja di luar rumah dan ponsel cerdasnya dibawa, maka anak harus menunggu kedatangan orang tua untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Tantangan kedua, spesifikasi ponsel cerdas yang dimiliki juga beragam. Sebulan pertama, ketika tugas-tugas dikirim dengan format video, ponsel cerdas guru dan siswa, sebagian macet dan harus direset kembali, praktis semua data hilang. Akhirnya, tugas diminta untuk dikirim melalui foto saja.

Literasi Digital Orangtua Terbatas

Para kepala sekolah pada umumnya memberikan kebebasan pada guru dalam penggunaan aplikasi *online*. Tetapi karena orang tua terbatas literasi digitalnya, maka pilihannya pada WAG. Ketika guru menerapkan *google form* untuk ujian, sebagian orang tua harus diberi panduan dulu oleh guru.

Sementara ketika guru menggunakan media yang interaktif seperti *google meet*, *google classroom* dan *zoom*, sekali lagi sebagian orang tua masih terkendala. Akhirnya, kembali lagi WAG. Hal ini

berlangsung di sekolah-sekolah dengan literasi digital orang tua yang terbatas.

Tetapi di sekolah-sekolah dengan orang tua yang memiliki literasi digital cukup baik, penggunaan media interaktif tidak masalah. Biasanya orang tua menyetting aplikasi, jika sudah jalan, anak jalan sendiri. Pada beberapa sekolah, pembelajaran interaktif ini berlangsung 2 kali seminggu selama 40 menit.

Guru Belajar Cepat Aplikasi Mengajar *Online*

Pada umumnya, para guru belum mempunyai pengalaman dalam mengajar *online*. Mereka tidak terpikir jika harus menggunakan media Internet. Walaupun sebenarnya, guru sudah biasa mengajar di kelas menggunakan konten *YouTube*. Guru-guru yang usia lebih muda belajar berbagai media pembelajaran *online* secara mandiri. Namun demikian, *upgrading* ketrampilan menggunakan aplikasi pembelajaran *online* perlu ditingkatkan juga.

Proses Pembelajaran Minimalis

Pada masa tanggap darurat ini, proses pembelajaran yang penting berjalan dulu dan menyenangkan bagi semua pihak. Biasanya, guru menyiapkan materi dan sekitar jam 7.00 WIB pagi, materi-materi tersebut diunggah.

Melihat situasi dan kondisi pada para siswa – di mana tidak semua siswa mempunyai ponsel cerdas sendiri, maka guru memberikan batas waktu pengiriman jawaban tugas sampai sore. Namun dalam praktiknya, pengiriman tugas bervariasi, ada yang cepat merespons (pukul 09.00 WIB sudah kirim), ada yang terlambat. Keterlambatan pengiriman biasanya disebabkan faktor kesibukan orang tuanya.

Untuk pembelajaran yang hanya mengandalkan WAG, dalam jangka panjang, akan berdampak pada siswa kurang baik. Dari sisi efektivitas, pertama, guru tidak mempunyai kontrol terhadap

efektivitas proses pembelajaran dalam arti sejauh mana daya serap siswa. Kedua, tidak diketahui dengan pasti siapa yang mengerjakan tugas apakah benar siswa atau jangan-jangan orang tua/kakaknya. Dari sisi orang tua, tampaknya belum semua orang tua siap berperan ‘sebagai guru di rumah’. Ketiga, dari sisi kebiasaan baik ke sekolah. Jika selama ini, siswa belajar di sekolah dalam kondisi bersih dan rapi, tetapi sekarang sebagian siswa belum mandi ketika mengerjakan tugas. Jika hal-hal tersebut, berjalan lama, dampaknya siswa akan ‘lupa bersekolah dengan cara yang baik”. Sikap dan perilaku baik di sekolah akan terdisrupsi dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki siswa kelas rendah tidak terbangun dengan baik.

Menjadi Guru itu Tidak Mudah

Interaksi yang intensif antara guru dan orangtua selama belajar di rumah ini, membuat beberapa orangtua curhat dan sekaligus menyampaikan simpatinya bahwa menjadi guru itu tidak mudah. Tidak mudah dalam menyampaikan materi maupun mengendalikan anak supaya rajin belajar. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahap tanggap darurat, pembelajaran *online* untuk siswa SD kelas 1 sampai dengan 3 banyak menghadapi tantangan. Tantangan yang muncul dari keterbatasan kepemilikan ponsel cerdas, orang tua yang belum optimal perannya di rumah sebagai guru di rumah, dan waktu penyampaian materi yang minimalis. Walaupun demikian karena masih dalam tahap tanggap darurat, kekurangan dan kelemahan tersebut, bisa dimaklumi, tidak ada yang disalahkan karena situasi dan kondisinya menuntut demikian. Lebih baik memprioritaskan keselamatan anak dan yang penting proses pembelajaran tetap berjalan.

Tahap Kedua: Adaptasi

Tahap adaptasi yang dimaksud di sini adalah masa-masa pembiasaan perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan tatanan

normal baru. Dalam tahap adaptasi ini, perilaku efektif yang telah dilakukan pada tahap tanggap darurat dilanjutkan. Jika evaluasinya kurang baik, sebaiknya dihentikan dan digantikan perilaku lain. Sebab jika dibiarkan akan membentuk maladaptasi (Helmi, 1995).

Protokol tatanan normal baru di sekolah sedang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jika Kemendikbud RI sudah membuat kurikulum baru pembelajaran jarak jauh, tinggal mengikuti dan menyesuaikan. Tetapi *just in case*, belum siap, maka metode pembelajaran *blended learning* adalah salah satu solusinya.

***Blended Learning* dan Kelas Jaga Jarak**

Blended learning merupakan perpaduan proses belajar *online* dan tatap muka. Mengapa? Pertama, karena dalam tahap adaptasi ini,antisipasi terjadinya *reborn* atau *second wave* seperti terjadi di Korea Selatan dan di Perancis, begitu sekolah di buka, angka terinfeksi virus meningkat. Kedua, kita tidak mungkin akan kembali ke pembelajaran tatap muka sebelum pandemik, karena ini akan menabrak protokol belajar di sekolah. Tidak mungkin pula, akan meneruskan dengan pembelajaran *online*, jika tidak situasinya terpaksa.

Ketika kelas menerapkan jaga jarak; maka kapasitas kelas hanya terisi separuhnya. Belajar di kelas dibagi 2 shif. Untuk siswa kelas rendah SD, belajar di sekolah sekitar 2-3 jam tanpa waktu istirahat. Karena waktu istirahat merupakan kesempatan siswa bermain bersama dan rawan terjadi penularan. Skenario ini lebih baik dari sisi risiko jika dibandingkan semua siswa masuk seperti sebelum pandemik berlangsung.

Pembelajaran *online*, dilakukan di sore hari, menyesuaikan waktu orang tua bekerja. Media yang digunakan sebaiknya kanal *YouTube* karena aspek kemudahan dalam akses. Kemudahan merupakan aspek utama dalam adopsi teknologi informasi (Ramdhani, 2009).

Pelaksanaanya merupakan gabungan dari beberapa sekolah untuk kelas yang sama. Ada tim guru yang bertugas menjawab pertanyaan jika orang tua atau belum memahami materi secara jelas. Ketika itu orang tua hadir sebagai ‘teman belajar’ anak.

Berapa proporsi waktu tatap muka dan *online*? Proporsi ini pada awalnya bisa lebih banyak pembelajaran *online*, misalnya 70:30 dan terus dievaluasi dan ditingkatkan kehadiran di sekolah. Mata pelajaran apa yang diprioritaskan dan seluruh rencana pembelajaran yaitu *online* dan tatap muka disiapkan oleh tim guru dengan koordinasi dari Dinas Pendidikan.

Perubahan *Mindset* Orangtua

Berdasarkan pengalaman pembelajaran *online* pada tahap disrupti, sebenarnya orang tua mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan guru. Tampaknya orang tua masih mengandalkan peran guru seperti pembelajaran tatap muka. Orang tua seharusnya hadir menemani, mengajak diskusi, jika perlu memberikan solusi pada proses pembelajaran *online*.

Perubahan peran yang besar pada orang tua ini, haryulah diberikan suatu pemahaman yang holistik akan peran tua, dapat dilaksanakan dengan Webinar atau seminar biasa oleh komite dan pihak sekolah. Edukasi ini tidak mudah karena pada dasarnya pembentukan tatanan normal baru ini esensinya *super new normal* dikatakan Prof. Irwan Abdullah dalam GamaTalks (3). Artinya membiasakan kebiasaan yang lebih tinggi, misalnya dari tidak biasa cuci tangan membiasakan cuci tangan, dari tidak biasa pakai masker harus menggunakan masker. Ada dua hal yang paling sulit yaitu membiasakan bekerja secara *online* dan perannya sebagai ‘teman’ bagi anak dalam proses pembelajaran *online*.

Kolaborasi Semua Pihak

Sekolah sebaiknya tidak berjalan sendiri, pihak pemerintah daerah, dapat menggandeng perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN tematik khusus untuk keperluan pembiasaan tatanan normal baru ini. Proses belajar di sekolah tanggungjawab guru, pembelajaran *online* dapat dilakukan bersama antara tim guru dengan relawan dan mahasiswa.

Webinar-webinar untuk orang tua, bisa dilakukan oleh pembicara dari ormas besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU, dosen-dosen Perguruan Tinggi, dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk memberikan pemahaman proses transformasi sosial ini pada orang tua.

Dirijen

Sebagai bagian dari proses transformasi sosial, hal ini kerja besar. Bukan hanya sekadar persoalan protokol kesehatan di kelas, tetapi *outcome*-nya suatu proses penyadaran perlunya tatanan normal baru. Hal ini di ranah kepala daerah.

Tahap Ketiga: Tatanan Normal Baru

Pada tahap adaptasi, akan lebih nyaman jika diberi waktu minimal 6 bulan, supaya perubahan perilaku dirasakan nyaman (*smoothing*). Tarikan-tarikan kuat kembali ke masa lalu, bisa dikontrol. Oleh karena orkestrasi dari pimpinan kepala daerah, dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan di masyarakat, akan memberikan peluang suksesnya terbentuk tatanan normal baru. Sebuah proses transformasi sosial orang tua terbentuk dan siswa SD kelas rendah terlindungi.

**) Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si., dosen Fakultas Psikologi UGM dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman*

Pemetaan Indikator Kualitas Layanan Sekolah sebagai Dasar Perbaikan Kualitas Pendidikan dan Solusi PPDB pada Masa Pandemi

Oleh: Dr. (C) Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Tidak hanya UN saja yang dihapuskan oleh pemerintah. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang selama ini diberlakukan pada siswa SD juga dihapus dan diganti dengan ujian sekolah yang pembuatan soal ujian diserahkan kepada sekolah.

Mendikbud RI menyebutkan, dalam masa darurat penyebaran COVID-19 syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Indikator Penentu

Terlepas pro-kontra, penghapusan UN SMP dan peniadaan US SD menimbulkan persoalan baru. Bukan hanya penentuan standar kelulusan, tetapi juga akan berpengaruh signifikan pada kebijakan mekanisme dan standar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMP dan SMA. Di sejumlah daerah terutama di DIY dan Kabupaten/Kota, nilai UN dan USBN (sebelum diganti US) menjadi indikator penentu pemeringkatan calon peserta didik,

terutama bagi calon peserta didik yang mendaftar SMP dan SMA di luar jalur zonasi murni. Tanpa UN dan US Dinas Pendidikan harus merumuskan standar dan mekanisme baru yang objektif, adil, dan transparan.

Salah satu indikator utama yang paling mungkin untuk dipilih dalam PPDB tahun ini sebagai pengganti nilai UN atau US adalah dengan mempertimbangkan nilai rapor calon peserta didik pada semester 7, 8, 9 untuk yang mendaftar SMA dan nilai rapor kelas 4, 5, 6 untuk calon peserta didik SMP. Indikator nilai rapor bisa digunakan sebagai satu-satunya penentu pemeringkatan jika masyarakat tidak mempersoalkan standar kualitas sekolah. Artinya kita berasumsi bahwa standar kualitas setiap sekolah dinilai sama.

Tetapi indikator nilai rapor sudah pasti menjadi pilihan tidak menguntungkan bagi para peserta didik yang berasal dari sekolah-sekolah yang selama ini sudah memiliki tradisi kualitas dan prestasi. Formula dengan mempertimbangkan indeks kinerja sekolah bisa menjadi pilihan yang ideal.

Penulis mengusulkan agar indikator seleksi PPDB jenjang SMP dan SMA menggabungkan dua indikator yaitu: nilai rata-rata rapor calon peserta didik dan indeks kinerja sekolah yang diukur dari akreditasi sekolah asal dan prestasi sekolah asal yang dilihat dari peringkat nilai rata-rata UN atau US yang dicapai pada tahun sebelumnya. Masing-masing indikator ditentukan bobotnya dan dibuat rumus akhir nilai calon peserta didik.

Terdokumentasi

Besaran nilai rapor sudah jelas ada dan terdokumentasi, sedangkan indeks kinerja sekolah harus ada standar nilai dan bobotnya. Misalnya nilai berdasar indeks sekolah berdasar akreditasi bisa ditentukan: sekolah berakreditasi A nilainya 100, B nilainya 75, C nilainya 50. Sedangkan berdasarkan peringkat nilai rata-rata

UN atau US bisa dilihat dari peringkat tingkat Kabupaten/Kota, misalnya peringkat 1-10 nilainya 100, peringkat 11-20 nilainya 90, peringkat 21-30 nilainya 80 dan seterusnya. Selanjutnya masing-masing indikator diberi bobot, misalnya nilai rapor bobotnya 50 persen, akreditasi sekolah asal 25 persen dan peringkat nilai rata-rata UN atau US diberi bobot 25 persen. Berdasar tiga indikator tersebut, formula nilai akhir calon peserta didik atau disingkat NA adalah $NA = (\text{Nilai Rata-rata Rapor} \times 50 \text{ persen}) + (\text{Nilai Akreditasi Sekolah Asal} \times 25 \text{ persen}) + (\text{Nilai Peringkat UN atau US} \times 25 \text{ persen})$.

Formula tersebut akan mengakomodasi berbagai kepentingan dan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, adil, dan transparan. Di samping itu implementasinya mudah dan bisa dilakukan secara daring karena semua data telah terdokumentasi dengan baik (Nursya'bani Purnama-a, 2020).

Zonasi PPDB Kontra SNMPTN

Penulis berpandangan bahwa kebijakan zonasi PPDB yang dirumuskan oleh Mendikbud RI (era Profesor Dr. Muhajir Effendy) pantas diapresiasi karena memiliki tujuan yang baik. Tetapi mestinya kebijakan tersebut juga harus disinergikan dengan kebijakan kementerian lain terkait, dalam hal ini Kemenristekdikti, terutama dalam penentuan kriteria SNMPTN. Jika perlu, SNMPTN dihapus karena jelas dalam SNMPTN ada kriteria yang menimbulkan kesenjangan antar sekolah, ada sekolah yang dinilai jejak rekamnya bagus, sehingga mendapat peringkat tinggi dan ada sekolah dengan kondisi sebaliknya. Biarkan siswa berkompetisi secara sehat dan adil dalam seleksi masuk PTN secara individual tanpa intervensi status sekolah (unggulan atau non unggulan), seperti halnya dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) maupun Ujian Mandiri(UM) PTN atau jika kebijakan jalur SNMPTN masih diberlakukan, jejak rekam sekolah mestinya ditiadakan dengan asumsi setiap sekolah memiliki kualitas yang sama (Nursya'bani Purnama-b, 2020).

Pemetaan Indikator Kualitas Layanan Sekolah sebagai Dasar Perbaikan Kualitas Pendidikan

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak usia sekolah. Di sekolah, mereka akan menemukan para guru dan karyawan sebagai orangtua, sesama peserta didik sebagai teman belajar dan bermain. Di sekolah, mereka membutuhkan lingkungan fisik dan non fisik untuk mengaktualkan minat dan bakat. Muhammad Ali (2009: 355) menyebutkan bahwa fungsi sekolah antara lain: memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama ataupun bekerja sama dengan orang lain, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri.

Sekolah memiliki tujuan agar para peserta didik memperoleh pendidikan yang baik dan menyenangkan, sehingga mereka dapat mengasah potensi dan bakat, serta mencapai prestasi yang diinginkan. Oleh karena itu manajemen sekolah harus dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Manajemen sekolah juga harus menjamin bahwa kualitas layanan sekolah dapat memuaskan para peserta didik. Jika lingkungan dan layanan sekolah kondusif, hal ini akan menciptakan suasana belajar dan berinteraksi yang produktif. Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa sekolah adalah taman. Artinya sekolah harus menjadi taman yang menyenangkan bagi peserta didik. Jika ada pepatah rumahku adalah surgaku, maka manajemen sekolah harus berupaya menjadikan sekolah sebagai surga bagi peserta didik. Apalagi bagi sekolah yang menerapkan program lima hari sekolah dengan jam belajar pukul 07.00 – 15.45 WIB., durasi waktu yang panjang tersebut harus diimbangi dengan

lingkungan dan suasana sekolah yang mendukung dan kualitas layanan sekolah yang terjamin. Manajemen sekolah yang mampu menunjukkan kualitas layanan yang baik akan menghasilkan berbagai prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun guru. Kualitas layanan sekolah akan menciptakan kepuasan dan kebahagiaan bagi warga sekolah. Dengan kepuasan dan kebahagiaan akan menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi. Sebaliknya jika kualitas layanan sekolah tidak baik, warga sekolah terutama peserta didik akan merasa terbelenggu berada di lingkungan sekolah.

Untuk membangun kualitas layanan sekolah, pihak manajemen sekolah seharusnya mengidentifikasi indikator-indikator kualitas layanan yang diinginkan oleh peserta didik. Manajemen sekolah tidak saja harus membuat pemetaan indikator kualitas layanan yang sudah baik dan harus dipertahankan, tetapi manajemen sekolah juga harus mengetahui peta indikator kualitas layanan yang tidak baik dan harus diperbaiki. Namun, permasalahannya adalah hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap kualitas layanan sekolah. Dengan demikian, penelitian untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap kualitas layanan sekolah perlu dilakukan sebagai dasar pemetaan kualitas layanan sekolah, sehingga peningkatan kinerja manajemen sekolah lebih terarah dan berkelanjutan.

Sekolah sebagai Organisasi Penyedia Layanan

Sekolah merupakan salah satu jenis organisasi jasa (layanan) yang berbeda dengan perusahaan manufaktur (pabrik) yang menghasilkan barang. Sekolah menghasilkan produk layanan yang memiliki karakteristik berbeda dengan barang. Layanan merupakan produk yang bersifat tidak berwujud, heterogen, tidak bisa disimpan, dan layanan dilakukan secara bersamaan saat diberikan dan dirasakan. Oleh karena produk layanan tidak berwujud, maka

kualitas layanan tidak bisa diukur jika konsumen tidak membeli dan merasakan layanan. Persepsi konsumen terhadap kualitas layanan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja layanan, tetapi juga melihat komponen yang tidak berwujud lainnya, seperti komponen fisik pendukung, orang yang melayani, dan harga. Layanan bersifat heterogen, tergantung siapa yang memberikan jasa, kapan dan dimana jasa diberikan, serta dipengaruhi oleh situasi/kondisi saat layanan diberikan. Layanan juga bersifat *perishability* yang berarti tidak bisa disimpan dan dijual kembali di lain waktu, sehingga estimasi permintaan layanan merupakan pekerjaan yang sulit. Karakteristik yang terakhir, layanan dihasilkan dan dirasakan secara bersamaan, sehingga layanan dilakukan bersamaan dengan saat dibutuhkan.

Untuk mengetahui kualitas layanan sekolah diperlukan indikator-indikator kualitas layanan yang handal dan terpercaya. Parasuraman, *et al.* (1988) menyodorkan lima dimensi kualitas layanan dalam industri/organisasi jasa, termasuk organisasi jasa pendidikan, yang terdiri atas: *Tangibles* (bukti fisik), yaitu bukti fisik yang menjadi bukti awal kualitas layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, dan penampilan pegawai. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan penyedia layanan dalam memberikan layanan yang dijanjikan dengan akurat, tepat waktu, dan memuaskan. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu penyedia layanan memiliki kemauan untuk memberikan layanan dengan cepat dan tanggap. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan dan kecakapan penyedia layanan dalam memberikan layanan dengan baik. *Empathy* (empati), yaitu penyedia layanan mampu memahami kebutuhan konsumen dan mampu menjalin komunikasi interpersonal.

Lima dimensi kualitas layanan tersebut terdiri atas 22 indikator (*item*) kualitas layanan yang telah diadopsi oleh sejumlah peneliti untuk mengukur dan mengevaluasi berbagai perusahaan jasa, termasuk organisasi layanan seperti pendidikan (sekolah). Indikator-indikator kualitas layanan disesuaikan dengan karakteristik

organisasi layanan yang akan diteliti. Untuk organisasi sekolah, indikator-indikator kualitas layanan disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Kualitas Layanan Sekolah

Dimensi	Indikator Kualitas Layanan Sekolah
Bukti Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki gedung yang memadai. 2. Memiliki fasilitas pendukung yang memadai (perpustakaan, laboratorium, UKS, ruang pertemuan, masjid, kantin, area olah raga dan bermain, area parkir). 3. Guru dan karyawan berpenampilan menarik. 4. Memiliki perlengkapan pendukung (papan pengumuman, papan petunjuk, dan <i>free wifi</i>).
Keandalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki jadwal pelajaran dan kegiatan yang terpercaya. 2. Mampu menyelesaikan permasalahan peserta didik. 3. Layanan diberikan tepat waktu. 4. Memiliki rekam/catatan peserta didik yang akurat
Daya Tanggap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru dan karyawan memberikan layanan dengan cepat dan tepat. 2. Guru dan karyawan tanggap terhadap kebutuhan peserta didik. 3. Guru dan karyawan selalu bersedia memberikan layanan dan bantuan kepada peserta didik. 4. Guru dan karyawan tidak disibukkan dengan urusan lain.
Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengajar sesuai bidangnya; karyawan dipekerjakan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. 2. Guru dan karyawan bekerja dengan meyakinkan. 3. Guru dan karyawan menghargai peserta didik. 4. Guru bisa menjawab pertanyaan peserta didik.

Empati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian kepada peserta didik secara individual sesuai kebutuhan peserta didik. 2. Sekolah memahami kebutuhan peserta didik secara spesifik. 3. Perhatian kepada peserta didik secara adil. 4. Disediakan layanan konsultasi dan bimbingan khusus.
--------	---

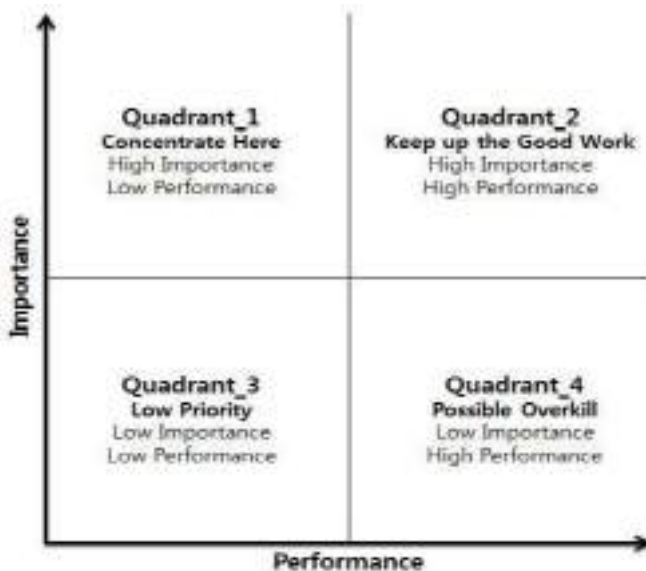
Metode Pengukuran dan Pemetaan Kualitas Layanan Sekolah

Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pemetaan indikator kualitas layanan, yaitu: metode SERVQUAL, SERVPERF, dan *Importance-Performance Analysis* (IPA). Pada tulisan ini hanya akan dibahas secara singkat tentang metode IPA. Metode ini diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977. Metode analisis ini sering disebut dengan analisis tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja atau kepuasan konsumen (*performance*). Analisis ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepentingan peserta didik sebagai konsumen terhadap kualitas layanan sekolah dan penilaian peserta didik terhadap kinerja kualitas layanan sekolah (kepuasan terhadap kualitas layanan sekolah). Analisis ini digunakan untuk mengetahui indikator-indikator kualitas layanan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar manajemen sekolah semakin baik dan kinerja sekolah semakin meningkat.

Hasil penilaian seluruh konsumen selanjutnya dibuat rerata dan digambarkan ke dalam *Importance-Performance Matrix* atau sering dikenal dengan Diagram Cartesius yang terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu ordinat/vertikal (Y) mewakili tingkat kepentingan terhadap kualitas layanan (*importance*) dan sumbu absis/horizontal (X) mewakili tingkat kinerja kualitas layanan/kepuasan konsumen (*performance*). Rerata nilai Y digunakan sebagai *cut-off* atau pembatas antara tingkat kepentingan tinggi dengan tingkat kepentingan rendah, sedangkan rerata nilai X digunakan sebagai

pembatas antara tingkat kinerja/kepuasan tinggi dengan tingkat kinerja/kepuasan rendah.

Kuadran 1: *Concentrate here* (konsentrasi di sini)



Kuadran ini memberi gambaran indikator kualitas layanan dengan tingkat kepentingan tinggi, sedangkan tingkat kinerja rendah. Jika indikator kualitas layanan berada pada kuadran 1, maka harus mendapat prioritas perbaikan karena tingkat kinerja kualitas layanan lebih rendah dibanding tingkat kepentingan kualitas layanan.

Kuadran 2: *Keep up the Good Work* (pertahankan kinerja)

Kuadran ini memberi gambaran indikator kualitas layanan dengan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sama-sama tinggi, sehingga indikator kualitas layanan yang berada pada kuadran ini dinilai ideal.

Kuadran 3: *Low priority* (prioritas rendah)

Kuadran ini memberi gambaran indikator kualitas layanan dengan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sama-sama rendah,

sehingga indikator kualitas layanan yang berada pada kuadran ini mendapat prioritas terakhir untuk ditingkatkan.

Kuadran 4: *Possible overkill* (kelebihan energi/sumber daya)

Kuadran ini memberi gambaran indikator kualitas layanan dengan tingkat kepentingan rendah, sedangkan tingkat kinerjanya tinggi. Hal ini menunjukkan kelebihan alokasi energi/sumber daya, sehingga jika indikator kualitas layanan berada pada kuadran ini perlu dikendalikan agar tidak berlebihan.

Pendidikan yang berkualitas dibuktikan dengan tercapainya sasaran kualitas yang telah dicanangkan. Tercapainya pendidikan yang berkualitas diawali dengan kualitas layanan sekolah yang baik. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus mampu menunjukkan kualitas layanan yang baik, Dengan kepuasan dan kebahagiaan akan menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah harus dilakukan dengan pemetaan indikator kualitas layanan sekolah, sehingga bisa teridentifikasi indikator yang menjadi prioritas dan indikator yang harus dipertahankan kualitasnya.

Metode *Importance-Performance Analysis* (IPA) menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk pemetaan indikator kualitas layanan pada organisasi jasa, termasuk jasa pendidikan. Dengan analisis IPA akan diketahui posisi setiap indikator kualitas layanan sekolah dari hasil perbandingan antara tingkat kepentingan dengan tingkat kinerja kualitas layanan sekolah. Hasil perbandingan tersebut digambarkan dalam diagram Cartesius sebagai acuan perbaikan kualitas layanan sekolah.

*) Dr. (C) Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi UII dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada bagian pembahasan di atas, khususnya dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama pandemi COVID-19 di TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kendala utama dalam kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19 adalah masalah tersedianya fasilitas infrastruktur telekomunikasi berupa perangkat *handphone* dan akses Internet. Masalah ini paling mendominasi permasalahan baik di tingkat TK, SD, maupun SMP. Disusul masalah dalam hal pembelajaran atau kurikulum yang harus disampaikan, dan kendala yang berhubungan dengan pendampingan orangtua kepada anak-anaknya serta kesulitan para guru berkomunikasi dengan para orangtua atau walimurid. Seharusnya solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat yakni dengan memprioritaskan pemberian *handphone* gratis kepada keluarga yang benar-benar miskin atau kurang mampu sekaligus membangun infrastruktur Internet secara merata di seluruh Kabupaten Sleman. Pemberian subsidi kuota Internet yang sudah diberikan kepada para pelajar dan guru, memang cukup efektif; namun langkah tersebut kurang efektif dalam jangka panjang. Solusi lainnya, adanya penyusunan kurikulum yang lebih fleksibel dalam masa pandemi COVID-19 ini sehingga penyampaian yang dilakukan oleh guru kepada para muridnya menjadi lebih mudah difahami bersama. Para orangtua (baik ayah maupun ibu) harus meluangkan waktunya dan siap menjadi guru di rumah bagi anak-anak mereka.

Masih banyaknya orangtua yang gagap dalam menggunakan gawai dan perangkat telekomunikasi lainnya, perlu dilakukan adanya advokasi atau bimbingan khusus, terutama dengan melibatkan mahasiswa yang menempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN) ataupun Komite Sekolah.

Kedua, solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemik COVID-19 sudah dirasakan dampak positifnya oleh para guru dan murid secara keseluruhan. Solusi yang paling banyak mendapatkan tanggapan yakni mengenai penyesuaian materi atau kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis daring tersebut. Disusul dengan gagasan untuk mengadakan *home visit* serta meningkatkan komunikasi intensif antara guru dan murid.

Ketiga, pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan dalam mengatasi masalah pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 antara lain: dengan menerapkan program Belajar dari Rumah, pembinaan guru, memberikan bantuan pendanaan misalnya untuk subsidi kuota internet kepada guru dan murid, pemantauan serta evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19, dan gagasan program *home visit* di tingkat TK dan SD (walaupun kemudian kebijakan ini lantas ditiadakan).

Keempat, para guru berharap besar agar pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan belajar mengajar secara daring dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Bahkan sebanyak 149 guru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman berharap besar agar diadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tatap muka, namun tetap mengedepankan prosedur protokol kesehatan secara ketat. Harapan lainnya, agar kebijakan mengenai Program Belajar dari Rumah agar dapat disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat untuk menekan angka penderita COVID-19 yang sampai sekarang masih terus tinggi.

Kelima, terkait dengan gagasan program *home visit*; sebagian besar guru (sebanyak 309 responden) menyetujui program tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah responden yang tidak setuju dengan program tersebut sebanyak 224 orang, sedangkan 38 responden tidak menjawab atau tidak bisa menentukan pilihan. Program *home visit* bisa menjadi pilihan program yang baik namun harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan sebaiknya diperuntukkan bagi para pelajar yang mengalami permasalahan akademik saja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan di atas, penelitian yang dilakukan oleh tim riset Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman ini memberikan rekomendasi ilmiah sebagai berikut:

Pertama, evaluasi pembelajaran daring selama masa tanggap darurat pandemi COVID-19 telah berjalan sejak medio Maret sampai setidaknya akhir November 2020 telah berjalan dengan relatif cukup baik. Namun masih ada sejumlah kendala dan hambatan yang harus di atasi bersama. Masalah utama yang dialami oleh para guru, murid, dan orangtua di Kabupaten Sleman adalah permasalahan belum meratanya akses Internet sampai di pedesaan. Tidak meratanya akses internet ini mengakibatkan gangguan dalam pembelajaran daring. Idealnya, setiap rumah tersedia fasilitas *hotspot* Internet, sehingga program belajar dari rumah secara daring bisa berjalan dengan baik dengan dukungan teknologi Internet yang memadai. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga sebaiknya memberikan bantuan fasilitasi kepada anak-anak atau orangtua murid yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin berupa telpon seluler (*handphone*) untuk mendukung program belajar dari rumah (belajar *online*).

Kedua, peran orangtua dalam pendampingan belajar anak-anak mereka di rumah yang posisinya menggantikan peran guru di sekolah

menjadi sangat penting. Maka dibutuhkan kesadaran dari para orangtua untuk mendampingi secara penuh agar pembelajaran daring bisa berjalan efektif. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bisa membuat pembekalan kepada para orangtua melalui program-program seminar atau sejenisnya yang bisa dilakukan secara daring juga. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/S) seperti: UGM, UNY, UII, UAJY, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta, dan lainnya.

Ketiga, terkait dengan program *home visit*; sebaiknya dipertimbangkan kembali mengingat pergerakan jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sleman sampai akhir November 2020 masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun sebagian guru menyetujui adanya program *home visit*; secara prosedur dan kriteria substantif model bagaimanakah yang diperkenankan bagi guru untuk berkunjung ke rumah para murid harus dibuat secara komprehensif. Aturan standat protokol kesehatan penting dilakukan. Hanya kepada siswa-siswa yang mengalami kendala akademik saja yang sebaiknya mendapatkan program *home visit* ini, sehingga mudah dikendalikan secara efektif. Pada satu sisi, jelas jumlah guru yang tersedia juga terbatas, jika mustahil dilakukan jika satu guru berkunjung ke rumah murid satu persatu.

Keempat, mengingat responden penelitian ini hanya berbasis pada guru-guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman, menjadi keterbatasan dalam riset ini; maka ke depan perlu dilakukan pengembangan lebih besar lagi yakni penelitian yang lebih komprehensif dengan menjadikan para murid, orangtua, dan *stakeholders* lainnya menjadi responden penelitian. Harapannya, hasil kajian menjadi lebih kompleks dan bisa secara utuh memotret objek penelitian. Adanya suasana pandemi COVID-19 harus mampu disikapi secara kreatif dan inovatif dalam melakukan penelitian kolaboratif ke depan.

Kelima, berhubungan dengan telah terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04/KB/2020; Nomor 737 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020; Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 pada 20 November 2020 yang memberikan landasan hukum bagi setiap lembaga pendidikan di Indonesia untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada semester genap 2020/2021 dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Di mana dalam Keputusan Bersama 4 menteri di atas, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan pemetaan wilayah yang terpapar COVID-19.

Dalam konteks daerah Sleman, sebaiknya dipetakan kembali terkait sebaran penderita COVID-19 dalam rangka untuk melokalisir daerah-daerah potensial pandemi COVID-19 setidaknya sampai akhir Desember 2020. Sebab ada dua agenda politik besar di Kabupaten Sleman yang berpotensi besar dapat menyebabkan ledakan jumlah penderita COVID-19 yakni agenda Pilkada pada 9 Desember 2020, dan agenda Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sleman pada 20 Desember 2020. Jika jumlah penderita COVID-19 sampai akhir Desember 2020 ternyata “*unpredictable*” sebagai imbas dari pesta demokrasi lima tahunan di atas, maka kebijakan pembelajaran tatap muka yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat dengan izin dari pemerintah daerah masing-masing terhitung mulai awal tahun 2021; wajib ditinjau ulang atau dibatalkan saja. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak boleh “gegabah” dalam menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka; namun yang justru diperkuat saat ini adalah pelayanan dalam bidang pembelajaran daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Anggara, M. J. W, dkk. (2017). KOMPAS BBM (*Komunitas Pemuda Desa Bangun Bisnis Mix Farming*) Sebagai Sarana Membangun Wirausaha Ternak Bersistem Mix Farming Guna Pemberdayaan Pemuda Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Ejournal FP UNISKA Kediri*. ISSN: 2502-5597. Klik: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/FilliaCendekia/article/view/92/76>.
- Anshori, Isa dan Zahro'ul Illiyyin. (2020). *Dampak COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran di MTs Al-Asyhar Bungah Gresik*. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Doi: 10.30868/im.v3i02.803.
- BSNP. (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). *Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 1 April 2020*. Halaman 55-61.
- Farisa, Fitria Chusna. (2020). *KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas dari Guru*. Kompas edisi 13 April 2020. klik: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15584711/kpai-terima-213-pengaduan-pembelajaran-jarak-jauh-mayoritas-keluhkan?page=all>.
- <https://corona.jogjaprovo.go.id/>.
- <https://covid19.go.id/>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hambatan>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harapan>, diakses 15 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi>, diakses tanggal 15 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Solusi>, diakses tanggal 14 November 2020.

<https://rrr.sederet.com/translate.php>, diakses tanggal 15 November 2020.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

Martilla, J. and James, J. (1977), 'Importance-Performance Analysis', *Journal of Marketing*, 41(1), 77-79.

Napitulu, Rodame Monitorir. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kepuasan Pembelajaran Jarak Jauh*. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan* Volume 7 No. 1, April 2020 halaman 23-33.

Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. (1988). "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality". *Journal of Retailing*. Vol 64 (1) pp 12-37.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Purnama, Nursya'bani. (2006). *Manajemen Kualitas Perspektif Global*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Purnama, Nursya'bani. (2020). *Solusi PPDB pada Masa Pandemi*. SKH Kedaulatan Rakyat edisi 4 Mei 2020 atau bisa di-klik: <https://www.krjogja.com/angkringan/opini/solusi-ppdb-pada-masa-pandemi/>.

Purnama, Nursya'bani. (2020). *Zonasi PPDB Kontra SNMPTN*. SKH Kedaulatan Rakyat edisi 23 Mei 2020.

Satrianingrum, Arifah Prima dan Iis Prasetyo. (2020). *Persepsi Guru Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5 Issue 1 (2020). Halaman 633-640.

- Supadiyanto. (2020). *Refleksi Pandemi COVID-19 dan Dampaknya pada Bidang Media, Komunikasi, dan Pendidikan di Indonesia*. dalam Supadiyanto, dkk. (2020). *Media, Komunikasi & Krisis COVID-19: Refleksi Empirik untuk Memformulasikan Solusi Akademis atas Dampak Pandemi COVID-19 pada Berbagai Sektor Kehidupan*. Semarang: Lembaga Penerbit Sukarno Pressindo (LPSP).
- Tedjo, Tony. (2006). “*Menulis Seni Mengungkapkan Hati*”. Bandung: AGAPE. dalam <http://www.sabda.org/pelitaku/node/225>.
- Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PROFIL

TIM PENELITIAN/PENULIS DAN EDITOR



Sudiyo, S.Ag., M.Pd., adalah Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Bergabung menjadi Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sejak Periode 2009-2014; Periode 2015-2020, sampai sekarang. Saat ini juga menjadi Ketua Umum PGRI Kabupaten Sleman. Lulus S2 dari Universitas PGRI Yogyakarta dan S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping itu juga menjadi Anggota Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Sleman Periode 2016-2020. Domisili di Kurahan III RT 002/RW 005 Kelurahan Margodasi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kontak HP/WA: 0812-2637-197 e-mail: *sudiyosudiyo1@gmail.com*.



Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. adalah Sekretaris Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini masih menjadi Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu “STIKOM” Komunikasi Yogyakarta. (Lektor 300 AK terhitung mulai Desember 2020). Pernah menjadi dosen tetap dan dosen tamu/luar biasa pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) YPK, Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Radya Binatama/AKRB (AMIKOM Group). Turut membidani perubahan bentuk Akademi Komunikasi Indonesia

YPK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta, dan pendirian Prodi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Perubahan Bentuk AKINDO YPK menjadi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu AKINDO YPK (2016-2018). Adalah alumni Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Menjadi lulusan terbaik dan tercepat dengan IPK: 4,00 masa studi 1 tahun 5 bulan pada Wisuda ke-134 Universitas Diponegoro pada 29 April 2014. Penulis artikel (kolumnis) di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY Periode 2014-2017. Saat ini menjabat sebagai Sekretris I Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat (2017-2022), turut pula mendeklarasikan berdirinya PPWI 11 November 2007 di Jakarta. Telah menulis 13 buku yang sudah diterbitkan antara lain: “Media, Komunikasi, dan Krisis COVID-19 (2020, kolektif bersama penulis lain), Pengantar Jurnalisme Konvergentif” (2020), “Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar” (2018), “Rahasia Opini Termuat di Koran, Refleksi Pengalaman Pribadi Menulis di Berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional” (2018), “Eksplorasi Pekerja Media di Era Konvergensi Media dalam Menegakkan Kedaulatan Komunikasi” (2014), “Berburu Honor Dengan Artikel, Tip dan Strategi Menangguk Rupiah” (2012), “Jadi Penulis Anda Modal Dengkul” (2008), “Booming Profesi Pewarta Warga, Wartawan & Penulis” (2009), dll. e-mail: *supadiyantostikomyogyakarta@gmail.com* WA/HP: 0819-1076-7633.



Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir pada di Sleman, 21 Desember 1969. Pernah menjadi Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kini menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pangkat Lektor Kepala. Kontak WA/HP: 0811-2503-192 e-mail: *theresiaanita27@gmail.com*.



Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga dosen pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Lahir di Ngawi, 22 Desember 1964. Lektor Kepala dengan pangkat Pembina/IVb pada bidang keilmuan: *Ciberpsychology*. Tinggal di: Jalan Kenanga, Gang Kantil 4A, Babadan Baru (Jalan Kaliurang Km 7). Sleman Yogyakarta Kodepos: 55283. Kontak WA/HP: 0811-2666-54 e-mail: *avinpsi@ugm.ac.id*.



Dr. St. Nurbaya, M.Si, M.Hum., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga menjadi Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Lektor Kepala dengan pangkat Pembina/IVA dengan bidang keilmuan: Pembelajaran Bahasa konsentasi Evaluasi Literasi Berbahasa. Lahir di Bima, 6 April 1964. Alamat tinggal di: Grogol Margodadi RT 06 / RW 18 Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Kontak WA/HP: 0821-3755-2823 e-mail: *siti_nurbaya@uny.ac.id*.



Drs. Nurjamil Dimiyati, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Aktif pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan PCNU Kabupaten Sleman. Alamat rumah: Kleben, Caturharjo, Sleman, Sleman, Yogyakarta, 55515. WA/ HP: 08122774022 e-mail: *nurjamildimiyati@gmail.com*.



Drs. Suyono, M.Pd., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Menamatkan S1 dan S2 pada Program Magister Pendidikan FKIP Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Jabatan terakhir sebagai Pengajar Diklat Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan juga Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Aktif sebagai pengurus Ormas Muhammadiyah yakni menjadi Wakil ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Alamat tinggal di: Pongkok RT 03 RW 13, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Telp: (0274) 6497060. HP/WA: 081328015115. e-mail: *Syon115@yahoo.com*.



Drs. Buchori, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Alamat rumah: Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lahir di Sleman pada 30 Desember 1952. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman 2010–2015, dan kini juga menjabat sebagai: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kalasan 2015-2020. Kontak HP/WA: 0812-2707-7177.



Dr. John Suprihanto, MIM., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Metro, 27 Desember 1952. Adalah Lektor Kepala IV/D pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lulus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1974-1979, mengambil Master di *American Graduate School of International Management*, Arizona, USA lulus tahun 1989 dan menempuh pendidikan Doktor di *Flinders University Adelaide South Australia* lulus tahun 2006. Saat ini masih menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini tercatat sebagai sekretaris Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Buku yang pernah diterbitkan: *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, *Hubungan Industrial*, *Bisnis Pengantar* (bersama), *Manajemen Modal Kerja*, *Manajemen Belanja Daerah*, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, *Manajemen Perusahaan* (bersama), dan *Perilaku Organisasi* (bersama). Sampai saat ini masih aktif pula memberi kuliah pada mata kuliah: *Manajemen*, *Bisnis Pengantar*, *Bisnis Internasional*, *MSDM*, *Manajemen Strategik Sektor Publik*, *Manajemen Pemasaran Rumah Sakit*, *Manajemen Pemasaran Sosial*, *Manajemen Pemasaran Pariwisata*, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, *Manajemen Kinerja*, *Kewirausahaan*, dan *Etika Bisnis* di Universitas Gadjah Mada. Kontak WA/HP: 0819-3117-1008 e-mail: john.soeprihanto@gmail.com.



Akhmad Ritaudin, M.Pd. adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Bantul, 8 April 1985. Lulus S-I PGSD Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010, dan lulus S-2 Manajemen Pendidikan UST tahun 2019. Saat ini menjadi guru SD Negeri Percobaan 3 Pakem, Sleman, Yogyakarta. Akhmad sendiri pernah menjuarai lomba *stand up comedy* berbahasa Jawa. Berpengalaman sebagai sutradara lomba vlog anak Kuis Ki Hajar

Dewantara, berhasil meraih vlog terbaik SD tingkat nasional. Saat ini aktif sebagai instruktur nasional, pengajar diklat guru untuk mengembangkan potensi guru. Aktif juga sebagai *Youtuber, vlogger*, dan komedian. Kontak HP/WA: 0815-7907-972.

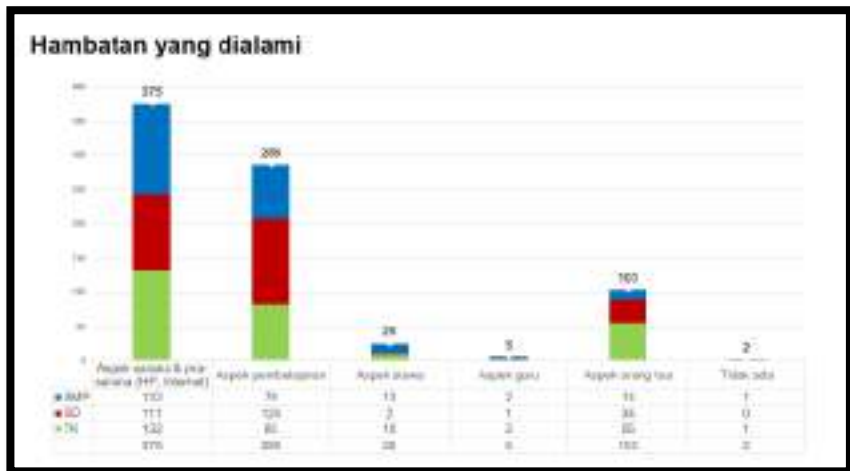


Dr. (C) Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Mendapatkan gelar S.E. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan gelar Master of Science in Management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kini tengah merampungkan studi S3. Di samping itu juga pernah menjadi Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Periode 2011-2015, Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2015-2020, Dewan Pengawas PDAM Kulon Progo 2011-2017, dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kulon Progo 2020-2024. Kerap menulis artikel di sejumlah surat kabar antara lain: SKH Kedaulatan Rakyat dll. HP/WA: 0815-6856-874. e-mail: *nursya'bani.purnama@uii.ac.id*.

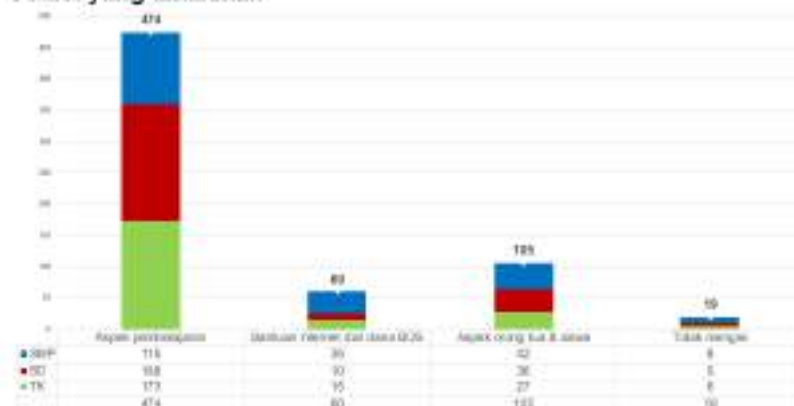


FORMASI DEWAN PENDIDIKAN KAB. SLEMAN 2020-2025:
Pengukuhan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 oleh Bupati Sleman di Ruang Rapat Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Rabu, 26 Februari 2020 pukul 13.00 WIB s/d selesai (sumber foto: Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman).

LAMPIRAN



Solusi yang dilakukan

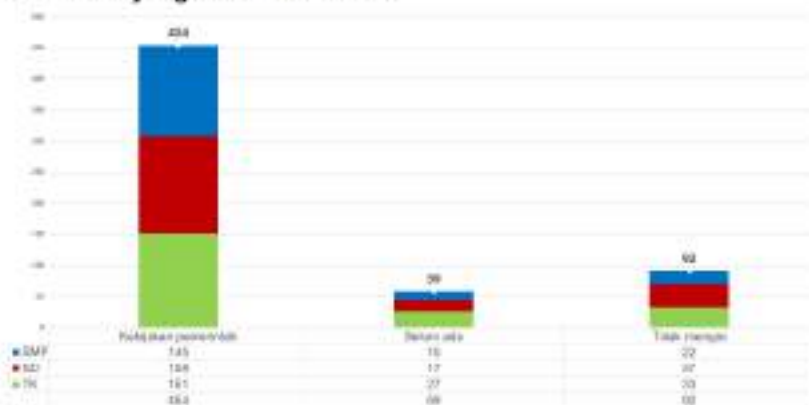


Solusi yang dilakukan (detail)

Solusi	TK	SD	SMP	TOTAL
Aspek pembelajaran	173	296	115	474
Menyesuaikan materi/kegiatan	32	125	72	289
Melakukan home visit / Darululungan	55	21	9	85
Percepatan waktu	16	51	37	64
Ingin ada tatap muka dengan protokol	0	8	8	25
Peningkatan literasi digital	1	1	9	11
Bantuan internet dari dana BOS	15	10	35	60
Aspek orang tua & siswa	27	36	42	105
Melakukan komunikasi personal dengan orang tua	14	28	34	76
Memberikan motivasi pada orang tua/siswa	13	8	8	29
Tidak mengisi	6	5	8	19

Total response TK 201, SD 210, SMP 201

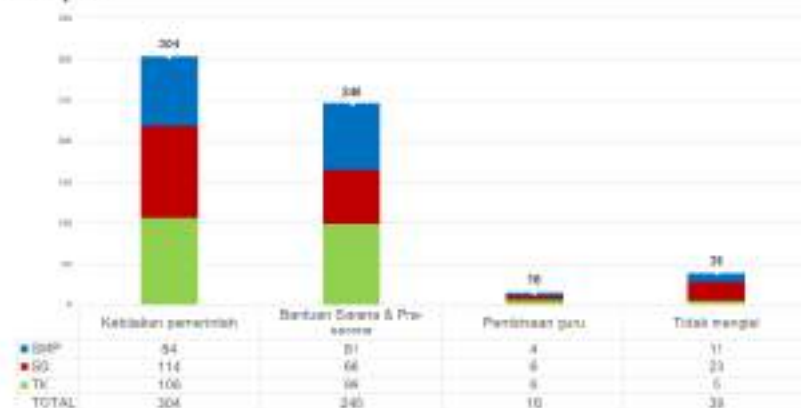
Intervensi yang sudah dilakukan



Intervensi yang sudah dilakukan (detail)

Intervensi	TK	SD	SMP	TOTAL
Kelengkapan perencanaan	151	158	145	454
Program BDI	68	91	73	232
Bantuan dana	30	22	21	73
Pemantauan dan evaluasi	18	16	16	50
Pembinaan guru	52	26	35	113
Program Home Visit / Guru Kunjung	3	3	0	6
Belum ada	27	17	15	59
Tidak mengisi	33	37	22	92

Harapan



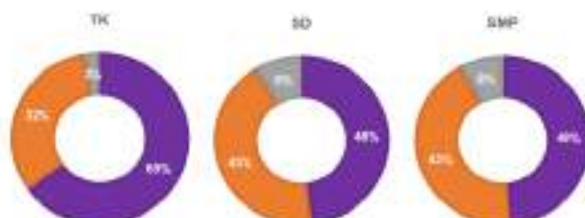
Harapan (detail)

Harapan	TK	SD	SMP	TOTAL
Kebijakan pemerintah	100 53%	114 57%	84 49%	304 53%
Tanpa untuk KSM Tatas muka dengan protokol	55 28%	51 26%	43 25%	149 26%
Kebijakan dan sosialisasi GOR	29 15%	21 11%	13 19%	63 15%
Penyesuaian materi/kegiatan	18 8%	38 19%	7 4%	63 11%
Tanpa untuk melibatkan Nomen Klat / Guru Kunjangan	8 3%	4 2%	1 1%	13 2%
Bantuan Sarana & Prasarana	98 50%	95 31%	81 47%	245 43%
Pembinaan guru	6 3%	6 3%	4 2%	16 3%
Tidak mengisi	6 3%	23 12%	11 6%	39 7%

*Detail response TK, SD, SMP, SMP, SMP

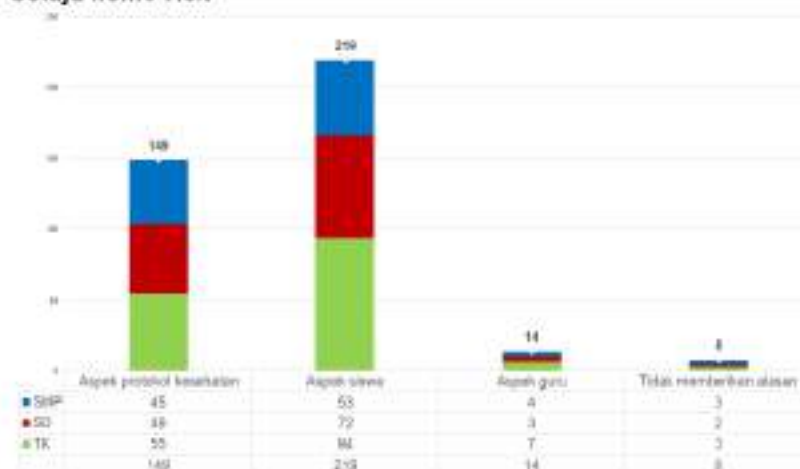
Tanggapan mengenai *home visit*

■ SETUJU HOME VISIT
 ■ TIDAK SETUJU HOME VISIT
 ■ TIDAK JAWAB



HOME VISIT		JK	JK	JAB
SETUJU HOME VISIT		132	99	12
TIDAK SETUJU HOME VISIT		104	196	19
TIDAK JAWAB		9	108	12
Jumlah dan Persentase		245	303	43

Setuju *home visit*

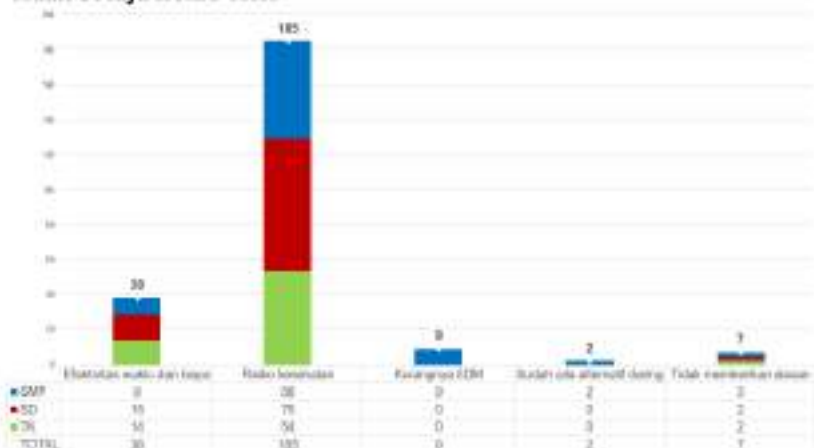


Setuju *home visit* (detail)

Setuju Home Visit	TK	SD	SMP	TOTAL
Aspek protokol kesehatan	55 28%	49 25%	45 26%	149 28%
Selesai protokol kesehatan	48 24%	59 30%	44 26%	151 29%
Dilakukan di daerah yang berisiko tinggi	7 4%	10 5%	3 1%	20 4%
Aspek lokasi	34 47%	72 36%	53 31%	219 38%
Secara privat (per di soal)	52 26%	14 7%	20 12%	86 15%
Dilakukan di rumah kelompok kecil	33 17%	45 23%	21 10%	99 18%
Tempat untuk siswa tertentu	9 5%	13 7%	22 13%	44 8%
Aspek guru	7 4%	3 1%	4 2%	14 2%
Dengan penyusunan materi/kegiatan	7 4%	3 1%	0 0%	10 2%
Dilakukan oleh guru tertentu	0 0%	0 0%	4 2%	4 1%
Tidak memberikan alasan	5 2%	2 1%	3 2%	10 2%

*Total response TK 148-SD 148-SMP 148

Tidak setuju *home visit*



Tidak setuju *home visit* (detail)

Tidak Setuju Home Visit	TK		SD		SMP		TOTAL	
Efektifitas waktu dan biaya	14	7%	15	8%	9	5%	38	7%
Risiko kesehatan	54	27%	75	38%	56	33%	185	32%
Kurangnya SDM	8	0%	0	0%	9	5%	9	2%
Sudah ada alternatif daring	8	8%	0	0%	2	1%	2	0%
Tidak menanggapi alasan	2	1%	2	1%	3	2%	7	1%

Total response: TK 65 SD 93 SMP 36